



**PERANAN ORGANISASI AISYIAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN 1917-1942**

SKRIPSI

Oleh:

Dwi Sindy Anggraeni

NIM 190210302024

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
UNIVERSITAS JEMBER
2023**



**PERANAN ORGANISASI AISYIYAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN 1917-1942**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Jember dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

**Dwi Sindy Anggraeni
NIM 190210302024**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2023

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Eni Wahyuni dan Alm. Bapak Saki yang telah memberikan kasih sayang serta doanya dalam kelancaran menyusun skripsi;
2. Kakak saya Budi Hariyanto yang tersayang;
3. Guru saya sejak dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas, Ibu dan Bapak Dosen yang telah membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
4. Almamater Universitas Jember, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah.

MOTTO

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(terjemahan QS. Al-Baqarah: 216).¹

“Perloe dan wadjib bagi manoesia mendjalankan pengetahoennjya jang oetama, djangan sampai hanja tinggal pengetahoennjya sadja”.²

¹ <https://quran.com/id>

² St. Oemnijah dalam Soeara Aisjijah Januari tahun 1931

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Sindy Anggraeni

NIM : 190210302024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peranan Organisasi Aisyiyah dalam Bidang Pendidikan Tahun 1917-1942” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan hasil karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Desember 2023

Yang Menyatakan,

Dwi Sindy Anggraeni

NIM 190210302024

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “Peranan Organisasi Aisyiyah dalam Bidang Pendidikan Tahun 1917-1942” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada :

Hari : Jum’at

Tanggal : 1 Desember 2023

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Pembimbing

1. Pembimbing Utama

Nama : Dr. Sumardi, M.Hum

NIP : 19600518198902001

Tanda Tangan

()

2. Pembimbing Anggota

Nama : Dr. Nurul Umamah, M.Pd

NIP : 196902041993032008

()

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Drs. Marjono, M.Hum

NIP : 196004421988210012

()

2. Penguji Anggota

Nama : Drs. Kayan Swastika, M.Hum

NIP : 196702102002121002

()

ABSTRAK

Abstract This research discusses the role of Aisyiyah organisation in improving education for women in 1917-1942. The purpose of this research is to examine in depth why the Aisyiyah organisation fought for education for women in 1917-1942 and to examine in depth how the Aisyiyah organisation acted in advancing education for women in 1917-1942. The method used is the historical research method which includes heuristics, criticism, interpretation and historiography. The result of this research is that the increase in education for women carried out by the Aisyiyah organisation was motivated by the dominance of custom and religion, social stratification, and ethical politics. The actions and efforts of the Aisyiyah organisation in the field of education were carried out by establishing educational institutions, forming a women's student organisation, and sending delegates to make speeches representing the Aisyiyah organisation at the 1928 Congress which clearly discussed the importance of education.

Keywords: Aisyiyah organisation, Women and Education.

RINGKASAN

Peranan Organisasi Aisyiyah dalam Bidang Pendidikan Tahun 1917-1942;

Dwi Sindy Anggraeni; 190210302024; 2023; 119 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Pada abad 19 kedudukan kaum perempuan mendapat diskriminasi dalam kehidupan, terutama di bidang pendidikan. Berkembangnya adat di lingkungan masyarakat melahirkan budaya patriarki yang menganggap posisi perempuan lebih rendah di bawah laki-laki. Hal ini ditambah dengan pendidikan pada masa kolonial yang hanya berorientasi pada laki-laki, hampir tidak ada pertimbangan untuk pendidikan perempuan. Pendidikan kaum perempuan diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Terbatasnya akses pendidikan juga terjadi di Kauman, kepercayaan Islam tradisional telah menjuhkan masyarakat terhadap sekolah Belanda dan pendidikan formal berdasar pada kurikulum Eropa tidak mengakomodir untuk pembelajaran agama. Kondisi ini mendorong organisasi Aisyiyah memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan, melalui pendidikan formal maupun keagamaan. Organisasi Aisyiyah menganggap bahwa pendidikan merupakan unsur penting untuk meningkatkan derajat dan martabat seorang perempuan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Mengapa organisasi Aisyiyah memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan pada tahun 1917-1942? ; 2) Bagaimana tindakan organisasi Aisyiyah dalam memajukan pendidikan bagi perempuan pada tahun 1917-1942?. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara lebih mendalam latar belakang dan tindakan organisasi Aisyiyah dalam memperjuangkan pendidikan kaum perempuan. Teori dan Pendekatan dalam penelitian ini adalah teori peran (Soerjono Soekanto) dan pendekatan sosiologi pendidikan (Lester Frank Ward). Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian sejarah yang dilakukan melalui empat tahap yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Hasil Penelitian yang ditemukan secara garis besar yaitu, kondisi yang melatarbelakangi berdirinya organisasi Aisyiyah tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi kaum perempuan. Jauh sebelum munculnya organisasi Aisyiyah, emansipasi kaum wanita belum merebak ke seluruh masyarakat, kehidupan para perempuan diasosiasikan hanya untuk menjadi patuh terhadap laki-laki (suami). Dominasi adat dan agama membuat masyarakat menjalankan praktek pernikahan dini dan mengisolasi diri dari pengaruh luar terutama Belanda. Stratifikasi sosial menempatkan kedudukan kaum perempuan semakin berada di lapisan bawah, mereka tidak diperkenankan memperoleh pelajaran formal, karena pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan bahwa sistem persekolahan disusun berdasar pada perbedaan lapisan sosial di masyarakat. Selain itu, berdirinya sekolah-sekolah akibat kebijakan politik etis, membuat semakin terlihatnya ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai organisasi perempuan yang memiliki tujuan utama untuk menumbuhkan kesadaran kaum perempuan terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar. Maka, organisasi Aisyiyah berperan memperjuangkan hak-hak perempuan dengan bidang pendidikan seperti, mendirikan TK Aisyiyah Busthanul Atfal dan Kweekschool Muhammadiyah Istri, Siswo Proyo Wanito (Nasyiatul Aisyiyah), serta terlibat langsung dalam Kongres Wanita Indonesia Pertama tahun 1928.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi Aisyiyah sebagai organisasi perempuan yang lahir selama masa penjajahan, telah ikut aktif berperan dalam membela dan memajukan bangsa dan Negara utamanya dengan memberi perhatian lebih pada kaum perempuan. Melalui gerakan dibidang pendidikan, Aisyiyah membina generasi muda untuk ikut andil dalam ranah publik dan mendukung penghapusan yang menyatakan bahwa kaum perempuan kedudukannya berada dibawah laki-laki. Selain itu, organisasi Aisyiyah mampu menaikkan derajat kaum perempuan yang pada saat itu dianggap sebagai pihak kedua. Saran dari penelitian ini adalah menjadi sumber referensi tambahan dan pengetahuan baru tentang peranan organisasi perempuan Islam pertama, yang memiliki perhatian khusus terhadap pendidikan kaum perempuan.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Organisasi Aisyiyah dalam Bidang Pendidikan Tahun 1917-1942”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penulis dalam menyusun skripsi, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang turut membantu selesainya karya tulis ilmiah ini, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr.Ir. Iwan Taruna, M.Eng selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd selaku Dekan FKIP Universitas Jember
3. Prof. Dr. Sr Astutik, M. Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
4. Drs. Marjono, M.Hum selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah dan Dosen Penguji Utama yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, saran dan mengingatkan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini ;
5. Dr. Sumardi, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, saran dan kritikan yang membangun dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;
6. Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, perhatian, kritikan dan saran yang membangun, serta selalu memotivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Drs. Kayan Swastika, M.Si selaku Dosen Penguji Anggota yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;

8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan;
9. Orang tua saya, Alm Bapak Saki dan Ibu Eni Wahyuni, yang senantiasa memberi limpahan kasih sayang, doa, dukungan moril serta materil selama ini. Terima kasih atas semua limpahan cinta dan kasih sayang, juga kesabarannya yang tidak pernah usang;
10. Kakak saya Budi Hariyanto, yang selalu memberikan doa, nasihat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta keluarga besar yang telah memberi dukungan;
11. Sahabat-sahabat terkasihku dan teman-teman Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2019, terima kasih atas segala masukan dan bantuan yang telah kalian berikan dalam penyusunan skripsi ini;
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Jember, 1 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DARTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Judul.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	19
BAB 4. LATAR BELAKANG ORGANISASI AISYIYAH MEMPERJUANGKAN PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN	26
4.1 Kondisi Pendidikan Kaum Perempuan.....	26
4.2 Dominasi Adat dan Agama.....	33
4.3 Stratifikasi Sosial	39
4.4 Politik Etis	46

BAB. 5 PERANAN ORGANISASI AISYIYAH DALAM MEMAJUKAN PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN PADA TAHUN 1917-1942	51
5.1 Sejarah Berdirinya Organisasi Aisyiyah.....	51
5.2 Mengelola Lembaga Pendidikan	56
5.3 Mengurus Organisasi Pelajar Perempuan	66
5.4 Terlibat dalam Kongres Wanita Indonesia	71
BAB 6. PENUTUP	78
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	88

DARTAR TABEL

Tabel 4. 1 Siswa Pribumi di HIS (<i>Hollands Indische School</i>) 1915-1940.....	30
Tabel 4. 2 Siswa Pribumi di ELS (<i>Europese Lagere School</i>) 1900-1940.....	31
Tabel 4. 3 Siswa yang mengikuti sekolah pelatihan tahun 1927	32
Tabel 5. 1 Rencana Pembelajaran di Kweekschool	64
Tabel 5. 2 Perwakilan utusan organisasi perempuan dalam Kongres 1928.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Penelitian.....	88
Lampiran 2. Foto Para Penggerak Aisyiyah Memakai Kerudung Tahun 1928 ...	89
Lampiran 3. Murid TK ABA Memakai Baju Adat Jawa dan Berkerudung	89
Lampiran 4. Pidato Utusan Organisasi Aisyiyah di Kongres Pertama 1928	89

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Aisyiyah lahir tidak lepas dari organisasi induknya yakni Muhammadiyah. Organisasi Aisyiyah ialah organisasi perempuan yang awal kemunculannya dimulai sejak K.H Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah serta menginsyafi perlunya membantu perempuan dengan menyelenggarakan sejumlah kursus mengenai perintah agama Islam (Wieringa, 1999: 28). Perhatiannya tidak hanya berpusat pada para pemuda, tetapi juga terhadap kaum perempuan. Dalam pandangannya kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki baik di bidang keagamaan ataupun sosial masyarakat, karena kaum perempuan di pandang mampu mendukung kemajuan pembangunan masyarakat (Mu'arif & Setyowati, 2020: 21-24). Dari pandangan inilah nantinya K.H Ahmad Dahlan mengilhami berdirinya organisasi perempuan yang dikenal dengan nama Aisyiyah.

Pada awal kemunculan organisasi perempuan, organisasi yang ada masih bersifat perorangan. Jauh sebelum munculnya perjuangan perempuan secara berkelompok (ber-organisasi) telah ada perjuangan perempuan secara perorangan, pada periode ini perjuangan perempuan menunjukkan kesadaran akan pentingnya perubahan kehidupan, terutama perubahan kehidupan perempuan yang telah berkembang dalam lingkungan masyarakat. Perjuangan perempuan pada periode ini dapat di bagi menjadi dua yakni perjuangan dengan jalan peperangan seperti yang di lakukan oleh Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Raden Ayu Ageng Serang dan perempuan pejuang lainnya. Sedangkan perjuangan perempuan yang kedua yakni melalui pendidikan seperti yang di lakukan oleh, R.A Kartini, Dewi Sartika, Haji Rasuna Said, Siti Walidah dan perempuan pejuang lainnya (Darban, 2010: 38). Siti Walidah merupakan salah satu pemimpin organisasi Aisyiyah yang memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan.

Pembentukan organisasi perempuan yang memperjuangkan pendidikan kaumnya kemudian muncul setelah maraknya emansipasi di kalangan masyarakat, termasuk salah satunya organisasi Aisyiyah. Pergerakan perempuan pertama oleh

Budi Utomo yakni Poetri Mardika, telah mempengaruhi K.H Ahmad Dahlan dalam mendirikan organisasi Aisyiyah. Cikal bakal lahirnya organisasi Aisyiyah berawal dari perkumpulan “*Sapa Tresna*” di kampung Kauman tahun 1914. K.H. Ahmad Dahlan dan Nyai Siti Walidah melakukan bimbingan terhadap anak-anak perempuan yang berusia sekitar 15 tahun dengan pembelajaran agama. Selain anak-anak, pendidikan dan pembinaan terhadap wanita yang usianya lebih tua juga dilakukan mengingat pentingnya perempuan mendapat peran yang layak di masyarakat (Sungaidi, 2017: 35). Perkumpulan *Sapa Tresna* mendorong setiap perempuan untuk mengenyam pendidikan, baik pendidikan formal maupun keagamaan (Mu’arif & Setyowati, 2020: 57). Organisasi Aisyiyah menganggap bahwa pendidikan merupakan unsur penting untuk kesejahteraan dan perkembangan masyarakat.

Pemberian kesempatan menempuh pendidikan formal yang dilakukan organisasi Aisyiyah mendapat pertentangan masyarakat umum kala itu, perempuan dipandang tidak perlu mengenyam pendidikan secara formal. Masyarakat Kauman juga memiliki pandangan yang sama, masyarakat Kauman meskipun pada abad ke-20 telah banyak menjadi masyarakat agamis tetapi mereka masih belum meninggalkan kepercayaan Islam tradisional seperti *syirik, taqlid, dan khurafat*. Hal ini menyebabkan masyarakat menjauhkan diri terhadap pengaruh luar terutama Belanda (Munfaizah, 2021: 1). Sehingga dalam pendidikan masyarakat Kauman hanya mendukung pembelajaran agama Islam dan mengesampingkan pengetahuan umum, bahkan muncul anggapan dalam masyarakat Kauman pendidikan formal bagi anak perempuan dapat menurunkan martabat perempuan. Oleh sebab itu, anak-anak Kauman yang menempuh pendidikan di sekolah Belanda sedikit jumlahnya (Darban, 2010: 2-5). Meskipun organisasi Aisyiyah bersifat keagamaan, namun perhatiannya terhadap pendidikan formal juga tidak ditinggalkan, mengingat pentingnya pengetahuan umum dalam memajukan anak bangsa.

Selain gagasan mengenai pemberian pendidikan formal, pemberian pendidikan agama oleh organisasi Aisyiyah juga dipandang signifikan mengingat pemerintah kolonial memberikan pendidikan formal berdasar pada kurikulum

Eropa dan tidak mengakomodir untuk pembelajaran agama. Pendidikan gaya barat yang diberikan oleh pemerintah kolonial pada dasarnya bertujuan untuk menentang adanya dampak politis yang dihasilkan oleh pan-islamisme, dengan memberikan pendidikan gaya barat bagi kaum pribumi dijadikan sebagai salah satu aspek kebijakan pemerintah kolonial untuk membuat bumiputra berbalik melawan modernisme Islam (Ro'fah, 2016: 12-13). Hal ini menyebabkan tidak adanya pendidikan agama disekolah dan pendidikan barat hanya bertindak pada legitimasi pemerintah (Arifin 1987: 183 dalam Halilurrahman, 2013: 2). Pendidikan formal Eropa yang ditempuh anak-anak pribumi mengalami ketertinggalan akan pengetahuan agama. Sehingga, kajian mendalam tentang Islam pada perkumpulan perempuan dalam organisasi Aisyiyah telah menjadi solusi atas tertinggalnya pendidikan agama.

Gagasan awal tentang pendidikan, sebagai kunci kemajuan perempuan kemudian terus dikembangkan oleh organisasi Aisyiyah. Dukungan kuat dari Muhammadiyah terhadap pendidikan semakin digiatkan. Pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-11 di Yogyakarta tahun 1922 hasil mukhtamar mengumumkan kepada setiap cabang Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi Aisyiyah di setiap daerah yang telah ditentukan. Perintah ini berpengaruh kuat dalam mengembangkan pendidikan perempuan yang menjadi basis organisasi Aisyiyah (Amini, 2021: 39). Perkembangan pesat cabang Muhammadiyah terjadi tahun 1922, dimana banyaknya cabang ini membuat bidang pendidikan menjadi ide dasar perkembangan organisasi Aisyiyah.

Organisasi Aisyiyah menganggap bahwa pendidikan merupakan unsur penting untuk kesejahteraan dan perkembangan masyarakat. Aspek gerak Aisyiyah adalah bidang pendidikan, keagamaan, sosial-kemasyarakatan, dan kewanitaan. Melalui empat aspek tersebut, Aisyiyah berhasil menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan pemahaman Islam kepada anak-anak perempuan, yang mampu memiliki kecakapan dan turut andil dalam pembaruan pemikiran di Kauman (Seniwati & Lestari, 2019: 229). Aisyiyah dalam membangkitkan derajat kaum perempuan dilakukan dengan meningkatkan dan memperluas peran perempuan di bidang agama, sosial, dan pendidikan (Remiswal *et al.*, 2021: 75).

Aisyiyah menunjukkan kepekaan sosialnya dan keinginan untuk terus berkembang dengan memperbarui pendekatan pemecahan masalah salah satunya melalui pendidikan (Amini, 2021: 38). Pendidikan sebagai fokus perjuangan perempuan, pada akhirnya dinilai mampu memberikan perubahan bermanfaat bagi perempuan di kemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendidikan bagi kaum perempuan, melalui organisasi bercorak sosial keagamaan pertama bernama Organisasi Aisyiyah. Alasan *Pertama*, penelitian ini dianggap penting karena peranan Organisasi Aisyiyah sebagai organisasi pembaharu yang berbasis keagamaan memberikan peluang dan kesempatan kepada kaum perempuan untuk mengenyam pendidikan formal, menjalankan peran dalam masyarakat, serta berdakwah dalam ranah publik, dan mendukung penghapusan anggapan yang menyatakan bahwa perempuan merupakan *swarga nunut neraka katut* ataupun *kanca wingking* (Qodariah, 2017: 165). K.H Ahmad Dahlan melalui organisasi Aisyiyah mendorong para perempuan Kauman untuk belajar dan bersekolah di sekolah umum, tercatat tiga nama yakni Siti Bariyah, Siti Wadingah, dan Siti Dawimah yang telah berhasil menempuh pendidikan di *Neutraal Meisjes School* di Ngupasan.

Kedua, penelitian ini dianggap penting karena peranan organisasi Aisyiyah dalam pendidikan tidak hanya mengusahakan kaum perempuan untuk mendapat pendidikan formal, akan tetapi juga pendidikan agama. Sekolah umum yang diselenggarakan oleh Belanda pada dasarnya tidak mengajarkan pembelajaran agama, sehingga lulusannya pun dapat dikatakan tidak menguasai ilmu agama. Dalam mengimbangi kedangkalan pengetahuan agama, K.H Ahmad Dahlan memberikan pelajaran agama melalui pengajian (*cursus agama*) pada sore hari, yang kemudian berkembang menjadi sebuah perkumpulan *Sapa Tresna* tahun 1914 (Amini, 2021: 38-39 ; Mu'arif & Hajar, 2021: 26-27). Ditambah, potensi yang dimiliki oleh Organisasi Aisyiyah dalam mengembangkan pendidikan bagi kaum perempuan tidak hanya dengan membentuk perkumpulan pengajian wanita, tetapi berlanjut dengan berdirinya lembaga pendidikan, mushalla khusus wanita, dan mulai menerbitkan majalah Suara Aisyiyah.

Ketiga, selain itu peneliti juga tertarik dengan topik penelitian mengenai sejarah perempuan, karena bertujuan untuk menggeser dominasi penulisan sejarah yang *androcentris* (berpusat pada laki-laki) menuju penulisan sejarah bercorak *androgynous* (melibatkan perempuan dan laki-laki), khususnya pada masa pergerakan nasional (Kuntowijoyo, 2013). Maka, penelitian ini diharapkan dapat menutup celah tersebut dengan menyajikan dan memberikan sumbangsih terkait sejarah perempuan yakni “organisasi Aisyiyah”.

Sebagai mahasiswa pendidikan sejarah yang mempunyai tugas Tri Darma perguruan tinggi, penelitian ini adalah hal wajib yang harus dikerjakan. Serta sebagai calon guru profesional haruslah seorang pendidik dapat menguasai materi sejarah Indonesia. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini sesuai dengan Capaian Pembelajaran Kelas XI atau Fase F yang ada dalam Kurikulum Merdeka Sejarah Indonesia yakni “peserta didik mampu menganalisis serta mengevaluasi berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia yang dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan berbagai peristiwa lain yang terjadi di dunia pada periode Pergerakan Kebangsaan Indonesia”. Penerapan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang berkaitan dengan sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia.

Berdasarkan materi ini peserta didik dapat menganalisis berbagai macam pergerakan nasional. Selama ini sebagian besar peserta didik hanya mengetahui strategi mewujudkan pergerakan nasional yang bersifat demokrat dan radikal saja. Faktanya masih ada periode moderat atau kooperatif, dimana pada periode ini organisasi Muhammadiyah membentuk organisasi perempuan “Aisyiyah”, organisasi Aisyiyah sendiri dalam upaya melancarkan pergerakan nasional menerbitkan majalah Suara Aisyiyah sebagai wadah untuk menciptakan kemajuan bagi kaum perempuan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti mengangkat persoalan tersebut yang dirumuskan dengan judul “Peranan Organisasi Aisyiyah dalam bidang Pendidikan Tahun 1917-1942”.

1.2 Penegasan Judul

Penegasan pengertian judul bertujuan guna menghindari adanya kemungkinan perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca, terhadap

permasalahan yang ada. Dari judul “Peranan Organisasi Aisyiyah dalam Bidang Pendidikan Tahun 1917-1942”, peneliti memberikan penjelasan dan batasan yang relevan agar dapat dipahami oleh para pembaca, adapun istilah yang perlu dijelaskan dari judul penelitian menjadi beberapa pengertian kata diantaranya Peranan, Organisasi Aisyiyah, dan Pendidikan.

Definisi peranan yang digunakan yakni disampaikan oleh Biddle dan Thomas. Peran yang dimaksud adalah menyamakan terjadinya suatu peristiwa peran dengan penampilan seorang aktor suatu “lakon” di atas pentas, dalam kehidupan sosial yang sesungguhnya memainkan peran berarti memegang suatu kedudukan sosial dalam masyarakat. Peranan merupakan serangkaian aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam membatasi perilakunya guna menduduki posisi tertentu di masyarakat (Suhardono, 1994: 7-15). Cohen (1998: 76) juga menyatakan, bahwa peranan adalah tindakan yang diharapkan oleh seseorang yang menduduki status tertentu (Suhardono, 1994: 6). Hal ini terkait keterlibatan seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa, yang dianggap mempunyai peran untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pemilik status sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini peranan sosial yang dimaksud adalah dari sebuah Organisasi Aisyiyah.

Organisasi Aisyiyah merupakan gerakan perempuan yang bergerak pada bidang sosial keagamaan, organisasi yang dimiliki oleh Muhammadiyah ini lahir bertepatan pada peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 19 Mei 1917 di Yogyakarta (Darban, 2010: 18). Lahirnya organisasi Aisyiyah tidak terlepas dari adanya perkumpulan gadis-gadis di kampung Kauman yakni perkumpulan pengajian “*Sapa Tresna*” yang telah ada sejak tahun 1914, dimana sejak itu K.H Ahmad Dahlan selaku pendiri organisasi Aisyiyah sangat mendorong untuk para kaum perempuan menempuh pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan (Mu’arif & Setyowati, 2020: 57). Tujuan utama dari organisasi Aisyiyah tidak terlepas dari membimbing kaum perempuan kearah kesadaran beragama dan berorganisasi.

Pendidikan menurut tim penyusun pembinaan dan pengembangan bahasa dalam KBBI (1991: 232) menyatakan bahwa “*pendidikan merupakan proses*

pengubahan sikap dan tata perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan". Pendidikan juga merupakan kebutuhan dasar setiap insan manusia yang dijadikan sebagai bekal kelak di kehidupan mendatang (Susilo & Sarkowi, 2018: 46). Melalui pendidikan manusia dapat mempunyai kedudukan, status, dan peran dalam kehidupannya. Sehingga organisasi Aisyiyah menggunakan pendidikan sebagai alat untuk memajukan kaum perempuan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka maksud yang terkandung dalam judul "Peranan Organisasi Aisyiyah dalam Bidang Pendidikan Tahun 1917-1942", adalah tindakan Organisasi Aisyiyah dalam memajukan pendidikan untuk kaum perempuan, dengan memperjuangkan pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan bagi perempuan, mendirikan mushalla khusus wanita, terlibat dalam kongres perempuan dan menerbitkan majalah *Suara Aisyiyah* yang dimulai sejak berdirinya organisasi Aisyiyah pada tahun 1917-1942.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penyusunan ruang lingkup penelitian berisi pembatasan permasalahan yang digunakan, guna memfokuskan pada aspek yang akan dikaji. Ruang lingkup yang di maksud terdiri dari tiga bagian yakni temporal, spasial, dan materi.

Lingkup temporal atau waktu, penelitian ini mengambil batasan tahun 1917 sampai tahun 1942, tahun 1917 dijadikan batasan awal karena pada tahun ini adalah awal berdirinya Organisasi Aisyiyah, sedangkan tahun 1942 dijadikan sebagai batasan akhir penelitian, karena tahun 1942 pada tahun ini kekuasaan militer Jepang mulai menguasai organisasi-organisasi politik dan memberikan tekanan terhadap gerakan nasionalis. Pemerintah Jepang membubarkan organisasi politik, keagamaan, bahkan organisasi-organisasi perempuan dan mendirikan lembaga baru sebagai penggantinya. Kondisi ini menyebabkan pergerakan perempuan mengambil langkah mundur dalam perjuangan mereka. Maka dari itu sejak tahun 1942 organisasi perempuan termasuk salah satunya Organisasi Aisyiyah mulai kehilangan perannya dalam masyarakat, karena perhatian mereka diarahkan hanya pada kepentingan bagi usaha perang untuk mewujudkan

kemakmuran Asia Timur Raya (Ro'fah, 2016: 58-59). Penentuan ruang lingkup ini tidaklah mutlak tetapi bersifat fleksibel, karena tidak menutup kemungkinan peneliti menyinggung peristiwa yang berkenaan dengan kajian penelitian baik sebelum tahun 1917 ataupun setelah tahun 1942.

Lingkup batasan spasial (tempat), penelitian ini berfokus di pulau Jawa khususnya daerah Yogyakarta, karena Yogyakarta merupakan tempat pertama kali berdiri dan berkembangnya Organisasi Aisyiyah dalam memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan pada umumnya.

Ruang lingkup terakhir yakni materi, penelitian ini menganalisis tindakan organisasi Aisyiyah dalam memajukan pendidikan bagi kaum perempuan pada tahun 1917-1942. Tindakan yang dilakukan organisasi Aisyiyah dalam memajukan pendidikan bagi kaum perempuan dibuktikan dengan berdirinya lembaga pendidikan, membentuk organisasi untuk pelajar perempuan, dan ikut serta dalam kongres wanita dengan salah satu tujuannya yakni untuk memperjuangkan pendidikan kaum perempuan. Dengan adanya ruang lingkup masalah ini peneliti berharap untuk para pembaca dapat dengan jelas memahami isi, makna, serta tujuan penelitian guna menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan. Dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa organisasi Aisyiyah memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan pada tahun 1917-1942?.
2. Bagaimana tindakan organisasi Aisyiyah dalam memajukan pendidikan bagi perempuan pada tahun 1917-1942?.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dengan demikian yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji secara mendalam terkait mengapa organisasi Aisyiyah memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan pada tahun 1917-1942
2. Untuk mengkaji secara mendalam terkait bagaimana tindakan organisasi Aisyiyah dalam memajukan pendidikan bagi perempuan pada tahun 1917-1942

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai peran Organisasi Aisyiyah dalam bidang pendidikan tahun 1917-1942.
2. Bagi mahasiswa calon guru sejarah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah materi sejarah mengenai sejarah pergerakan nasional salah satunya dilakukan oleh organisasi pergerakan perempuan yakni Organisasi Aisyiyah melalui pendidikan.
3. Bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta referensi sejarah mengenai pembahasan peran Organisasi Aisyiyah dalam bidang pendidikan, serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menambah khazanah kepustakaan Universitas Jember.
4. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah pengetahuan tentang peran Organisasi Aisyiyah dalam bidang pendidikan tahun 1917-1942.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustaka berisi uraian sistematis terkait beberapa hasil penelitian sebelumnya dan mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dalam penelitian sejarah, diperlukan pemaparan sejarah penulisan (historiografi) dalam bidang yang akan diteliti dan seluruh penelitian yang akan diulas (Abdurahman, 2007: 61). Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis disini melakukan telaah teori, serta mengkaji dan mengulas hasil penelitian terdahulu baik berupa buku, jurnal, dan skripsi, dengan tujuan untuk meletakkan kedudukan dan posisi penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian terdahulu yang didalamnya mendukung dan terkait dengan penelitian dengan judul *Peranan Organisasi Aisyiyah Dalam Bidang Pendidikan Tahun 1917-1942* yang penulis telah dapatkan diantaranya:

Karya pertama berupa buku ditulis oleh Ro'fah (2016) dengan judul *Posisi dan Jatidiri Aisyiyah dalam Perubahan dan Perkembangan*. Buku ini menjelaskan secara garis besar sejarah perkembangan Organisasi Aisyiyah yang dimulai pada masa awal berdirinya, hingga pada eksistensi Aisyiyah dengan periode pemerintahan pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan hingga pada masa orde baru. Dalam setiap bab pembahasan banyak dijelaskan mengenai keterlibatan Aisyiyah dalam berbagai bidang, mulai dari ranah politik dimana dijabarkan mengenai perbandingan Aisyiyah dengan organisasi perempuan lain, selain itu dijabarkan juga mengenai keterlibatan Aisyiyah dalam pergerakan perempuan Indonesia yakni dengan terlibat langsung dalam Kongres Wanita dengan ciri khasnya sebagai organisasi muslim. Dalam penelitian ini ruang lingkup spasialnya tidak hanya terbatas pada pulau Jawa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada pembahasan yang lebih rinci terkait peran Organisasi Aisyiyah dalam pendidikan kaum perempuan dan juga ruang lingkup spasialnya hanya dilakukan di pulau Jawa khususnya Yogyakarta.

Karya kedua dari buku berjudul *Covering Aisyiyah : Dinamika Gerakan Perempuan Islam Berkemajuan Periode Awal* yang ditulis oleh Mu'arif dan H. N.

Setyowati (2020), buku ini menjelaskan sejarah Organisasi Aisyiyah secara lengkap mulai dari gagasan berdirinya Aisyiyah yang tidak lepas dari peran K.H Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah yang juga memiliki perhatian terhadap kedudukan kaum perempuan khususnya para gadis Kauman sebagai penggerak perubahan. Dalam buku ini juga dijelaskan dinamika perkembangan Aisyiyah mulai dari sejarah berdirinya Aisyiyah, keterlibatan dalam Kongres Perempuan, penerbitan majalah dan keberhasilannya mendirikan lembaga pendidikan taman kanak-kanak. Pada bagian terakhir buku dipaparkan tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam organisasi Aisyiyah baik tokoh pendiri ataupun tokoh penggerak Organisasi Aisyiyah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus pembahasannya, penelitian dalam buku ini hanya menjelaskan secara garis besar keterlibatan organisasi Aisyiyah dalam memajukan pendidikan bagi kaum perempuan, dan pembahasannya meluas pada aktivitas-aktivitas untuk mengembangkan organisasi Aisyiyah, sedangkan fokus penelitian penulis disini lebih terperinci terkait pada peran Organisasi Aisyiyah dalam memajukan pendidikan bagi kaum perempuan.

Karya ketiga dari buku berjudul *Aisyiyah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia: Sebuah Tinjauan Awal* yang ditulis oleh Darban, A. A. (2010), buku ini tidak hanya menjelaskan tentang sejarah Organisasi Aisyiyah tetapi juga membahas pergerakan perempuan di Indonesia. Pembahasan mengenai gerakan Aisyiyah dalam buku ini tidak dijelaskan secara khusus melainkan hanya memberi tekanan pada partisipasi dan kontribusi Aisyiyah dalam gerakan perempuan di Indonesia. Buku ini memiliki tujuh bab, dimana bab 1-2 pembahasannya lebih banyak mengarah pada organisasi pergerakan perempuan pada umumnya, sedangkan pada bab 3-6 disinggung kontribusi Aisyiyah secara proporsional dalam peta gerakan organisasi-organisasi perempuan Indonesia, sehingga nantinya tampak jelas posisi Aisyiyah dalam gerakan perempuan Indonesia secara keseluruhan. Selain itu buku ini juga menggunakan tahun penelitian dari sebelum abad dua puluh dimana pergerakan perempuan masih belum mendapat dukungan dari masyarakat hingga pada era masa reformasi dimana pergerakan perempuan telah banyak memperjuangkan hak-hak kaum

wanita. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada pokok pembahasan dan juga tahun penelitiannya. Dalam penelitian buku ini, fokus pembahasan mengenai peran organisasi Aisyiyah dalam bidang pendidikan hanya di singgung terkait keterlibatannya dalam memperjuangkan pendidikan untuk perempuan dalam Kongres Wanita Indonesia, selain itu tahun dalam penelitian ini meluas pada masa reformasi. Sedangkan, penelitian penulis lebih memfokuskan pada tindakan-tindakan Organisasi Aisyiyah dalam memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan dan juga tahun yang digunakan hanya sampai 1942.

Penelitian dari hasil skripsi dengan judul *Peranan Siti Walidah dalam mengembangkan Organisasi Aisyiyah pada Tahun 1921-1927* yang ditulis oleh Munfaizah, F. A. (2021), penelitian ini menjelaskan mengenai salah satu peran pemimpin Aisyiyah dalam mengembangkan Organisasi Aisyiyah yakni Siti Walidah. Dalam penelitian ini dijelaskan faktor pendorong dan tindakan Siti Walidah mengembangkan Organisasi Aisyiyah, pada masa awal berdirinya Aisyiyah pengembangan organisasi hanya berfokus pada pembinaan pendidikan kaum perempuan melalui pengajian namun setelah kepemimpinan Siti Walidah mulai berdiri lembaga pendidikan umum yang bekerja sama dengan Muhammadiyah. Penelitian ini berfokus pada tahun 1921-1927 dimana tahun 1921 merupakan tahun dimana Aisyiyah mengalami perkembangan yang pesat dan tahun 1927 merupakan tahun terakhir dimana Siti Walidah menjabat sebagai pemimpin Aisyiyah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasannya, dalam penelitian ini peran organisasi Aisyiyah dalam pendidikan hanya di singgung pada saat kepemimpinan Siti Walidah, sehingga penelitian penulis disini, mempunyai celah untuk membahas secara keseluruhan bagaimana peran Organisasi Aisyiyah dalam memajukan pendidikan bagi kaum perempuan dalam rentan waktu 1917-1942.

Penelitian dari hasil skripsi yang kedua dengan judul *Peranan Organisasi Aisyiyah dalam Pemberdayaan Perempuan di Jawa Tahun 1917-1945* yang ditulis oleh Lestari, A. P. D. (2019), penelitian ini menjelaskan terkait bagaimana Aisyiyah melakukan pemberdayaan terhadap kaum perempuan di Pulau Jawa.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberdayaan terhadap perempuan dilakukan Aisyiyah bermula dari adanya tradisi yang berkembang di masyarakat Jawa, yang ditandai dengan munculnya ruang terbatas pada aktivitas sosial, politik, dan ekonomi terhadap kaum perempuan, tindakan untuk menentang tradisi dilakukan Aisyiyah dengan berbagai cara seperti membina generasi muda dengan jalur pendidikan dan pengajian, selain itu melalui media cetak “Suara Aisyiyah” disampaikan dengan efektif informasi-informasi sebagai media dakwahnya dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kaum perempuan. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada kajian penelitiannya, penelitian ini secara umum membahas peran Aisyiyah dalam pemberdayaan perempuan yang dilakukan pada berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan, namun pembahasan mengenai bidang pendidikan hanya membahas mengenai keberhasilan Organisasi Aisyiyah dalam mendirikan lembaga pendidikan dan organisasi bagi pelajar perempuan. Sedangkan penelitian penulis disini memfokuskan pada peran Organisasi Aisyiyah dalam bidang pendidikan, mulai dari faktor apa yang melatar belakangi organisasi Aisyiyah terjun dalam bidang pendidikan perempuan hingga pada tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan untuk memajukan pendidikan kaum perempuan.

Selain skripsi, terdapat juga penelitian dari beberapa jurnal. Penelitian pertama dari jurnal berjudul *Aisyiyah dan Peranannya dalam Meningkatkan Derajat Kaum Perempuan* yang ditulis oleh Remiswal., S. Fajri, dan R. Putri. (2021), penelitian ini menjelaskan peran Organisasi Aisyiyah dari berbagai bidang pertama peranan Organisasi Aisyiyah di bidang agama dimana Aisyiyah telah berhasil melakukan reformasi islam dengan membuat perubahan akan pandangan terhadap kaum perempuan, bukti nyata dapat dilihat dari adanya perubahan cara berpakaian perempuan dan juga adanya kegiatan pengajian dengan muballighatnya dikirim langsung oleh Aisyiyah serta pada perkembangannya didirikan sebuah Mushalla bagi kaum perempuan. Kedua peranan Aisyiyah dalam bidang sosial, Aisyiyah banyak melakukan kontribusi langsung pada masyarakat sekitar seperti melakukan santunan kepada anak yatim, membantu korban bencana alam, mengadakan layanan kesehatan, serta melakukan penyuluhan kepada

masyarakat tentang pentingnya kesadaran terhadap penyakit berbahaya dan menular. Ketiga peranan Aisyiyah dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari berdirinya lembaga pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti memiliki celah untuk lebih fokus membahas peranan Aisyiyah dalam pendidikan kaum perempuan, karena dalam penelitian ini peranan Aisyiyah dalam pendidikan hanya disinggung sedikit yakni keberhasilannya dalam mendirikan lembaga pendidikan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas secara lebih mendalam peranan Aisyiyah dalam pendidikan kaum perempuan.

Penelitian kedua dari jurnal berjudul *Aisyiyah and The Problem Of Women's Social Movement In Indonesia: A Historical Perspective*, yang ditulis oleh Amini, M. (2021), penelitian ini menjelaskan gerakan sosial yang dilakukan Aisyiyah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan sebuah keluarga, gerakan sosial yang dilaksanakan karena adanya beberapa permasalahan yang dihadapi kaum perempuan seperti masalah perkawinan, reproduksi, dan pendidikan. Berbagai permasalahan ini secara langsung telah mengilhami berdirinya organisasi perempuan yang nantinya mampu memberikan jalan keluar bagi kaum perempuan dan keluarganya, hal tersebut akhirnya mendorong terbentuknya Organisasi Aisyiyah. Gerakan sosial yang dilakukan Aisyiyah tidak lepas dari amal usahanya yakni berfokus terhadap masalah pendidikan, perlindungan perempuan, dan keluarga. Permasalahan akan pendidikan muncul ketika ketika sekolah-sekolah hanya menerapkan pendidikan berdasar pada kurikulum Eropa, hal ini berakibat pada ketertinggalan akan pengetahuan agama. Sehingga dengan adanya kajian islam yang dilakukan oleh Organisasi Aisyiyah pada sore hari telah membantu mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian ide gerakan sosial juga dilakukan dengan mendirikan beberapa lembaga pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian ini, secara garis besar membahas gerakan sosial yang dilakukan Organisasi Aisyiyah, perbedaan dengan penelitian peneliti disini terletak pada pembahasannya yang membahas secara lebih detail dan mendalam terkait faktor pendorong dan usaha-usaha Organisasi Aisyiyah mengembangkan pendidikan bagi kaum perempuan.

Penelitian ketiga dari jurnal berjudul *Sikap Wanita Muslim Kauman : Kajian Peranan Aisyiyah dalam Kebangkitan Wanita di Yogyakarta pada tahun 1914-1928* yang ditulis oleh Seniwati dan Lestari (2019), penelitian ini menjelaskan peran Aisyiyah dalam kebangkitan wanita yang ada di Yogyakarta dilakukan dengan cara mengubah pandangan terhadap wanita yang tugasnya hanya mengurus rumah tangga, perubahan akan paradigma ini mulai dilakukan dengan memberikan hak, kewajiban, dan peran yang sama bagi kaum wanita. Dalam menggerakkan adanya perubahan akan paradigma ini Aisyiyah melakukan berbagai kegiatan dalam masyarakat baik di bidang pendidikan, sosial masyarakat, keagamaan dan kewanitaan. Kebangkitan wanita di kauman ditunjukkan dari adanya keterlibatan kaum perempuan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Aisyiyah, sehingga hal ini telah menambah kecakapan kaum perempuan untuk mampu terjun dalam publik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti terletak pada ruang lingkup materi yang akan dijabarkan, penelitian ini membahas peranan Organisasi Aisyiyah dalam bidang pendidikan hanya terbatas pada berhasilnya mendirikan lembaga pendidikan, sedangkan peneliti akan membahas secara lebih detail dan mendalam peran Organisasi Aisyiyah dalam pendidikan kaum perempuan.

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai Organisasi Aisyiyah. Maka posisi penelitian ini ialah untuk mengembangkan penelitian tentang peranan Organisasi Aisyiyah. Di sini peneliti berusaha memperluas, mengembangkan serta menggali lebih dalam kajian Peranan Organisasi Aisyiyah dalam Bidang Pendidikan 1917-1942 dengan menggunakan fakta-fakta baru yang lebih konkret dan pembahasannya difokuskan secara detail. Meskipun beberapa penelitian yang telah dijabarkan diatas telah membahas mengenai peranan organisasi Aisyiyah. Akan tetapi, kajian yang disajikan masih kurang lengkap serta detail mengenai pembahasan yang ada. Bahkan pembahasannya masih belum terperinci dan berfokus pada kajian terkait Peranan Organisasi Aisyiyah dalam Bidang pendidikan Tahun 1917-1942.

Selain mengulas penelitian terdahulu pada bab ini juga akan dibahas mengenai pendekatan dan teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan

pendekatan sosiologi pendidikan untuk lebih memperdalam kajian sejarahnya. Pendekatan sosiologi pendidikan yang digunakan dikembangkan oleh Lester Frank Ward pada tahun 1983, ia menegaskan bahwa pendidikan adalah sumber utama memajukan umat manusia.

Pendekatan sosiologi pendidikan Lester Frank Ward pertama kali muncul dalam pidato pengangkatannya sebagai ketua pertama dari *American Sociological Association* (ASA), ia mengemukakan bahwa pendidikan merupakan alat perubahan sosial yang berguna meningkatkan etika dan kemampuan kognitif dengan maksud untuk menciptakan manusia yang lebih baik. Pandangan Lester dipengaruhi kondisi dimana saat itu di Amerika sedang terjadi kesenjangan kelas sosial yang disebabkan oleh adanya perbedaan memperoleh kesempatan pendidikan, orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi mempunyai pekerjaan dengan upah besar sehingga mereka dapat menabung, sedangkan orang yang tidak berpendidikan bekerja dengan upah rendah, upah yang diterima hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan tidak menabung, hal inilah yang menentukan bahwa pendidikan saat itu merupakan indikator penentu antar kelas sosial, dengan memperoleh kesempatan pendidikan yang sama memungkinkan terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan berkurangnya jurang pemisah antar masyarakat. Sosiologi pendidikan muncul sebagai keharusan sejarah karena dalam masyarakat terbukti bahwa pendidikan merupakan agen perubahan sosial dan juga sebagai faktor penentu untuk menilai maju mundurnya suatu masyarakat (Adiwikarta, 2016: 15-18). Dengan pemahaman konsep seperti diatas maka sosiologi pendidikan secara langsung telah mengkaji masyarakat yang berdasar pada proses dan pola interaksi sosial, dalam kaitannya dengan pendidikan. Hubungan yang saling mempengaruhi dilihat dari bagaimana pendidikan mempengaruhi masyarakat, begitupun sebaliknya bagaimana pendidikan mempengaruhi masyarakat.

Pendekatan sosiologi pendidikan disini ditunjukkan kepada faktor pendorong Organisasi Aisyiyah dalam membawa perubahan terhadap masyarakat Kauman. Organisasi Aisyiyah menganggap bahwa pendidikan dapat mensejahterakan dan meningkatkan derajat kaum perempuan. Pendidikan yang

diperkenalkan Aisyiyah memiliki pengaruh terhadap pola pikir dan hidup masyarakat, dimana pendidikan saat itu hanya diperuntukkan untuk masyarakat kelas menengah atas serta pembelajarannya tergantung pada kurikulum Eropa dan kaum perempuan masih sedikit yang menempuh pendidikan formal ataupun agama. Pendekatan sosiologi pendidikan digunakan untuk melihat bagaimana organisasi Aisyiyah membawa perubahan bagi masyarakat khususnya kaum perempuan Kauman. Menurut peneliti pendekatan ini cocok digunakan sebagai alat untuk menganalisis pengambilan peranan Organisasi Aisyiyah dalam Bidang Pendidikan Tahun 1917-1942.

Bertolak dari pendekatan diatas, ada teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yakni menggunakan teori peran milik Soejono Soekanto. Teori peran merupakan sudut pandang terhadap kondisi yang berubah-ubah dari status seseorang (kedudukan), seseorang dapat dikatakan telah menjalankan suatu peranan apabila ia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya Di dalam lingkungan masyarakat juga harus dibedakan posisi peranan yang dimiliki oleh setiap individu (Soekanto, 2013: 212-213). Menurut Soekanto (2013: 213-214) terdapat tiga indikator dalam peranan diantaranya:

1. Dalam peranan terdapat norma-norma yang secara langsung dikaitkan dengan kedudukan atau status seseorang dalam lingkungan masyarakat. Peranan dalam hal ini berarti sebuah aturan-aturan yang menuntun seseorang dalam bermasyarakat.
2. Peranan diartikan sebuah konsep dari adanya tindakan seseorang dalam masyarakat yang nantinya disebut sebagai organisasi.
3. Peranan dalam struktur masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah perilaku yang penting dan berarti.

Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teori peran disini memiliki keterkaitan antara status atau kedudukan seseorang dalam lingkungan sosial. Seseorang yang dapat bertindak untuk suatu perubahan dalam kelompok lingkungan masyarakat tertentu merupakan dia yang memiliki posisi dan kedudukan sosial. Di posisi ini, peran seseorang atau lembaga dapat dilihat dari ketercapainnya membuat suatu perubahan yang berpengaruh dalam masyarakat.

Suatu konsep tentang tindakan seseorang dalam masyarakat nantinya disebut sebagai organisasi. Dalam penelitian ini, Organisasi Aisyiyah memiliki peran sebagai organisasi atau kelompok sosial yang membantu masyarakat dalam mencapai adanya suatu perubahan, perubahan ini dilakukan Organisasi Aisyiyah melalui tindakan dan usaha untuk memperoleh pendidikan bagi kaum perempuan dengan mendirikan lembaga pendidikan baik pendidikan keagamaan maupun pendidikan formal, mendirikan organisasi bagi pelajar perempuan, dan memperjuangkan hak perempuan mendapat pendidikan pada Kongres Wanita Indonesia.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Pengungkapan sebuah peristiwa masa lampau membutuhkan metode sejarah. Metode sejarah adalah serangkaian proses dalam mengkaji serta menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau, sehingga penulis mampu merekonstruksi kembali kejadian atau peristiwa yang telah dialami oleh manusia (Gottschalk, 2015:32-42). Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan sejarah diantaranya: (1) heuristik (pengumpulan sumber), (2) kritik (verifikasi), (3) interpretasi, dan (4) historiografi (penulisan) (Gottschalk, 2015:32-42).

1. Heuristik

Dalam metode penelitian sejarah penelitian diawali dengan pengumpulan data atau heuristik. Pada tahap pengumpulan data penulis mulai mencari dan menentukan informasi sejarah berupa sisa peninggalan sejarah ataupun data sejarah dari sumber yang berkenaan dengan penelitiannya (Sjamsudin, 1996: 67). Oleh karena penelitian ini bersifat kajian pustaka, maka penelitian dilakukan melalui berbagai sumber tertulis baik berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, majalah, koran, artikel, maupun dokumen tertulis lainnya. Pencarian tahap pertama dilakukan di perpustakaan pusat UNEJ, dengan fokus menelusuri hasil penelitian dari skripsi, disertasi dan buku yang berkaitan dengan sejarah organisasi Aisyiyah. Selain dari pengumpulan sumber studi lapang, terdapat juga penelusuran melalui internet untuk mencari jurnal, majalah dan buku-buku elektronik. Selanjutnya pada penelusuran sumber terakhir, penulis dapatkan dari koleksi pribadi penulis dan pinjaman dari koleksi kerabat.

Data dan bahan kajian yang telah diperoleh dapat dibedakan menjadi dua yakni sumber primer dan sumber sekunder. Dari penelusuran sumber yang telah penulis lakukan, penulis berhasil mendapatkan sumber primer yang diakses secara online dari website Sejarahmu.umy.ac.id dan Delpher, sumber primer yang telah didapat berbentuk dokumen tertulis yakni berupa majalah dan buku, antara lain :

- 1) Yayasan Penerbit Pers 'Aisyiyah. 1927. *Soeara 'Aisjijah : madjallah woelanan*. Djokjakarta: Moehammadijah Bg. 'Aisjijah.
- 2) *Soeara Aisjijah* Tahoen ke VI 1931
- 3) *Soeara Aisjijah* Tahoen ke VII 1932
- 4) *Congres Moehammadijah Ke 24*. 1935. Hoofdeomite Congres Moehammadijah
- 5) *Congres Moehammadijah Seperempat Abad (25)*. 1936. Hoofdeomite Congres Moehammadijah
- 6) *Congres Moehammadijah Ke 26*. 1937. Hoofdeomite Congres Moehammadijah
- 7) *Adabul Mar'ah Fil Islam*. 1982. Majlis Tarjih P.P Muhammadiyah.
- 8) *Suara Muhammadiyah*. 1986. Majalah Bulanan. No 24-66.
- 9) *Suara Muhammadiyah*. 1989. Majalah Bulanan. No 24-69.
- 10) *Suara Muhammadiyah*. 1991. Majalah Bulanan. No 10-76.

Selain sumber primer terdapat juga sumber sekunder dalam penelitian ini, diantaranya: (1) *Aisyiyah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia : Sebuah Tinjauan Awal* yang ditulis oleh Ahmad Adaby Darban (2010), buku ini secara garis besar menjelaskan mengenai sejarah pergerakan perempuan di Indonesia dan pembahasan mengenai Aisyiyah ditekankan pada partisipasi dan kontribusi dalam gerakan perempuan. (2) *Covering Aisyiyah : Dinamika Gerakan Perempuan Islam Berkemajuan Periode Awal* yang ditulis oleh Mu'arif dan Setyowati (2020), buku ini menjelaskan sejarah Organisasi Aisyiyah secara lengkap mulai dari dinamika perkembangan Aisyiyah, keterlibatan Aisyiyah dalam Kongres Perempuan, penerbitan majalah dan keberhasilannya mendirikan lembaga pendidikan taman kanak-kanak. (3) *Posisi dan Jatidiri Aisyiyah dalam Perubahan dan Perkembangan* yang ditulis oleh Ro'fah (2016), buku ini menjelaskan secara garis besar sejarah perkembangan Organisasi Aisyiyah yang dimulai pada masa awal berdirinya, hingga pada eksistensi Aisyiyah pada periode pemerintahan pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan hingga pada masa orde baru. (4) *Modernisasi Pendidikan Islam (Sejarah Perkembangan Kweekschool Moehammadijah 1923-1932* yang ditulis oleh Mu'arif (2012), buku ini menjelaskan sejarah

perkembangan salah satu lembaga pendidikan khususnya bagian puteri yang dirintis oleh Aisyiyah. (5) *Perjalanan Sejarah TK ABA di Indonesia (1919-2019)* yang ditulis oleh Suswandari dan kawan-kawan (2020), buku ini menjelaskan mengenai perkembangan lembaga pendidikan Aisyiyah yakni TK Aisyiyah Bustanul Athfal (6) *Srikandi-Srikandi Aisyiyah* yang ditulis oleh Mu'arif dan Setyowati (2014), buku ini menjelaskan mengenai tokoh-tokoh yang pernah menjadi pemimpin Aisyiyah. (7) *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia (1928-1998)* yang ditulis oleh Mutiah Amini (2021), buku ini menjelaskan mengenai eksistensi organisasi perempuan serta isu yang diangkat, diperdebatkan, dan yang diperjuangkan dalam konteks sejarah dengan aktor-aktor yang berperan dalam gerakan perempuan Indonesia. (8) *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian* yang ditulis oleh Cora Vreede-De Stuers, (2017), buku ini menjelaskan mengenai sejarah perempuan Indonesia yang dikaitkan dengan kekuatan adat yang melingkupinya.

2. Kritik

Tahap selanjutnya adalah kritik, kritik sejarah bertujuan untuk menilai kredibilitasan sebagai sumber sejarah. Kritik sumber yang dilakukan penulis dalam menentukan sumber yang digunakan mencakup dua hal, yaitu: autentisitas atau keaslian sumber dimana dikenal dengan kritik ekstern, dan kredibilitas atau keabsahan lebih dikenal dengan kritik intern (Kuntowijoyo, 2013: 77). Dalam kritik ekstern yang dilakukan penulis adalah dengan mengkaji bentuk fisik dari data yang telah diperoleh baik dari kertas, gaya penulisan, tinta, kalimat, huruf, dan bahasa yang terdapat di sumber tersebut. Dalam menerapkan kritik ekstern peneliti disini melakukan pengamatan dan analisis dari beberapa sumber yang telah diperoleh, yang disesuaikan dengan topik penelitian. Misalkan seperti beberapa sumber primer majalah, peneliti mengamati pertama dari tahun terbit majalah yang disesuaikan dengan tahun yang akan peneliti teliti, pengamatan berikutnya dilihat dari bahan kertas yang digunakan yakni kertas lama berwarna coklat sesuai dengan kertas yang beredar pada tahun tersebut, kemudian peneliti juga mengamati penggunaan tata tulis yang telah sesuai dengan tata tulisan yang berlaku pada tahun yang dijadikan penelitian, dan yang terakhir peneliti

mengamati bahasa yang digunakan dalam majalah, dimana majalah tersebut menggunakan bahasa jawa dan melayu serta pemakaian ejaan Van Ophuijsen, sehingga dalam pengamatan ini peneliti merasa kesulitan dalam membaca majalah berbahasa jawa dan harus menerjemahkan terlebih dahulu. Kemudian penulis mulai mengidentifikasi sumber-sumber mana saja yang dapat digunakan sebagai pendukung kajian yang akan diteliti.

Setelah kritik ekstern selanjutnya yakni kritik intern, pada tahap ini, penulis secara internal menilai dan meninjau sumber-sumber informasi, menentukan apakah sumber-sumber tersebut kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan keasliannya. Tujuannya ialah untuk memperoleh sumber informasi yang kredibel dengan membandingkan sumber-sumber yang diperoleh dan keandalan antara buku dan dokumen. Dalam menerapkan kritik intern peneliti disini melakukan penilaian dengan membandingkan satu sumber dengan sumber lainnya, misalnya membandingkan sumber dari majalah terbitan Suara Aisyiyah dengan sumber referensi lain yang membahas organisasi Aisyiyah. Selain itu peneliti disini melakukan perbandingan dari hasil kongres Muhammadiyah Seperempat Abad dengan majalah terbitan Drukkerij Volkslectuur, Weltevreden yang berjudul *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*, isi keduanya terdapat kesamaan dalam menyinggung masalah pemberantasan buta huruf dan pembentukan Nasyiatul Aisyiyah yang dilakukan Aisyiyah. Peneliti menemukan bahwa sumber-sumber yang telah ditemukan memiliki kesamaan dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga sumber-sumber tersebut sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Interpretasi

Tahap selanjutnya yakni interpretasi, yakni penafsiran dari fakta-fakta yang telah ditemukan. Interpretasi sering dianggap sebagai akar subjektivitas, sehingga interpretasi yang ada harus logis dan menghindari sesuatu yang bersifat subjektif. Interpretasi terdapat dua jenis yakni, analisis dan sintesis (Kuntowijoyo, 2013: 78). Analisis merupakan cara dalam memaparkan data sejarah yang mengandung beberapa kemungkinan. Sedangkan Sintesis merupakan cara dalam merangkai sumber yang telah didapat hingga menjadi fakta sejarah. Pada tahap

ini, penulis mulai menafsirkan beberapa sumber yang telah ditemukan menjadi fakta-fakta sejarah, kemudian merangkainya secara kronologis dan dapat dihubungkan dengan kajian yang akan diteliti. Dalam beberapa sumber referensi yang telah ditemukan, terdapat satu peristiwa sejarah menarik yakni pada tahun 1919 organisasi Aisyiyah berhasil mendirikan sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal, faktanya disini organisasi hanya meneruskan taman kanak-kanak yang telah dikembangkan oleh Nasyiatul Aisyiyah. Karena pada tahun 1924-1932 terjadi institusionalisasi *Froubel Kindergarten* menjadi TK Aisyiyah Busthanul Atfal, yang kepengurusannya berganti ditangan organisasi Aisyiyah. Fakta ini dibahas secara lebih rinci pada bab 5 terkait peran organisasi Aisyiyah dalam memajukan pendidikan bagi kaum perempuan. Sumber-sumber yang digunakan akan saling berkaitan dalam setiap bab, sehingga akan tersusun tulisan sejarah yang baik. Kajian dari penelitian ini terdiri dari aspek sebagai berikut: (1) Mengapa organisasi Aisyiyah memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan pada tahun 1917-1942?. (2) Bagaimana tindakan organisasi Aisyiyah dalam memajukan pendidikan bagi perempuan pada tahun 1917-1942. Dari rumusan pertanyaan ini nantinya diperoleh suatu cerita sejarah yang benar sesuai realita peristiwanya.

4. Historiografi

Tahap terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi. Pada tahap ini, penulis menyusun secara imajinatif fakta-fakta sejarah dari masa lampau yang telah melalui tahap interpretasi. Penulis mulai merangkai dan menyusun beberapa fakta sejarah yang telah ditemukan melalui sebuah karya ilmiah untuk dapat disajikan (Gottschalk, 2015: 167). Dalam penulisan sejarah seorang penulis harus dapat mengimajinasikan apa yang sedang terjadi setelah suatu peristiwa sejarah berlangsung. Proses penulisan sejarah memerlukan daya imajinasi dan kreativitas peneliti, agar tetap terkait dengan fakta-fakta sejarah dan kaidah penulisan karya ilmiah tanpa adanya tambahan-tambahan atau direka (Kuntowijoyo, 2013: 52). Pada tahapan historiografi penulis melakukan penyajian penelitian sesuai dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 6 Bab. Bagian bab 1 sampai bab 3 terdiri dari pembukaan, bab 4 dan 5 terdiri dari hasil penelitian, dan bab 6 berisi penutup.

Bab 1 adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang berupa alasan terkait penting, menarik, dan perlunya penelitian mengenai bagaimana peranan organisasi Aisyiyah dalam pendidikan kaum perempuan tahun 1917-1942. Dalam bab ini juga terdapat penegasan judul, yakni terkait penjelasan batasan masalah yang diambil. Terdapat pula ruang lingkup penelitian, peneliti menguraikan pembatasan penelitian yang terdiri dari tiga yakni spasial, temporal, dan materi. Kemudian ada rumusan masalah, terdapat dua rumusan masalah yang akan dikaji. Rumusan masalah tersebut diantaranya mengenai latar belakang organisasi Aisyiyah dalam memajukan pendidikan bagi kaum perempuan, serta menganalisis bagaimana tindakan organisasi Aisyiyah dalam memajukan pendidikan bagi perempuan pada tahun 1917-1942. Terakhir terdapat tujuan penelitian dan manfaat dari penulisan penelitian bagi berbagai pihak.

Bab 2 adalah tinjauan pustaka, yang didalamnya memuat penelitian terdahulu, kajian pendapat dari para ahli, serta pendekatan dan teori yang digunakan penulis dalam membedah objek-objek studi yang dijadikan fokus dalam penelitian ini. Pada bab ini peneliti mereview beberapa penelitian terdahulu baik yang berkaitan dengan organisasi Aisyiyah khususnya pada peranannya dalam bidang pendidikan. Peneliti disini mengulas isi dari penelitian terdahulu dan kemudian membandingkan tulisan tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Adapun pendekatan dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan sosiologi pendidikan (Lester Frank Ward) dan teori peran (Soerjono Soekanto).

Bab 3 adalah metode penelitian. Dalam bab tiga ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dan metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian sejarah. Dimana dalam metode sejarah terdapat empat langkah diantaranya yakni : heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Bab 4 berisi hasil penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang Organisasi Aisyiyah terjun dalam memajukan pendidikan bagi kaum perempuan pada tahun 1917-1942. Hal yang melatarbelakangi Organisasi Aisyiyah terjun dalam memajukan kaum perempuan berawal dari adanya

beberapa permasalahan dalam masyarakat saat itu khususnya masyarakat Kauman terutama kaum perempuan yang mengalami kesenjangan dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Berkembangnya pendidikan pada kurikulum Eropa menimbulkan ketertinggalan pengetahuan agama, serta adanya dominasi adat dan agama di masyarakat membuat kaum perempuan tidak mendapat pendidikan. Selain adanya permasalahan ini faktor pendorong Aisyiyah mengembangkan pendidikan bagi kaum perempuan adalah didorong oleh adanya kebijakan pendidikan yang hanya dikhususkan untuk kaum elit dan priyai serta munculnya politik etis yang semakin memperlihatkan kesenjangan pendidikan pada penduduk pribumi. Dari sinilah nantinya organisasi Aisyiyah bergerak memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan.

Bab 5 berisi hasil penelitian dengan bahasan mengenai tindakan organisasi Aisyiyah dalam memajukan pendidikan bagi kaum perempuan tahun 1917-1942. Dalam melihat peran serta usaha organisasi Aisyiyah memajukan pendidikan bagi kaum perempuan dapat dibuktikan dengan keberhasilan mengurus lembaga pendidikan, mengelola organisasi untuk pelajar perempuan, dan ikut serta dalam kongres wanita dengan salah satu tujuannya yakni untuk memperjuangkan pendidikan kaum perempuan.

Bab 6 adalah bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

BAB 4. LATAR BELAKANG ORGANISASI AISIYIAH MEMPERJUANGKAN PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN

Pada awal abad 19 pergerakan kaum perempuan masih terbelenggu dalam menentukan pilihan hidup dan berfokus menuntut persamaan hak. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Perempuan dan laki-laki pada hakikatnya memiliki status yang sama dalam masyarakat, namun terdapat perbedaan dari segi peran dan kedudukan di berbagai persoalan kehidupan. Perbedaan gender keduanya kemudian diperkuat dengan pandangan dari segi kajian medis, psikologi, maupun sosial. Selain itu menurut Kartini Kartono (1997: 4) ketidaksamaan fisiologis sejak lahir yang dialami laki-laki dan perempuan diperkuat dengan struktur budaya terutama oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi, dan pendidikan yang akhirnya membentuk perbedaan kedudukan dan peran antara perempuan dan laki-laki di lingkungan masyarakat.

Permasalahan yang cukup banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan yakni mengenai pendidikan kaum perempuan. Permasalahan ini mendorong berkembangnya emansipasi wanita untuk melakukan pergerakan, seperti halnya yang dilakukan R.A Kartini dalam memperjuangkan pendidikan bagi kaumnya. Tidak terkecuali, organisasi Aisyiyah yang juga melakukan pergerakan emansipasi wanita, dengan memberikan kesempatan pada kaum perempuan untuk belajar hingga menjadi orang terdidik.

Pada bab ini, penulis menguraikan berbagai bahasan yang menyangkut kondisi yang melatar belakangi organisasi Aisyiyah terjun dalam memajukan pendidikan bagi kaum perempuan, meliputi adanya dominasi adat dan agama dalam masyarakat, stratifikasi sosial, dan politik etis yang mempengaruhi kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan.

4.1 Kondisi Pendidikan Kaum Perempuan

Pada subbab ini dijelaskan mengenai kondisi pendidikan kaum perempuan dibawah kebijakan pemerintah Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda berdirinya lembaga-lembaga pendidikan hanya merupakan salah satu

wujud dari upaya pemerintah dalam memperlancar sistem politiknya. Pendidikan bukan suatu syarat utama untuk anak pribumi bersekolah, namun terbatas atas kepentingan dari pihak pemerintah Belanda menjadikan anak-anak sebagai alat politiknya (Heru, 2014: 70). Hal ini menyebabkan beberapa kebijakan pemerintah merugikan penduduk pribumi, mulai dari pendidikan yang hanya bertujuan mendapat tenaga terdidik, hingga pada ketimpangan perolehan pendidikan antara kaum elit dengan rakyat biasa dan antara laki-laki dengan perempuan. Melihat kondisi tersebut maka organisasi Aisyiyah bertindak mengatasi rendahnya pendidikan khususnya untuk kaum perempuan.

Pada masa pemerintahan kolonial perkembangan bidang pendidikan terbagi ke dalam dua periode. Periode pertama yaitu masa kekuasaan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), pendidikan telah mendapat perhatian dibuktikan dengan berdirinya sekolah-sekolah yang bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen Protestan di beberapa wilayah luar Jawa seperti Ambon, Ternate, dan lain-lain. Pendidikan di Jawa baru muncul sekitar tahun 1617, pendiriannya sudah bukan menyangkut kepentingan agama, namun pendidikan diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja kasar bagi kepentingan VOC. Periode kedua yaitu masa kekuasaan pemerintahan Belanda. Pendidikan pada periode ini bertujuan mencetak tenaga kerja terdidik untuk dijadikan tenaga kerja kelas menengah hingga dapat menciptakan elit sosial (Djumhur & Danasaputra, 1974: 115-118 dalam Heru, 2014: 23-24). Segala macam tujuan dan kebijakan politik yang ada, dibuat dan diimplementasikan hanya semata-mata untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda.

Politik pendidikan kolonial berkaitan erat dengan politik pada umumnya, yakni suatu politik yang didominasi oleh golongan yang berkuasa dan tidak didorong oleh nilai-nilai etis. Adapun ciri pokok politik pendidikan kolonial yang diterapkan di Indonesia yakni (Nasution, 2014: 5-32): (1) *gradualisme*, didefinisikan sebagai pembatasan perolehan pendidikan bagi penduduk pribumi. Hal ini dilakukan karena pemerintah tidak bersedia mengeluarkan dana untuk kepentingan pendidikan dan lebih memfokuskan pada pembangunan pabrik dan perusahaan. Selain itu, pemerintah mencegah akan adanya suatu pemberontakan

dari kaum terdidik di kemudian hari. (2) *dualisme*, yakni memisahkan sistem pendidikan khusus anak-anak Belanda dan pribumi. Pelaksanaan pendidikan keduanya berbeda dari segi kurikulum, bahasa pengantar, dan pembiayaan sehingga dapat mempertahankan keutuhan kelas sosial antara Belanda dan penduduk pribumi. (3) *control sentral yang kuat*, berkaitan dengan putusan mengenai masalah pendidikan yang hanya dapat diputuskan oleh pihak Belanda tanpa harus melibatkan orang pribumi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekuasaan Belanda dari pergeseran dan pertentangan terhadap pemerintah. (4) *keterbatasan tujuan*, yakni tujuan pendidikan terbatas pada kepentingan untuk mendapat tenaga kerja murah, perluasan pendidikan hanya ditentukan oleh kebutuhan pegawai, baik pegawai pemerintah maupun swasta. (5) *prinsip konkordinasi*, memaksakan seluruh sekolah berorientasi Barat, dengan kurikulum dan standar pendidikan sama dengan sekolah di Belanda. (6) *perencanaan pendidikan tidak sistematis*, yakni menimbulkan adanya beberapa sekolah sebagai percobaan mengikuti keadaan zaman. Sekolah-sekolah tersebut masing-masing berdiri sendiri tanpa berhubungan dengan organisasi yang sistematis antara satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya seluruh hal yang berkaitan dengan pendidikan telah diatur oleh pemerintah untuk mendukung keberhasilan tujuannya.

Prinsip pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial mula-mula hanya diperkenankan pada anak-anak pemimpin dan tokoh terkemuka. Hal ini terlihat dari cara Belanda memerintah daerah jajahannya melalui para bangsawan bumiputera, pemberian prioritas kepada anak-anak bangsawan diharapkan dapat mempertahankan status antara rakyat bawah dengan aristokrasi, karena golongan elit-lah yang bertugas memerintah bagi kepentingan Belanda (Heru, 2014: 25). Kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya kesempatan bagi anak bumiputra untuk mendapat pendidikan di sekolah Belanda.

Pendidikan bagi golongan bumiputera kemudian ada sejak dilaksanakan pendidikan bercorak liberal. Mulai saat itu, pendidikan di Hindia Belanda mengalami perluasan, tidak hanya terbatas pada bangsa Belanda saja tetapi juga untuk orang-orang pribumi. Berdasarkan Keputusan Raja Belanda No. 95 tahun 1848 mengeluarkan wewenang untuk mendirikan Sekolah Bumiputra di Pulau

Jawa dengan tujuan utama mendidik calon pegawai negeri. Pada prakteknya, pendirian sekolah-sekolah ini mengutamakan pendirian sekolah bagi anak-anak Belanda, sedangkan sekolah anak-anak pribumi di nomorduakan (Makmur., *et al.* 1993: 63-65). Sehingga pemberian pendidikan oleh pemerintah Belanda juga dinilai bersifat diskriminatif.

Pemerintah Belanda selanjutnya mulai menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah pendidikan. Berlandaskan pada Keputusan Raja yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 125 tahun 1983, Sekolah Dasar terbagi menjadi dua kategori yakni Sekolah kelas satu dan dua (Makmur., *et al.* 1993: 66). Sekolah kelas satu (5 tahun) diperuntukkan bagi anak-anak orang pribumi dan kepala desa yang berkecukupan, dan sekolah kelas dua (3 tahun) diperuntukkan bagi semua anak pribumi. Sekolah kelas dua hanya menawarkan membaca dan menulis dasar dalam bahasa lokal dan beberapa aritmatika. Menariknya, anak-anak elit pun tidak banyak diajari bahasa Belanda di sekolah kelas satu, kebanyakan membaca dan menulis dalam bahasa ibu mereka dan bahasa Melayu, serta aritmatika dan kursus seperti geografi dan sejarah Jawa. Hal ini merupakan salah satu ciri kebijakan pendidikan kolonial yang bersifat dualisme, yang membedakan antara penduduk pribumi dan Eropa. Meskipun ada peraturan tersebut, di tahun 1903 jumlah sekolah hanya ada 43 (sekolah kelas satu), 245 (sekolah kelas dua), dan 326 (sekolah swasta) untuk anak-anak pribumi (Meerkerk, 2019: 242). Pada dasarnya jumlah sekolah tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh penduduk pribumi yang berkeinginan untuk menempuh pendidikan formal.

Selain dikhususkan untuk kaum elit, kebijakan pendidikan pemerintah kolonial juga hanya terbatas untuk kaum laki-laki. Akses pendidikan bagi kaum perempuan sangat dibatasi oleh pemerintah Belanda, pemerintah menilai bahwa perempuan tidak layak untuk mendapat pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan hasil orientasi pendidikan, yang semata-mata dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja bagi Hindia Belanda. Dalam merealisasikan ini, pemerintah kolonial mengeluarkan aturan-aturan, salah satunya adalah dengan membedakan kelas sosial antara lapisan atas dan bawah (Cahyani, 2015: 41-42).

Oleh karena itu, murid pribumi sangat terbatas, sehingga tampak adanya perbedaan. Mutiah Amini (2021) mengungkapkan bahwa terdapat faktor pendorong rendahnya jumlah perempuan terdidik saat itu. *Pertama*, belum munculnya peran orang tua yang sadar akan pendidikan bagi anak-anak perempuan mereka untuk menempuh pendidikan formal, terutama dari kalangan bawah. *Kedua*, tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh para orang tua untuk menyekolahkan anak perempuannya di pendidikan formal (Amini, 2021: 17-18). Maka tidak mengherankan jika hanya kelas elite yang dapat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Belanda.

Perkembangan pendidikan untuk anak perempuan dapat dilihat sebagai cerminan keberhasilan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jumlah siswa khususnya anak perempuan telah meningkat pesat, dari 50.000 pada tahun 1892 menjadi hampir 86.000 sepuluh tahun kemudian (van Deventer 1904, 194–195 dalam Meerkerk, 2019: 242). Namun, pada perkembangannya peningkatan pendidikan untuk anak perempuan masih belum bisa dirasakan oleh seluruh penduduk pribumi. Rendahnya siswa perempuan yang menempuh pendidikan formal dapat dilihat dari jumlah siswa perempuan di HIS (*Hollands Indische School*) yakni sekolah rintisan dari Sekolah Kelas Satu, seperti di tabel berikut :

Tabel 4. 1 Siswa Pribumi di HIS (*Hollands Indische School*) 1915-1940

Tahun	Siswa Laki-laki	Siswa Perempuan	
		Jumlah	Persen (%)
1915	18.970	3.490	15,54
1925	28.722	10.195	26,20
1929-1930	29.984	11.917	28,44
1934-1935	31.231	15.492	33,16
1939-1940	34.307	19.605	36,36

Sumber : Kees, G, *Weg tot het Western. Het Nederlands voor Indie 1600-1950*, 1993: 498 dalam Amini, M. *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia 1928-1998*.

Tabel diatas menunjukkan setiap tahun jumlah siswa perempuan berbanding kecil dengan jumlah siswa laki-laki terutama pada tahun 1915 siswa laki-laki mencapai 18.970 sedangkan siswa perempuan hanya 3.490 jumlahnya. Peningkatan nyata untuk jumlah siswa perempuan baru terjadi tahun 1939-1940, dimana dalam periode ini telah banyak masyarakat yang mulai sadar akan

pentingnya pendidikan untuk anak perempuan bersekolah di sekolah formal. Kemudahan akses pendidikan juga dapat dilihat dari adanya sekolah lanjutan HIS, anak-anak perempuan dari golongan elit dan birokrat akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti ELS (*Europese Lagere School*), berikut tabel 4.2 memperlihatkan jumlah siswa laki-laki dan perempuan di sekolah ELS pada tahun 1900-1940.

Tabel 4. 2 Siswa Pribumi di ELS (*Europese Lagere School*) 1900-1940.

Tahun	Siswa Laki-laki	Siswa Perempuan	
		Jumlah	Persen (%)
1900	1.327	218	14,11
1905	3.244	508	13,54
1910	29.15	548	15,82
1915	3.339	858	20,44
1920	4.029	1.358	25,21
1925	2.932	1.424	32,69
1929-1930	2.036	1.362	40,08
1934-1935	2.063	1.698	45,15
1939-1940	2.080	1.954	48,49

Sumber : Kees, G, *Weg tot het Western. Het Nederlands voor Indie 1600-1950, 1993: 497* dalam Amini, M, *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia 1928-1998*.

Tabel diatas menunjukkan ELS mengalami hal serupa terkait jumlah siswa perempuan dengan HIS, jumlah terbanyak siswa perempuan terjadi di tahun 1939-1940, yakni dengan persentase 48,49%. Sekolah lanjutan dari ELS dapat ditempuh anak-anak pribumi seperti di HBS (*Holland Indlansche School*) atau MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). Selepas lulus dari HBS atau MULO anak perempuan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yakni sekolah kedokteran STOVIA (*School tot Opleideing van Indische Artsen*) di Batavia (Nasution, 2014: 136). Meskipun demikian, perjalanan perempuan untuk melanjutkan pendidikan masih dinilai tidak berjalan lancar, karena biaya pendidikan yang terbilang mahal dan hanya anak-anak perempuan tertentu yang mampu menempuh pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Pendidikan untuk anak perempuan dinilai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun hanya terbatas pada golongan tertentu. Peningkatan jumlah murid perempuan dari tahun 1908-1914 sebanyak 300 persen terjadi di

Jawa dan Madura, mengakibatkan kurangnya jumlah pengajar atau guru. Salah seorang anggota Volksraad yakni Sosrohadi koesoemo menjelaskan bahwa pada tahun 1917 di Jawa dan Madura hanya terdapat 15 tenaga pendidik perempuan yang memenuhi syarat dan 75 lainnya dianggap cukup berkualitas. Akan tetapi kondisi ini mulai berubah sejak tahun 1920-an, dimana dalam salah satu laporan Dinas Pendidikan tahun 1928 tercatat bahwa jumlah murid perempuan bertambah dengan persentase di masing-masing sekolah yakni, 18% di sekolah desa, 14% di sekolah khusus golongan menengah, dan 14% lainnya di sekolah lanjutan (Stuers, 2017: 90-91). Berikut adalah tabel yang diambil dari hasil laporan pemerintah tentang pendidikan pada 1928 mengenai jumlah murid yang mengikuti sekolah-sekolah pelatihan pada 1927.

Tabel 4. 3 Siswa yang mengikuti sekolah pelatihan tahun 1927

Jenis Sekolah	Jumlah Siswa	
	Laki-Laki	Perempuan
Kursus untuk guru sekolah desa	5.394	332
Sekolah pelatihan	1.938	539
Sekolah pelatihan untuk Belanda	690	144
Sekolah pelatihan tinggi	269	6
Sekolah pelatihan tinggi sesuai standar Belanda		
a) Asisten guru	39	182
b) Guru	85	293
Kursus untuk guru taman kanak-kanak	-	339

Sumber : Vreede-De Stuers, C. 2017. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*.

Laporan Dinas Pendidikan menyatakan bahwa 58% dari perempuan Indonesia telah berhasil menamatkan pendidikannya di tahun 1928. Sekolah-sekolah ini berasal dari pemerintah dan swasta. Sekolah milik pemerintah diantaranya yaitu sekolah pendidikan guru di Purworejo, Bandung, Yogyakarta, Probolinggo, Bukit Tinggi, Ungaran dan Purwokerto. Selain itu terdapat pula sekolah pelatihan pemerintah untuk perempuan dan sekolah tinggi di Salatiga. Diantara sekolah guru swasta didirikan pula oleh Katolik, Protestan, serta Aisyiyah dan Taman Siswa.

Di Yogyakarta, sebuah sekolah guru khusus untuk perempuan didirikan melalui organisasi Muhammadiyah, yaitu dengan didirikannya Madrasah

Muallimaat Muhammadiyah pada 1932. Bersama dengan Madrasah Muallimin yang khusus mendidik guru-guru laki-laki, Madrasah Muallimaat dikelola secara langsung oleh Muhammadiyah dan Aisyiyah. Pada awal pembukaannya, sekolah guru perempuan ini telah menerima beberapa siswa dari Yogyakarta, Cilacap, Banjarnegara, Temanggung, dan Purwokerto (Amini, 2020: 161-168). Dalam perkembangannya, sekolah guru perempuan ini kemudian tidak hanya mendidik calon-calon guru, tetapi juga mendidik calon-calon pemimpin putri Islam.

Hasil pendidikan ini memunculkan para kaum terdidik yang sadar akan kemajuan dan persatuan nasional. Karena, sejak awal perjuangan kaum perempuan telah menitikberatkan pada pentingnya sistem pendidikan modern (Stuers, 2017: 91). Dimana, perempuan yang mendapat kesempatan menempuh pendidikan formal, menjadi faktor pendorong untuk membina kerjasama dalam menciptakan kemakmuran bagi kaumnya.

4.2 Dominasi Adat dan Agama

Pada subbab ini dijelaskan mengenai dominasi adat dan agama, yang menjadi latar belakang kaum perempuan terhalang untuk memperoleh pendidikan. Kondisi tersebut berpengaruh pada tindakan yang diambil oleh organisasi Aisyiyah dalam mengatasi rendahnya pendidikan perempuan. Dominasi adat dan agama yang berkembang dalam masyarakat membuat kedudukan sosial kaum perempuan disepelkan. Dalam dominasi adat banyak masyarakat masih berfikir kuno dan kolot, yang menyebabkan kaum perempuan dikurung didalam rumah ketika menginjak remaja, atau dapat dikatakan sedang menjalani proses “pingitan” hingga datang calon suami untuk menikahnya. Berbeda dengan adat, dominasi agama datang dari masyarakat yang mencampuradukkan ajaran islam (*sinkretisme*) dan masyarakat penganut islam tradisional khususnya di Kampung Kauman, yang mengisolasi diri dari pengaruh luar terutama pada sekolah-sekolah Belanda.

Pemerintah kolonial pada awal abad 19 menempatkan adat sebagai sistem yang berkuasa diatas agama. Secara historis, permasalahan adat berubah menjadi lebih penting ketika pemerintah kolonial ikut andil dalam urusan adat di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam menangani umat beragama khususnya Islam,

pemerintah kolonial menunjuk Snouck Hurgronje sebagai penasehat Kantor Urusan Orang Pribumi dan Arab (*Kantoor voor Inlandsche Zaken*), ia mempelajari tentang Islam untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam menghadapi umat Islam di Hindia Belanda. Snouck membagi tiga bidang dalam menangani permasalahan Islam yakni politik, agama murni, dan sosial kemasyarakatan. Pada bidang politik, Snouck menyarankan pemerintah kolonial untuk menjalankan politik asosiasi dengan memberikan pendidikan yang bersifat ke Eropa-an. Di bidang agama murni, kebijakan pemerintah kolonial adalah mendukung umat muslim untuk melaksanakan ajarannya. Sedangkan di bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah mengambil kesempatan mendukung penuh adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat (Suminto, 1986: 12). Dari ketiga bidang tersebut pemerintah kolonial lebih mementingkan kebijakan yang berkaitan dengan adat, hal ini dikarenakan pemerintah dapat mendoktrin masyarakat agar tetap berpegang teguh pada adat dan menghambat penyebaran ajaran Islam.

Pada awal perkembangannya pemerintah kolonial memisahkan antara urusan adat dan agama di masyarakat. Adat dan agama memiliki kekuatan tersendiri bagi masyarakat, sehingga apabila disatukan maka pemerintah kolonial tidak dapat menjalankan kepentingan-kepentingan politiknya. Hukum adat merupakan sistem yang hidup dan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan hukum agama sifatnya teoritis. Namun, pada praktiknya adat dan agama sama pentingnya di dalam mengatur masyarakat, hal menarik atas adat dan agama dalam periode kolonial kemudian ditandai dengan diberlakukannya adat dan agama, sejauh hukum yang terkandung di dalamnya tidak menimbulkan konflik dengan hukum kolonial (Darban, 2010: 23-24). Pemerintah kolonial melakukan tindakan ini sebagai upaya untuk menggiring masyarakat dalam mendukung kelangsungan tujuan-tujuan kolonial.

Adat dan agama di kehidupan masyarakat dalam perjalanannya tidak dapat dipisahkan. Adat dan agama memiliki nilai tersendiri, baik adat yang dipandang sebagai kesepakatan sosial yang harus dijaga keberadaannya, maupun ketika adat dipandang sebagai suatu kebiasaan yang perlu diperdebatkan. Erat kaitannya adat

dan agama memunculkan sebuah persepsi teoritis dalam masyarakat Indonesia, yang terbagi dalam dua kelompok berdasar pada kepatuhan keduanya. Kelompok pertama adalah terdiri dari mereka yang masih menjalankan adat lama, dan kelompok kedua terdiri dari mereka yang menjalankan secara murni hukum agama, terutama islam, dan mencoba tidak mencampur adukkan dengan ajaran adat pra-islam (Darban, 2010: 21-22). Pelaksanaan keduanya bersifat kompleks, karena adat tidak hanya sering mengalami pembaharuan dari zaman ke zaman. Akan tetapi, adat juga berdampingan dengan agama, terutama agama islam yang menganut satu Tuhan dan di dalamnya terkandung ajaran untuk menghormati sesama manusia.

Kepercayaan agama dalam masyarakat Jawa menghasilkan tiga tipe utama kebudayaan yakni *abangan*, *santri*, dan *priyayi*. Tipe *abangan* dalam beragama menyatukan unsur-unsur Animisme, Hindu, dan Islam, sebuah sinkretisme yang banyak dianut oleh masyarakat pedesaan yang secara luas terkait dengan elemen petani. Sedangkan tipe *santri* dominan pada golongan Islam yang lebih murni, yang tidak begitu terkontaminasi oleh animisme atau mistisisme, namun pola keagamaannya tetap menghormati kebiasaan adat Jawa dan umumnya dihubungkan dengan elemen pedagang. Berbeda dengan tipe kedua di atas, tipe *priyayi* merupakan golongan yang berasal dari kalangan elit atau birokratik, dalam beragama golongan ini tidak menekankan unsur animistis dari sinkretisme Jawa, tetapi tidak pula menekankan unsur ajaran islam, melainkan menitikberatkan pada unsur Hinduisme (Greertz, 1981: xxviii-xxxii). Penggolongan yang didasarkan pada kebudayaan dalam masyarakat Jawa, berdampak pada pendidikan anak-anak pribumi, karena golongan *priyayi* memiliki kesempatan jauh lebih besar dalam menempuh pendidikan. Golongan ini berasal dari elit Jawa yang memiliki kedudukan atau jabatan dalam masyarakat. Sedangkan, golongan *santri* hanya mendapat pendidikan keagamaan yang diajarkan oleh para guru agama atau kyai dan golongan *abangan* termasuk dalam kategori yang sedikit mendapat pendidikan, karena masih menganut erat tradisi keupacaraan atau slametan.

Keberadaan islam campuran adat telah ada sejak era konsolidasi Mataram dan berkembang hingga zaman pemerintahan kolonial. Kerajaan Mataram islam

sebagian besar mewarisi agama dan peradaban dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Sehingga, membawa pengaruh besar dalam penyebaran agama islam di Jawa, masyarakat menerima ajaran agama islam serta mencampuradukkan dengan adat istiadat Hindu (Zamzami, 2018: 159-160). Dengan demikian, ajaran islam yang diterima oleh masyarakat bercampur dengan budaya Hindu-Jawa. Ajaran agama islam yang dianut kaum bangsawan Jawa ini cenderung bersifat sinkretis, dimana oleh Organisasi Aisyiyah dianggap sebagai ajaran agama islam yang menyimpang. Ajaran yang melekat dalam masyarakat dan juga dianggap tidak ada dalam islam yakni peribahasa yang menyatakan “*Soewargo noenoet neroko katoet, asal sadja mempehatikan kehendaknja jang laki*” (Soera Aisjijah, 1931: 46-47). Sehingga, Aisyiyah dalam mendukung kemajuan bagi kaum perempuan, menitikberatkan untuk tidak lagi mencampuradukkan ajaran islam.

Pelaksanaan adat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sangatlah kompleks. Adat tidak hanya terdiri dari satu pola, terdapat tiga jenis sistem adat yakni matrilineal, patrilineal, dan bilineal. Sistem matrilineal, secara keseluruhan kelangsungan keluarga berada di tangan perempuan. Sedangkan sistem patrilineal, seorang perempuan yang telah menikah akan mengikut keluarga suami. Sistem bilineal, ditandai dengan seorang anak akan masuk kedalam dua keluarga, keluarga istri dan suami (Stuers, 2017: 13-21). Adat dengan sistem patrilineal dan bilineal membuat kedudukan kaum perempuan lemah di hadapan masyarakat, karena tidak mempunyai wewenang untuk mengendalikan adat. Sedangkan adat dengan sistem matrilineal membuat kedudukan kaum perempuan memiliki peranan penting, karena perempuan dianggap sebagai penjaga tradisi di dalam keluarga, dan pihak laki-laki berada dibawah kedudukan perempuan. Berdasarkan karakteristik tiga sistem utama adat tersebut, terlihat jelas posisi perempuan Indonesia. Adat yang berkembang dalam masyarakat Jawa tergolong adat yang membuat terhambatnya kemajuan kaum perempuan, karena dominasi laki-laki dalam budaya patriarki.

Kedudukan perempuan pada abad 19 mendapatkan diskriminasi dalam kehidupan, terutama dibidang pendidikan dan masalah pernikahan dini. Diskriminasi ini juga didorong oleh berkembangnya adat istiadat waktu itu.

Ideologi gender juga menyebabkan dampak negatif yakni dengan terbentuknya struktur budaya patriarki. Budaya patriarki memiliki pandangan bahwa posisi perempuan lebih rendah di bawah laki-laki, sehingga muncul penolakan dari berbagai golongan sebagai bentuk gerakan sosial masyarakat yang merasa direndahkan. Masyarakat umum memandang rendah perempuan dan kedudukannya selalu di nomor duakan. Hal ini dapat dikatakan sebuah diskriminasi, diskriminasi yang banyak mendapat perhatian yaitu diskriminasi pendidikan bagi perempuan. Oleh karena itu, dalam beberapa surat R.A Kartini banyak dibahas nilai tradisi yang membelenggu perempuan, ia menempatkan bahwa biang permasalahan diskriminasi pada perempuan terletak pada sistem budaya masyarakatnya (Cahyani, 2015: 47-48). Kartini menggunakan pendidikan sebagai cara strategis untuk mengatasi masalah ini, karena pendidikan merupakan faktor yang secara nyata telah mengubah sistem nilai masyarakat, memberikan berbagai kesempatan untuk emansipasi dan pemenuhan diri perempuan. Seperti yang telah kita lihat, inisiatif strategis Kartini menghasilkan kader-kader perempuan terpelajar yang kemudian membentuk organisasi-organisasi modern.

Munculnya emansipasi mengubah pandangan kaum wanita, untuk tidak lagi menjunjung berkembangnya adat yang menghambat pendidikan. Tatanan adat dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat dinilai sebagai salah satu penghambat dari suatu kemajuan yang ingin dicapai. Sama halnya dengan Muhammadiyah, selain ingin mengembalikan ajaran islam murni, tujuan lainnya adalah membentuk masyarakat yang religius dengan cara membebaskan diri dari adat, guna beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia modern (Stuers, 2017: 85). Kalangan terpelajar pada masa kolonial terbatas pada kaum laki-laki sementara kaum perempuan belum seluruhnya dapat mengenyam pendidikan. Kondisi ini disebabkan adat istiadat yang membuat dominannya peran laki-laki dan kaum perempuan hanya ditempatkan sebagai pendamping suami dalam rumah tangga. Peningkatan derajat perempuan menjadi salah satu pokok masalah kesejahteraan umum, gerakan pendidikan kaum perempuan yang berbasis keagamaan muncul dari perkumpulan *Sapa Tresna* tahun 1914 dengan tujuan untuk mengajarkan anak-anak gadis pengetahuan agama dan umum. Hal ini

merupakan langkah awal untuk mendukung berhentinya adat istiadat yang merugikan perempuan.

Dogma patriarki yang kuat yang didukung oleh negara (melalui produk hukum), agama (melalui interpretasi ortodoks), dan masyarakat (melalui keluarga dan tradisi) berkontribusi pada langgengnya ketidaksetaraan perempuan dan kurangnya pengembangan kritis dan berbasis luas terhadap penindasan perempuan (Sumbulah, 2008: 53). Situasi ini menghambat pengembangan kapasitas perempuan untuk mengorganisir perubahan secara efektif.

Dominasi adat telah mempengaruhi terhalangnya kaum perempuan untuk dapat merasakan pendidikan. Dalam dominasi adat banyak masyarakat masih berpikiran kuno dan kolot, mereka menganggap bahwa perempuan hanya dapat melakukan 3M yaitu macak (berdandan untuk suami), masak (membuat dan menghidangkan makanan untuk keluarga), dan manak (melahirkan keturunan) (Astuti & Kistanto, 2022: 52). Sehingga muncul anggapan bahwa perempuan hanya dapat bekerja pada subordinasi dalam rumah tangga. Maka dari itu, perempuan yang telah menginjak usia remaja akan mengalami proses pingitan hingga mereka menikah. Sedangkan dominasi agama datang dari masyarakat yang tidak menjalankan ajaran islam murni, melainkan masih mencampur adukkan dengan ajaran pra-islam (*sinkretisme*) dan masyarakat agamis, yang menjalankan islam tradisional dengan berbagai kepercayaan.

Selain itu, berkembangnya adat istiadat dan kepercayaan beragama menjadi salah satu pendorong lahirnya organisasi Aisyiyah untuk memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Kepercayaan beragama yang bersifat sinkretis membuat organisasi Aisyiyah mempunyai keinginan untuk mengembalikan ajaran islam murni. Kehidupan keagamaan masyarakat Kauman dari tahun 1900 merupakan penganut ajaran islam yang bersifat sinkretis dan tradisional. Masyarakat Kauman masih melakukan upacara tradisional seperti *selamatan*, *sesajian*, *upacara labuhan*, dan *apeman*. Ajaran sinkretisme ini telah merugikan kaum perempuan, perempuan tidak mendapat pendidikan yang layak karena berkembangnya tradisi dalam masyarakat, ditambah perempuan harus menjalani proses pingitan sejak berusia 9 tahun. Selain itu, terdapat kepercayaan

islam tradisional seperti *taqlid*, *syirik*, dan *khurafat* yang membuat masyarakat mengisolasi diri dari pengaruh luar terutama Belanda, sehingga sedikit jumlah anak remaja yang bersekolah di sekolah Belanda. Adanya islam campuran di lingkungan masyarakat Kauman membuat Aisyiyah berdakwah dengan merujuk kepada ajaran Islam murni yakni Al-Qur'an khususnya dalam surah Az-Zumar 39:7, yang berarti "...Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain". Selain itu, Aisyiyah juga mengajarkan untuk kembali kepada ajaran islam murni (Ghazali, 2002: 17-18). Organisasi Aisyiyah dalam membawa perubahan terhadap kehidupan wanita juga diperlihatkan dari perannya dalam mendidik kaum perempuan dengan mengajarkan ajaran islam sesuai syariat.

4.3 Stratifikasi Sosial

Pada sub bab ini dijelaskan mengenai stratifikasi sosial, yang menjadi salah satu faktor pendorong kaum perempuan terhalang untuk memperoleh pendidikan. Stratifikasi sosial yang berkembang dalam masyarakat membuat lahirnya kelas-kelas sosial, berdasarkan atas kedudukan ataupun kekayaan yang dimiliki setiap individu. Hal ini menyebabkan masyarakat pribumi mengalami diskriminasi dalam beberapa bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Kebijakan pemerintah kolonial di bidang pendidikan menyatakan bahwa sistem persekolahan disusun berdasar pada perbedaan lapisan sosial di masyarakat. Sehingga membuat banyak anak pribumi tidak mendapat kesempatan menempuh pendidikan di sekolah. Keadaan tersebut nantinya melatarbelakangi organisasi Aisyiyah, untuk secara nyata bertindak dalam memperjuangkan pendidikan bagi anak-anak pribumi, khususnya untuk kaum perempuan.

Pada masa awal pemerintahan Belanda, keberadaan pemerintah kolonial secara tidak langsung telah membentuk sistem pelapisan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dalam masyarakat kolonial lahir dari adanya kaum penjajah dan terjajah. Hal ini dapat digolongkan menjadi dua yakni golongan penjajah yang terdiri dari penguasa dan kaum terjajah dari rakyat biasa (Rachmadanty, 2016: 20-21). Penggolongan tersebut menyebabkan hak dan kewajiban setiap golongan bersifat diskriminatif, karena golongan para penguasa cenderung dapat merasakan fasilitas lebih, baik dalam hal ekonomi, hukum, kesehatan maupun pendidikan.

Pemerintah menghendaki kehidupan masyarakat kolonial dikelompokkan berdasarkan ras, etnis, dan gendernya. Peraturan hukum ketatanegaraan Hindia Belanda *Indische Statsregeling* tahun 1927, menjelaskan stratifikasi sosial dalam masyarakat dibagi menjadi tiga golongan yakni:

- 1) golongan orang Eropa dan yang dipersamakan, golongan ini terdiri dari: a) seluruh orang Belanda dan keturunannya; b) seluruh orang Eropa termasuk didalamnya Inggris, Prancis, Portugis, dan lainnya; c) seluruh orang yang tidak masuk dalam golongan orang Eropa, namun kemudian menjadi bagian orang Eropa setelah diakui keberadaannya.
- 2) golongan orang Timur Asing, didalamnya terdiri dari orang yang bukan Eropa dan Pribumi yakni orang Cina, Arab, India serta orang-orang dalam kawasan Asia lainnya
- 3) golongan Pribumi, didalamnya terdiri dari seluruh orang yang berasal asli dari Indonesia (*inlander*) dan tidak beralih untuk masuk dalam golongan rakyat lain (Robert Van Niel, 1984 :15-43).

Berdasarkan ketiga stratifikasi sosial di atas, peraturan tersebut dibentuk untuk menentukan hak-hak istimewa masyarakat kolonial dalam menjalankan hak dan kewajiban, pemerintah kolonial memberikan nilai pembeda berdasar pada ras, kesukuan, yuridiksi, nilai politik, dan nilai ekonomi di tanah jajahan.

Stratifikasi sosial juga terjadi di kalangan penduduk pribumi, khususnya seperti di daerah Jawa dan Sunda. Sistem stratifikasi sosial di daerah Jawa dan Sunda membedakan penduduk dalam kelas-kelas bertingkat, berdasar pada status sosial yang terdiri dari kelas atas, menengah, dan bawah. Kelas atas terdiri dari bangsawan dan kerabat kerajaan yang tergolong dalam lapisan sosial sistem tertutup, karena golongan ini membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya secara vertikal. Golongan lapisan atas biasanya terbagi lagi dalam berbagai tingkatan gelar sesuai kedekatan dengan para raja yang bersifat turun temurun hingga akhir abad ke 19. Golongan dengan kedudukan tertentu dalam masyarakat disebut sebagai *Priyayi* atau elit di Jawa dan *Menak* di Sunda. Kelas menengah terdiri dari para pembisnis, petani-petani kaya, dan pegawai pemerintahan. Adapun lapisan bawah, yang dikenal dengan

golongan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa-desa sebagai buruh tani dan perkebunan maupun berada di pinggiran kota dengan bekerja sebagai buruh kecil (Robert Van Niel, 1984: 30-32; Nina, H. Lubis, 1998: 2). Berdasarkan stratifikasi sosial ini, dapat dilihat bahwa pelapisan dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, akan tetapi juga berkembang di lingkungan penduduk pribumi.

Pengelompokan yang berkembang dalam masyarakat kolonial, kemudian menjadi tersusun secara bertingkat dan beragam pula. Pembagian tingkatan tersebut secara umum disusun berdasarkan atas simbol kekayaan dan kekuasaan (Darban, 2010: 28). Oleh sebab itu, keberadaan orang Eropa dan Indonesia yang mempunyai kedudukan menjadi pemimpin, dianggap sebagai kasta tertinggi dalam strata sosial masyarakat. Tingkatan berikutnya adalah mereka yang menduduki jabatan sebagai pekerja pemerintahan, dan orang-orang pribumi yang menjalankan kegiatan bisnis, dimana pada abad ke 19 lebih condong pada budaya islam yang mengkategorikan strata tersendiri yakni *abangan*, *santri*, dan khususnya *priyayi*, dengan tujuan untuk mendapatkan kekuatan secara ekonomi maupun sosial. Posisi paling bawah kemudian disusul dengan para pekerja buruh yang hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari (Greertz, 1981: xxxi). Namun seiring berkembangnya waktu, stratifikasi sosial dalam masyarakat berangsur mengalami perubahan akibat adanya pengaruh dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Stratifikasi sosial ini menyebabkan keinginan untuk menaikkan status sosial masyarakat kolonial, yang dilakukan dengan berbagai cara. Cara pertama, menaikkan status sosial dengan perkawinan dari kelas atas, khususnya para priyayi yang menduduki jabatan pemerintahan, mereka akan menikahkan anak-anak mereka dengan anak para pejabat lain ataupun dengan anak keturunan para bangsawan. Dengan pernikahan ini mereka akan bisa mempertahankan atau bahkan menguatkan posisi status sosial mereka. Oleh karena itu, Elsbeth Locher-Scholten menyebutkan bahwa hal tersebut sejalan dengan norma-norma tradisional masyarakat Indonesia dan Jawa, di mana menikah dianggap sebagai satu-satunya status sosial yang pantas dalam kehidupan, terutama bagi perempuan,

dan pernikahan secara tradisional menyiratkan ikatan sosial dan politik keluarga. Cara lain menaikkan status sosial adalah dengan pengabdian atau magang pada suatu keluarga yang kedudukannya lebih tinggi. Di dalam pengabdian seorang anak laki-laki akan melakukan pekerjaan seperti pelayan, bertujuan agar para anak dapat belajar sendiri mengenai kesulitan yang dihadapi oleh orang dengan kedudukan rendah. Selain itu, para anak-anak juga akan belajar dengan mengamati seluk beluk tata krama di lingkungan keluarga dengan status sosial yang lebih tinggi (Darban, 2010: 29-30; Scholten, L. E. 2003: 49). Sistem magang ini hanya diberikan pada laki-laki, karena konstruksi sosial yang terbentuk dari sistem magang adalah untuk memperkenalkan dunia kerja di pemerintahan, sehingga kaum perempuan tidak mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Stratifikasi sosial yang berkembang dalam masyarakat tidak hanya membedakan peranan dan kedudukan dalam kehidupan sehari-hari, namun juga merebak pada kondisi pendidikan. Kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang pendidikan tidak terlepas dari politik kolonialnya. Adapun prinsip pendidikan yang diselenggarakan:

- a. pemerintah tidak memihak salah satu agama tertentu
- b. pemerintah mendidik dengan tujuan agar para anak dapat secara mandiri mencari penghidupan atau pekerjaan demi kepentingan kolonial
- c. sistem persekolahan disusun berdasar pada perbedaan lapisan sosial di masyarakat, khususnya di Pulau Jawa
- d. pendidikan umumnya diarahkan untuk melahirkan golongan elit sosial, guna menjadi alat bagi kepentingan politik dan ekonomi Belanda di Indonesia (Depdikbud, 1985: 56 dalam Heru, 2014).

Secara umum, sistem pendidikan, dan sekolah pada khususnya, membagi kelompok-kelompok penduduk berdasarkan keturunan atau kelas sosial dan tingkat kebangsaan mereka pada saat itu. Akibatnya, hanya anak-anak dari para pemimpin dan orang-orang terkemuka yang diizinkan bersekolah di sekolah-sekolah Barat untuk belajar tentang pengetahuan Barat.

Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan sistem pendidikan, salah satunya dengan membatasi hanya kalangan elit dan khusus kaum laki-laki yang dapat bersekolah. Pendidikan untuk kaum perempuan sangat dibatasi, hal ini karena pemerintah menganggap kaum perempuan tidak selayaknya mendapat pendidikan, pendidikan pemerintah kolonial dirancang hanya untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja yang diambil dari kaum laki-laki (Cahyani, 2015: 40). Partisipasi kaum perempuan dalam bidang pendidikan era kolonial, masih tergolong berada dibawah kaum laki-laki.

Keterbatasan akses pendidikan bagi kaum perempuan, tidak menghalangi perempuan golongan atas atau ningrat untuk tetap belajar dan memperjuangkan pendidikan kaumnya. Para perempuan gerakan feminis seperti R. A Kartini dan Abdoerachman, juga tidak mendapat akses pendidikan di sekolah formal. Namun, karena keduanya berasal dari keluarga ningrat atau birokrat, maka masih memperoleh pendidikan di lingkungan keluarga, seperti, belajar mengaji, memahami legenda-legenda Jawa, belajar bahasa dan aksara Jawa kuno (Zuhriyah, 2018: 253; Stuers, 2017: 78-79). Kehidupan yang dijalani perempuan bangsawan atau kalangan atas sedikit berbeda dengan perempuan-perempuan dari kelas sosial di bawahnya, terdapat empat kelas golongan Perempuan:

- a. golongan rendah atau miskin, terdiri dari perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan
- b. golongan menengah atau cukup mampu, terdiri dari perempuan yang juga tidak bersekolah, namun mereka dapat belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah
- c. golongan santri, terdiri dari perempuan yang tidak bersekolah, namun mendapat pendidikan agama di rumah
- d. golongan priyayi atau bangsawan, terdiri dari beberapa perempuan yang belajar di bangku persekolahan. Golongan ini, sejak usia 12 tahun telah mengalami proses pingitan, tanpa melakukan pekerjaan rumah karena telah memiliki banyak pembantu dan akan menikah memasuki usia 15 tahun (Stuers, 2017: 63).

Kegiatan yang dilakukan oleh kalangan ningrat atau birokrat ini, memungkinkan berkembangnya pendidikan kaum perempuan di kemudian hari, karena dari kelas mereka pengetahuan tentang kemajuan bagi kaumnya tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kelas sosial lain.

Peran para perempuan kalangan atas atau ningrat, dalam memperjuangkan dan mewujudkan emansipasi perempuan terlihat dari terbentuknya beberapa organisasi perempuan. Organisasi perempuan pertama yang memperjuangkan pendidikan perempuan yakni Putri Mardika 1912, organisasi ini bertujuan memberi bantuan dana kepada kaum perempuan agar dapat bersekolah. Sekitar periode yang sama, organisasi Keutamaan Istri dibentuk, yang berhasil mendirikan empat sekolah perempuan di tanah Sunda. Selain dua organisasi tersebut telah berdiri pula organisasi perempuan lain yang berada di Jawa diantaranya Pawijatan Wanito 1915, Wanito Hado 1915, dan Wanito Susilo 1918. Beberapa organisasi perempuan ini antara tahun 1912-1915 masih bersifat sosial, seluruh kegiatan bertujuan untuk meningkatkan martabat perempuan dengan memberikan pendidikan di rumah, menjahit, kelas pengasuhan anak, dan lain-lain (Stuers, 2017: 80-81). Organisasi-organisasi ini telah membuka kesempatan kepada perempuan bangsawan atau kalangan atas dan menengah untuk dapat bertemu dengan teman-teman se-kaumnya yang berasal dari kelas bawah, dari adanya interaksi ini maka lahirlah perjuangan bersama-sama untuk emansipasi perempuan.

Selain organisasi-organisasi independen tersebut, terdapat pula beberapa organisasi yang berbasis agama. Organisasi agama yang paling penting adalah Muhammadiyah, aktivitas pertamanya berkaitan dengan tabligh yang diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan perempuan. Perhatian pendiri Muhammadiyah dalam menangani masalah perempuan ditunjukkan dengan lahirnya organisasi Aisyiyah (Darban, 2010: 115). Organisasi Aisyiyah telah ada sejak tahun 1917, namun jauh sebelum berdirinya Aisyiyah, K.H Ahmad Dahlan dan Siti Walidah telah menangani masalah perempuan melalui perkumpulan *Sapa Tresna* dari tahun 1914. Perkumpulan ini didirikan untuk meningkatkan kapasitas

perempuan dengan belajar menulis, mengaji, dan membaca mengenai pembelajaran agama.

Perhatian organisasi Aisyiyah terhadap pendidikan kaum perempuan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada setiap kalangan untuk ikut serta dalam perkumpulan pengajian. Dalam melakukan usahanya terkait dengan pendidikan, organisasi Aisyiyah memulai kegiatannya dari kelompok pengajian yang dikhususkan bagi anak-anak gadis dan para buruh perempuan, yang berkerja di banyak industri rumahan batik di sekitar Kampung Kauman (Ro'fah, 2016: 29). Tidak diperkenankannya mengabaikan dan menyepelkan perempuan dalam ajaran agama Islam, membuat organisasi Aisyiyah mendirikan kelompok pengajian wanita tanpa melihat status sosial setiap anggotanya. Mengingat pada masa kolonial pendidikan kaum perempuan hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi independen sebelumnya yang mewakili kelas atas atau priyayi, organisasi Aisyiyah ini lebih mewakili kelas menengah dan merupakan simbol kebangkitan kelas menengah ke bawah (Stuers, 2017: 87; Ro'fah, 2016: 36). Namun, meski demikian organisasi Aisyiyah terbuka bagi semua kalangan, dimana anggotanya tidak hanya terdiri dari para gadis-gadis kalangan menengah. Akan tetapi juga terdapat anggotanya yang berasal dari golongan bawah seperti para buruh batik di Kampung Kauman.

Lahirnya gerakan kebangkitan memberikan ruang yang luas bagi perempuan, khususnya Aisyiyah. Dalam buku berjudul "*La politique musulmane et coloniale des Pays-Bas*" Georges. H. Bousquet (1939: IV) menjelaskan bahwa gerakan perempuan Muslim melahirkan semangat religius yang muncul dalam diri perempuan Indonesia, terutama di kalangan menengah ke bawah. Salah satu bukti dari semangat religius ini adalah banyaknya masjid atau musala yang dibangun khusus untuk perempuan Muslim. Tidak terkecuali Organisasi Aisyiyah yang pada tahun 1920, di Yogyakarta dengan dukungan K.H Ahmad Dahlan, berdiri sebuah masulla yang dikhususkan untuk kaum perempuan, masjid ini dikenal dengan nama musola Aisyiyah (Stuers, 2017: 87). Pada dasarnya musalla ini didirikan sebagai wadah bagi kaum perempuan Kauman untuk memperluas

pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Karena sejak awal berdirinya, Aisyiyah telah menyediakan akses pendidikan untuk semua perempuan, dengan tujuan untuk mengangkat perempuan dari kemiskinan dan kebodohan.

4.4 Politik Etis

Pada subbab ini dijelaskan mengenai politik etis, khususnya dalam bidang pendidikan, dimana politik etis ini semakin memperlihatkan ketimpangan perolehan pendidikan antara kaum laki-laki dan perempuan. Politik etis yang berkembang dalam masyarakat melahirkan sekolah-sekolah yang di khususkan bagi laki-laki, karena motif pendidikan kolonial bertujuan guna memperoleh tenaga kerja terdidik dan murah yang akan dipekerjakan oleh pemerintah kolonial. Kondisi tersebut melatarbelakangi organisasi Aisyiyah, bertindak dalam memperjuangkan pendidikan bagi anak-anak perempuan pribumi, agar memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki.

Pada tahun 1840-an paham liberalisme dan revolusi demokrasi di Eropa mempengaruhi kondisi politik Belanda. Rudolf Torbeke sebagai pemimpin Partai Liberal Belanda berhasil mengubah sistem politik pemerintahan (Abdullah, 2017: 35). Aturan mengenai ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Negara Belanda mengalami perubahan pada tahun 1848, dengan mengakui raja atau ratu sebagai kepala Negara. Perubahan ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, seperti paham liberalisme yang menghendaki kebebasan seseorang, pengakuan hak milik pribadi, dan perluasan perusahaan swasta. Selain Negara Belanda, hal tersebut juga menyebabkan perubahan politik di Negara koloni Belanda di Asia khususnya Hindia Belanda.

Liberalisme dibidang ekonomi menimbulkan kesenjangan di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial memberlakukan paham liberalisme dengan mengutamakan perekonomian dalam masyarakat. Pada tahun 1870 kebijakan ekonomi di Hindia Belanda mengalami perkembangan setelah dikeluarkan UU Agraria dan UU Gula yang membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk mengeksploitasi kekayaan alam (Furnivall, 2009: 187-189). Keberadaan perusahaan-perusahaan swasta mengubah arah kebijakan pemerintah kolonial (Ricklefs, 2011: 227). Kebijakan yang secara sah telah diterapkan dinilai mampu

memberi keuntungan bagi semua pihak. Namun faktanya, liberalisme ini menyebabkan kesenjangan ekonomi di antara penduduk pribumi dan para pengusaha, karena pihak yang paling diuntungkan dari kebijakan ini adalah orang-orang Belanda dan Tionghoa. Selain itu, kondisi sosial ekonomi kaum bumiputera diperburuk dengan tidak adanya penyatuan ekonomi dari pemerintah kolonial (Furnivall, 2009: 236). Kemunduran yang secara nyata dialami oleh penduduk pribumi mendorong lahirnya sebuah kebijakan baru di Hindia Belanda.

Kondisi tersebut menarik perhatian sejumlah tokoh penting dalam pemerintahan politik Belanda. Kemunculan para tokoh membahas terkait isu-isu politik dan ekonomi disampaikan secara luas dalam surat kabar. Perbaikan kondisi kaum pribumi di Hindia Belanda merupakan bahasan yang paling sering diperbincangkan (Simbolon, 2006: 168). A. Kuyper dan Piet Brooshoft mengusulkan suatu kebijakan kemanusiaan dan otonomi lokal sebagai salah satu cara memperbaiki kondisi penduduk pribumi. Namun usulan keduanya tidak ada tindak lanjut, usulan baru ditanggapi sejak Conrad Theodor van Deventer selaku anggota Partai Demokrat Liberal di Belanda, menulis artikel dengan judul *Een Eereschuld* atau Hutang Budi di jurnal *De Gids*. Dalam artikelnya ia berpendapat bahwa Belanda harus menjalankan kewajiban balas budi terhadap kaum pribumi, karena pihak koloni dinilai telah menguras kekayaan ekonomi pada era sebelumnya (Robert van Niel. 1984: 20). Usulan ini mempengaruhi kebijakan kerajaan Belanda untuk segera merealisasikan politik etis di Hindia Belanda.

Keberhasilan pemerintahan di kerajaan Belanda turut mendukung terlaksananya politik etis di Hindia Belanda. Wilhelmina selaku ratu Belanda yang dinobatkan pada 6 September 1898, mendukung secara penuh gagasan-gagasan para kelompok etis untuk melakukan perubahan kebijakan di negara jajahannya (Simbolon, 2006: 191). Kondisi ini membuka peluang besar terealisasinya politik etis. Perubahan kebijakan terlaksana secara nyata, tepat pada bulan September 1901 ketika Ratu Wilhelmina berpidato dan menyampaikan terkait politik etis, dimana dinyatakan: "*Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan serta perkembangan sosial dan otonomi bagi penduduk Hindia*". Berdasarkan pidato kenegaraan ini kemudian ditindaklanjuti dengan langkah-

langkah strategis di tiga bidang yakni, membangun irigasi (*Irigate*), menyelenggarakan emigrasi (*Emigrate*), dan memberikan pendidikan (*Educate*) (Soemanto & Soeyarno, 1983: 46). Kemajuan yang akan di dapat dari politik etis oleh bumiputera nyatanya masih bernaung di bawah penjajahan Belanda.

Ketiga program politik etis yakni irigasi, emigrasi dan pendidikan memiliki tujuan tersendiri. Irigasi bertujuan untuk dapat meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan, menganjurkan transmigrasi dengan tujuan pemerataan penduduk yang terlampau padat jumlahnya di Jawa dan Madura, dan pemberian pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia dan memberantas buta huruf (Oktavinuri, 2018: 8-9). Dalam politik etis, pendidikan (*Educate*) merupakan program yang sering dianggap paling utama (Latif, 2012: 142). Karena, sistem pendidikan yang diselenggarakan didorong untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial dalam merekrut pegawai rendahan. Sehingga dapat dikatakan, kebijakan ini berfokus pada modernisasi masyarakat Hindia Belanda.

Pendirian sekolah merupakan implementasi program pendidikan (*Educate*) dari Politik Etis. Dalam menata pendidikan bagi pribumi, pemerintah kolonial mengeluarkan *Indische Staatsblad van Nederlandsch Indie* Tahun 1893 No 125 yang menetapkan terbaginya sekolah pribumi menjadi dua golongan yakni, sekolah dasar kelas satu dan sekolah dasar kelas dua (*Staatsblad van Nederlandsch Indie* No 129 Tahun 1893 dalam Rachmadanty, 2016: 30). Lembaga pendidikan yang didirikan pemerintah kolonial menyebabkan terlihatnya ketidakmerataan pendidikan bagi golongan bumiputera, hal ini terlihat dari adanya sekolah yang terbagi berdasarkan kedudukannya. Sekolah kelas satu dikhususkan keluarga priyayi dan sekolah kelas dua untuk anak dari kalangan masyarakat biasa, namun seiring berjalannya waktu pemerintah kolonial akhirnya memikirkan wadah pendidikan bagi anak-anak bumiputera yang belum menempuh pendidikan, dengan cara mendirikan sekolah *Hollandsche Indisce School* sebagai pengganti sekolah kelas satu dan sekolah desa sebagai pengganti sekolah kelas dua (Nasution, 2016: 256-257). Sistem pendidikan yang dibentuk pemerintah ini masih mengikuti stratifikasi kolonial, dengan membagi kelas tinggi dan rendah di

masyarakat. Namun, sekolah kolonial merupakan salah satu kemajuan bagi kaum bumiputera dalam memperoleh pendidikan, meskipun politik etis tidak sepenuhnya berhasil dalam pelaksanaannya.

Kemunculan institusi pendidikan telah menyebabkan perlombaan untuk meningkatkan tingkat intelektual bangsa Indonesia. Politik etis telah memunculkan kelas sosial baru dalam masyarakat (Abdullah, 2017: 41). Kelas sosial baru ini ialah kaum Bumiputera yang memiliki akses terhadap pendidikan colonial atau dikenal dengan nama kaum Bumiputera terpelajar (Pols, 2019: 27 dalam Fachrurozi, 2019: 21). Dewantara (1962: 54) dalam bukunya yang berjudul "*Karja Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*" menegaskan bahwa pengajaran dan intelektualisme Barat telah melahirkan kelas terpelajar yang dapat menginspirasi kaum muda Indonesia untuk melakukan suatu gerakan. Kesadaran nasional mendorong munculnya gerakan bersifat politik atau sosial-budaya oleh kaum terpelajar.

Pergerakan perempuan tumbuh sebagai bagian yang tak terpisahkan, dari pertumbuhan kesadaran nasionalisme oleh kaum terpelajar. Gerakan kaum perempuan berawal dari didirikannya organisasi Poetri Mardika oleh Budi Utomo, yang memberikan perhatian terhadap kehidupan kaum perempuan dalam bidang pendidikan. Keputusan ini juga mempengaruhi K.H Ahmad Dahlan, yang dulunya merupakan anggota Budi Utomo, untuk mengambil langkah yang sama dalam mendirikan organisasi Aisyiyah pada 1917, dengan tujuan untuk memperjuangkan masalah-masalah perempuan (Lestari, 2019: 26). Aisyiyah dan organisasi nasionalis lainnya seperti Poetri Mardika sama-sama memfokuskan perjuangan mereka pada tuntutan terhadap pendidikan bagi perempuan (Ro'fah, 2016: 32). Oleh karena itu, gagasan kemajuan kaum bumiputera terpelajar berpengaruh terhadap pemikiran mengenai pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan.

Kelahiran golongan terpelajar merupakan hasil dari kebijakan politik etis dan pendidikan kolonial Belanda di Indonesia. K.H Ahmad Dahlan termasuk golongan terpelajar yang lahir dari pelaksanaan pendidikan politik etis Belanda, Ia juga menganjurkan agar kaum perempuan Kauman disekolahkan baik ke sekolah umum ataupun ke sekolah agama. Pada 1913, ada tiga anak gadis dari Ibtidaiyah

Diniyah Islamiyah (cikal bakal *Sapa Tresna* dan Aisyiyah) yang disekolahkan ke sekolah umum, yakni Siti Wadingah, Siti Dawimah dan Siti Barijah, ketiganya bersekolah di *Neutraal Meisjes School* di Ngupasan. Kemudian ada dua anak gadis yang disekolahkan di sekolah agama, ialah Siti Umnijah dan Siti Mundjiah (Darban, 2010: 54). Pembaharuan pendidikan kaum perempuan Kauman, yang diprakarsai oleh K.H. Ahmad Dahlan merupakan dampak dari perkembangan politik etis yang ada.

Beberapa gadis yang telah dianjurkan bersekolah di sekolah umum merupakan salah satu bentuk melahirkan kader Aisyiyah yang berilmu. Karena, meningkatkan derajat kaum perempuan tidak hanya dengan membekali peserta perkumpulan pengajian dengan ilmu agama, melainkan harus ditingkatkan dengan pendidikan umum (Suara Muhammadiyah, No 7/66 tahun 1986: 12). Oleh karena itu, adanya kader yang dipersiapkan berguna untuk mengembangkan peran organisasi Aisyiyah dalam memberi pendidikan bagi kaum perempuan. Pendidikan yang disediakan oleh organisasi Aisyiyah secara bertahap menjadi alternatif bagi orang tua yang tidak dapat menyekolahkan anak perempuannya di sekolah umum (yang tidak menerima anak perempuan) atau di sekolah-sekolah Eropa (yang hanya menerima anak orang Belanda atau priyayi). Salah satu kepedulian organisasi Aisyiyah terhadap perempuan ialah memperkenalkan pandangan Islam bahwa perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki dalam hal agama dan sosial (Ro'fah, 2016: 31). Mengingat pendidikan pada masa politik etis terbatas pada kaum laki-laki dan hanya bisa dirasakan oleh golongan elit atau priyayi. Maka hal tersebut mendorong organisasi Aisyiyah untuk turut serta memberikan pendidikan bagi anak-anak pribumi (perempuan) yang masih belum mengenyam pendidikan formal.

BAB. 5 PERANAN ORGANISASI AISYIYAH DALAM MEMAJUKAN PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN PADA TAHUN 1917-1942

Pada akhir abad ke 19 politik etis pemerintah Belanda, telah melahirkan kaum terdidik yang membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat kolonial. Tonggak awal kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908, yang juga mendorong kaum perempuan intelektual untuk memprakarsai adanya suatu perkumpulan. Kemunculan gerakan perempuan di Indonesia menghendaki perubahan dengan cara bergabung menjadi satu kekuatan dalam organisasi. Salah satu organisasi yang terbentuk adalah Organisasi Aisyiyah, sebagai organisasi Islam perempuan pertama, organisasi Aisyiyah berupaya dalam meningkatkan derajat kaum perempuan muslim. Tujuan utama organisasi Aisyiyah yakni untuk menumbuhkan kesadaran kaum perempuan terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar. Sejalan dengan itu, maka salah satu cara yang ditempuh Aisyiyah adalah melalui pendidikan. Pada bab ini, penulis menguraikan berbagai tindakan yang dilakukan Organisasi Aisyiyah untuk memajukan pendidikan bagi kaum perempuan, meliputi merintis dan mengurus lembaga pendidikan, mendirikan organisasi pelajar perempuan dan terlibat dalam kongres perempuan pertama tahun 1928.

5.1 Sejarah Berdirinya Organisasi Aisyiyah

Pada subbab ini dijelaskan mengenai sejarah berdirinya organisasi Aisyiyah. Secara umum lahirnya organisasi Aisyiyah berkaitan dengan berdirinya Muhammadiyah. Dominasi politik Hindia Belanda telah mempengaruhi K.H Ahmad Dahlan untuk mendirikan kedua organisasi ini (Yuliawati, 2005: 20). Mengingat pada akhir abad 19 dikenal sebagai abad imperialis dan juga masa keemasan bagi negara yang berorientasi membentuk kekaisaran di tanah jajahan.

Keinginan Belanda menguasai nusantara menyebabkan kebijakan politik pribumi harus menganut pemerintah kolonial, yang berasal dari negeri asalnya yakni Belanda. Snouck Hurgronje selaku penasehat urusan pribumi dan Arab, menganggap politik Islam saat itu harus dihindari dan dilarang, karena aktivitas

politik akan menyebabkan lemahnya kekuasaan kolonialisme atau bahkan mendorong umat Islam ke arah fanatisme. Keadaan serupa juga terjadi di negeri Belanda, persaingan antara partai politik yang memperhatikan agama dan non agama menjadi masalah pemerintah (Suminto, 1986: 8-20). Kondisi tersebut merupakan strategi politik untuk mengiring masyarakat pribumi patuh terhadap kekuasaan penjajah.

Sejalan dengan itu, konsep *divide et impera* telah diimplementasikan oleh pemerintah kolonial. Untuk meredakan kekuatan Islam pemerintah memanfaatkan kelompok elit priyayi dan abangan karena cenderung tidak memperhatikan “kekafiran” orang barat dan mudah diajak kerjasama. Keberhasilan konsep ini juga didukung dengan politik asosiasi melalui jalur pendidikan. Pemberian kesempatan mengenyam pendidikan barat bagi penduduk pribumi, dinilai mampu menjauhkan dari sistem dan ajaran Islam. Namun, para bangsawan bumi putra yang menempuh pendidikan barat, pada perkembangannya telah mampu membangkitkan semangat modernisasi dikalangan kelompok santri. Dari kelompok inilah K.H Ahmad Dahlan memelopori gerakan Muhammadiyah tahun 1912 dan Aisyiyah tahun 1914 (Ernas, 2019: 135; Yuliawati, 2005: 23-24). Upaya memodernisasikan cara hidup dan berpikir sesuai ajaran Islam menjadi faktor pendorong lahirnya organisasi tersebut.

Pemerintah kolonial bersikap moderat terhadap lahirnya organisasi Aisyiyah dibanding dengan organisasi Islam lainnya. Karena, organisasi Aisyiyah sendiri lebih memfokuskan pergerakannya pada ranah sosial, agama, dan pendidikan. Pemerintah kolonial mendukung keberadaan organisasi Aisyiyah dengan memberikan ijin untuk mengembangkan hingga ke luar wilayah Yogyakarta (Yuliawati, 2005: 24). Pemerintah kolonial tidak menganggap organisasi Aisyiyah sebagai ancaman, sebab bukan merupakan organisasi Islam yang bersifat politik.

Sejak Muhammadiyah berdiri tahun 1912, K.H Ahmad Dahlan telah menaruh perhatian terhadap permasalahan kaum perempuan. Pentingnya pendidikan menjadi fokus utama untuk memperbaiki derajat kaum wanita. Ia dengan bantuan sang istri yakni Siti Walidah, membuka kelas untuk anak-anak

perempuan Kauman. Pada perkembangannya kelas ini bukan hanya sebagai tempat *cursus* baca Al-Quran melainkan berubah menjadi asrama putri, meskipun anggotanya berasal dari saudara dan teman-teman K.H Ahmad Dahlan akan tetapi terdapat 5 anggota yang terdaftar seperti Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Wadingah dan Siti Busyro. Untuk merealisasikan lahirnya perempuan-perempuan terdidik kemudian dibentuklah perkumpulan pengajian *Sapa Tresna* dengan tujuan agar para perempuan terdorong mempelajari ajaran Islam ataupun kegiatan membaca dan menulis. Selain membaca Al-Qur'an kegiatan perkumpulan ini juga diisi dengan pengajian, berdakwah, serta keterampilan menjahit (Ro'fah, 2016: 28-30). Perkumpulan pengajian *Sapa Tresna* inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Organisasi Aisyiyah.

Sapa Tresna yang telah berkembang, tidak hanya memperhatikan terkait pembelajaran. Akan tetapi juga mengutamakan akhlak dan perilaku, program pertamanya yakni menyerukan untuk menutup kepala dengan sorban berwarna putih (*dapat dilihat pada lampiran 2*) (Mul Khan, 1990:79 dalam Seniwati & Lestari, 2019: 224). Sebelumnya di Kauman hanya orang-orang yang telah berhijrah yang memakai penutup kepala. Dalam pengajian *Sapa Tresna* pemberian pendidikan agama tidak sekedar membaca dan menghafal, akan tetapi langsung ditujukan untuk menganalisis kandungan sebuah ayat Al-Qur'an, yang kemudian dihubungkan dengan fenomena sosial di sekitar Kauman (Mu'arif & Setyowati, 2020: 49-50). Kondisi tersebut menambah ketertarikan semua kalangan perempuan Kauman, dari yang muda maupun tua terhadap pengajian *Sapa Tresna*.

Pengusulan untuk mendirikan organisasi Aisyiyah bermula dari nasehat Haji Mochtar yakni salah satu tokoh pengurus Muhammadiyah. *Sapa Tresna* dan asrama putri yang telah didirikan K.H Ahmad Dahlan berkembang pesat, hingga membuat munculnya pemikiran H Mochtar untuk merubah menjadi sebuah organisasi yang lebih mapan (Ro'fah, 2016: 30). Sumber lain menyebutkan bahwa perempuan-perempuan yang bergabung dalam pengajian *Sapa Tresna* hingga tahun 1917, telah melahirkan kader dengan kemampuan cakap di ranah kepemimpinan (Darban, 2010: 53). Sehingga hal ini mendorong Hoofdbestuur

Muhammadiyah mengadakan musyawarah untuk membentuk Bahagian Aisyiyah. Pertemuan tersebut dihadiri beberapa anggota Muhammadiyah diantaranya K.H Ahmad Dahlan, H. Mochtar, H. Fachroedin, dan Ki Bagus Hadikusuma. Musyawarah mengikutkan beberapa anggota pengajian *Sapa Tresna* seperti Siti Wadingah, Siti Dalalah, Siti Dawimah, Siti Badilah, dan Siti Busyro (Mu'arif & Setyowati, 2020: 50). Usulan ditujukan untuk membentuk organisasi yang secara khusus membina para kaum perempuan.

Terdapat beberapa usulan nama untuk perkumpulan pengajian yang akan di bentuk. Namun, dalam musyawarah antara anggota Muhammadiyah dan anggota *Sapa Tresna*, disepakati untuk menggunakan nama Aisyiyah. Usulan nama tersebut berasal dari K.H Fachroedin, penamaan ini dinisbatkan kepada Aisyah R.A atas dasar agar organisasi Aisyiyah dapat meneladani perjuangan istri Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pembaharuan ajaran Islam (Ghazali, 2002: 20-21). Pertemuan inilah yang menandai terbentuknya Muhammadiyah Bagian Istri yang akhirnya dikenal dengan nama Aisyiyah.

Pelantikan formal berdirinya organisasi Aisyiyah bertepatan dengan isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tanggal 27 Rajab 1335H/19 Mei 1917 dikenal sebagai kelahiran organisasi Aisyiyah. Perkumpulan gadis-gadis terdidik di Kauman telah mengilhami terbentuknya organisasi Aisyiyah. Dari awal pendiriannya pada tahun 1917-1928 fokus utama Aisyiyah yakni menumbuhkan kesadaran dikalangan perempuan bahwa kedudukan antara perempuan dan laki-laki sama dalam ajaran Islam. Selain itu Aisyiyah juga menghimbau untuk tidak mendukung anggapan yang menyatakan perempuan sebagai pihak yang inferior (Ro'fah. 2016: 31-32). Pembentukan organisasi Aisyiyah bergerak di kalangan wanita Muhammadiyah.

Dibawah naungan Nyai Ahmad Dahlan dan pengawasan organisasi Muhammadiyah, sembilan anak perempuan yang telah menempuh pendidikan diberikan tanggung jawab secara rinci, lengkap dengan struktur organisasinya. Struktur kepemimpinan organisasi Aisyiyah dipimpin oleh salah seorang ketua yakni Siti Bariyah. Terpilihnya Siti Bariyah sebagai ketua didasarkan atas pertimbangan beberapa hal, yakni memiliki kecakapan dan kemampuan

dikarenakan lulusan *Neutral Meisjes School* sekolah milik Belanda, sehingga dirasa cukup menguasai ilmu agama dan pengetahuan umum. Susunan pengurus organisasi Aisyiyah ditetapkan dengan gaya berikut:

Ketua	:	Siti Bariyah
Sekretaris	:	Siti Badilah
Keuangan	:	Siti Aminah Harawi
Staf (Anggota)	:	Ny. H. Abdullah Ny. Fatimah Wasaal Siti Dalalah Siti Wdingah Siti Dawimah Siti Busyro Siti Suratmin

Tujuan utama organisasi Aisyiyah tidak lepas dari menegakkan ajaran Islam, tanpa ada pencampur adukan ajaran Islam dengan kebudayaan Jawa. Dalam hal ini ajaran sinkretisme yang berkembang dalam masyarakat membuat terhambatnya gerak perempuan, sehingga Aisyiyah mengambil peran untuk membimbing kaum perempuan kearah kesadaran beragama dan berorganisasi yang sesuai dengan kodrat, fungsi, dan kedudukannya menurut agama Islam. Meskipun kodratnya wanita hamil, menyusui, dan melahirkan. Namun sebagai pendamping suami perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan lelaki (Suara Aisyiyah, 1967: 7). Perjuangan untuk mempertahankan hak-hak perempuan merupakan perubahan baru yang dirintis langsung oleh organisasi Aisyiyah.

Emansipasi wanita dalam masyarakat Kauman lahir bersamaan dengan perkembangan organisasi Aisyiyah. Jauh sebelum munculnya organisasi Aisyiyah, emansipasi kaum wanita belum merebak ke seluruh masyarakat, kehidupan para perempuan diasosiasikan untuk menjadi patuh terhadap laki-laki (suami). Sebagian besar wanita Jawa mengalami pernikahan dini, mereka akan dinikahkan secara paksa tanpa mengetahui calon suami, ketika telah beranjak usia

9 tahun. Pernikahan ini akan membebani wanita dengan tanggung jawab mengurus anak dan pekerjaan rumah. Selain itu, ajaran Islam sinkretisme di kampung Kauman membuat masyarakat masih melakukan kegiatan seperti selamatan, sesajian, upacara dan lain-lain. Fenomena tersebut menjadikan K.H Ahmad Dahlan dan Nyai Siti Walidah melakukan pembaharuan terhadap pola pikir masyarakat, yang bersumber pada ajaran Islam murni (Suara Aisyiyah, 1927: 56-58). Pembaharuan yang dilakukan sepasang suami istri inilah yang nantinya membuka pemikiran masyarakat Kauman, bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama.

Organisasi Aisyiyah yang berkembang di lingkungan masyarakat Kauman dinilai berdampak positif. Hal ini disebabkan perkumpulan tersebut tidak hanya sekedar mengajarkan pendidikan Islam, akan tetapi juga menyangkut pengetahuan umum. Pada tahun 1923 gerakan melawan kebodohan menjadi salah satu pilar perjuangan organisasi Aisyiyah dalam memberantas buta huruf (Lestari, 2019: 3). Untuk melaksanakan kegiatan tersebut setiap cabang dan kelompok bagian Aisyiyah diharuskan membuka kursus yang mengajarkan cara membaca huruf latin bagi setiap anggota dan kaum Aisyiyah (Hoofdcomite Congres Moehammadiyah, 1936: 25). Faktanya gerakan pemberantasan buta huruf telah mampu meningkatkan pengetahuan dan partisipasi kaum perempuan di dunia publik.

5.2 Mengelola Lembaga Pendidikan

Pada sub bab ini dijelaskan mengenai adanya lembaga pendidikan, yang diurus dan dirintis oleh organisasi Aisyiyah. Pendirian lembaga pendidikan, sejalan dengan tujuan utama Aisyiyah yakni untuk menumbuhkan kesadaran kaum perempuan terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut organisasi Aisyiyah memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk mengenyam pendidikan dengan membuka sekolah.

Fokus utama organisasi Aisyiyah sejak awal adalah menyampaikan syiar Islam. Program yang terlaksana menyangkut kepentingan kaum perempuan, seperti, pendirian musolla atau masjid khusus perempuan, merayakan hari besar islam, melaksanakan kursus keagamaan (pengajian), dan mengirim mubaligh ke

beberapa daerah terpencil sebagai bentuk pelatihan (Ro'fah, 2016: 39). Dari beberapa program ini, diharapkan agar para mubaligot yang diutus oleh Aisyiyah dapat membantu menyebarkan agama Islam serta mendirikan cabang di daerah yang dikunjungi. Salah satu inti program yang Organisasi Aisyiyah jalankan adalah mendirikan lembaga pendidikan, dengan pendidikan agama Islam sebagai syiar utamanya.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi Aisyiyah, mempunyai beberapa kesamaan dengan aktivitas organisasi perempuan lainnya, khususnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan oleh organisasi perempuan dijadikan sebagai sarana utama untuk memperbaiki hidup dan memecahkan masalah keterbelakangan kaumnya (McCormack, 1998 dalam Ro'fah, 2016: 40). Organisasi Aisyiyah sejak berdiri terus mengembangkan organisasinya, baik dalam ranah publik yang bersifat dakwah ataupun gerakan amaliah kepada masyarakat. Selain pendidikan, aktivitas-aktivitas lain yang dijalankan oleh organisasi Aisyiyah adalah berdakwah mengenai ajaran Islam, memberi pelayanan mendidik anak-anak, serta membangun infrastruktur sosial yang mencirikan bahwa organisasi Aisyiyah termasuk dalam organisasi sosial keagamaan. Namun, berbeda dengan organisasi lain, organisasi Aisyiyah dalam hal ini mendukung pendidikan dengan menekankan pada keseimbangan antara pendidikan modern dengan pendidikan keagamaan.

Terdapat dua sekolah yang berhasil dikelola oleh organisasi Aisyiyah diantaranya:

5.2.1 *Froubel Kindergarten* atau TK Aisyiyah Busthanul Atfal

Sejarah berdirinya TK Aisyiyah Busthanul Atfal tidak terlepas dari peran *Siswo Proyo Wanito* (SPW). SPW (1919) berdiri dua tahun setelah Organisasi Aisyiyah, anggotanya terdiri dari remaja perempuan Kauman yang juga termasuk kader Aisyiyah. Gerakan SPW diawali dengan mengumpulkan dan memberi dukungan pada anak-anak perempuan, untuk bisa berpidato, mendengarkan kajian, melatih sholat subuh berjamaah dan lain sebagainya. Seiring perkembangannya, SPW dibawah kepemimpinan Siti Umnijah berhasil menjalankan tiga program yakni: *Tholaboes sa'adah* (berkaitan dengan pemberian

materi pengetahuan umum dan agama), *Tadjmiloel achlaq* (berkaitan dengan pemberian materi tentang budi pekerti dan akhlak) dan *Dirasatoel banaat* (berkaitan dengan pemberian pengetahuan agama khususnya belajar mengaji bagi anak-anak) (15 *Tahoen Soeara Aisjijah*, 1940: 5-6 dalam Suswandari., et al. 2020: 20). Dari program *Dirasatoel banaat* atau pengajian anak, SPW berhasil mengembangkan menjadi pendidikan anak pra sekolah yang dikenal dengan nama *Froubel Kindergarten*.

Institusionalisasi *Froubel Kindergarten* menjadi TK Aisyiyah Busthanul Atfal terjadi antara tahun 1924-1931. Pematangan lembaga pendidikan anak usia pra sekolah ini, mengalami proses institusionalisasi melibatkan para pengurus SPW dan Aisyiyah. Pelaksanaan kongres ke 11 tahun 1922 menghasilkan kebijakan untuk mendirikan Muhammadiyah di luar wilayah Yogyakarta, yang dibarengi dengan pembentukan pengurus Aisyiyah. Tindakan tersebut menyebabkan organisasi Aisyiyah harus melengkapi kepengurusannya dengan membentuk sub struktur atau dikenal dengan sebutan “*Oeroesan*”, terdapat lima urusan dalam struktur Aisyiyah yakni: (1) *Siswo Proyo Wanito* (SPW), (2) urusan madrasah, (3) urusan tabligh, (4) urusan wal’ashri, dan (5) urusan dzakirat. Sehingga dari pembentukan urusan tersebut, *Siswo Proyo Wanito* otomatis masuk dalam sub struktur Aisyiyah. Sejalan dengan itu, pembentukan Aisyiyah di luar Yogyakarta (berdasarkan keputusan kongres 1922) mengalami peningkatan yang signifikan dan mengharuskan Aisyiyah mengubah penggunaan istilah nama dalam organisasi, agar dapat mudah dimengerti masyarakat. Maka, nama *Froubel Kindergarten* berganti *Bustanul Atfal* dan *Siswo Proyo Wanito* berganti *Nasyiatul Aisyiyah* (perubahan nama SPW terjadi pada tahun 1929), perubahan tersebut diganti dengan nama-nama Arab guna diterima masyarakat muslim. H. MH Mawardi (1978) dalam artikelnya menjelaskan bahwa terdapat keputusan yang mengharuskan diadakannya *Froubel Kindergarten* pada salah satu muktamar Aisyiyah. Menindaklanjuti keputusan tersebut maka tahun 1924 Aisyiyah mengeluarkan putusan untuk membentuk *Froubel Kindergarten* dengan nama *Bustanul Athfal Aisyiyah* di Kampung Kauman, Yogyakarta (H. MH. Mawardi, 1978 dalam Mu’arif & Setyowati, 2020: 53-55). Oleh karena itu, keputusan

kongres tahun 1924 mengakibatkan pengelolaan TK Aisyiyah Bustanul Athfal otomatis langsung berada dibawah bagian Organisasi Aisyiyah (khususnya urusan madrasah) dan tidak lagi berada dalam kepengurusan Nasyiatul Aisyiyah.

Perubahan *Froubel Kindergarten* menjadi TK *Aisyiyah Bustanul Athfal* mencerminkan pendidikan yang berbasis keagamaan. Komitmen bersama antara kader bagian putri Muhammadiyah dan Aisyiyah, dilatarbelakangi cita-cita pendidikan pendiri Muhammadiyah yang dikenal dengan nama “catur pusat pendidikan”, yaitu: pendidikan di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat ibadah. Pendidikan di lingkungan sekolah tidak hanya mengajarkan pengetahuan umum, akan tetapi juga pendidikan keagamaan yang didalamnya tercakup akhlaq dan budi pekerti, yang merupakan dasar dari pergaulan. Sendi pergaulan adalah agama. Oleh sebab itu, maka pergaulan anak-anak semenjak dari sekolah taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi harus diperhatikan. Dalam buku *Adabul Mar’ah Fil Islam* yang disusun oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Aisyiyah (1982) menghimbau para orang tua untuk memastikan bahwa pergaulan anak-anak mereka tidak mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan agama. Hal ini perlu menjadi perhatian orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke suatu Taman Kanak-Kanak yang berbasis agama, karena dari pendidikan pra sekolah inilah anak-anak akan terasah dan terasuh dalam pergaulan selanjutnya (Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1982: 23-24). Dengan demikian, TK ABA Kaumann merupakan pelopor pendidikan anak usia dini yang bernafaskan Islam di Indonesia.

Pendidikan taman kanak-kanak pertama di Hindia Belanda dikenal dengan nama *Frobel School*. Penyebutan *Frobel School* diambil dari nama Friedrich Wilhelm August Frobel yakni pendiri taman kanak-kanak yang berkembang di Jerman. Konsep bermain dan belajar oleh Friedrich diterapkan untuk pendidikan anak-anak usia dini, konsep yang sama kemudian juga diambil oleh pemerintah Hindia Belanda. Saat itu, pendidikan taman kanak-kanak diperuntukkan bagi anak-anak Belanda, saudagar dan anak-anak bangsawan. Selain menerapkan sistem pendidikan Frobel, pada perkembangannya tahun 1938 pemerintah Belanda juga mengimplementasikan metode Montessori, dimana

pendidikannya lebih mengutamakan perkembangan kepribadian anak, seperti mandiri, percaya diri, dan disiplin. Lahirnya pendidikan anak-anak pra sekolah telah ada sejak tahun 1914, hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam membuka kelas Persiapan (Voorklas) yang memiliki tujuan mempersiapkan anak-anak memasuki Sekolah Dasar (HIS) pada zaman pemerintahan Belanda (Makmur., *et al.* 1993: 58-63).

Kurikulum yang ada pada sekolah Frobel Belanda pada perkembangannya dinilai merusak nilai-nilai budaya Indonesia. Taman kanak-kanak yang berada dibawah pengelolaan pemerintah Hindia Belanda mengharuskan penggunaan bahasa Belanda kepada para muridnya. Hal tersebut dianggap tidak sesuai, karena pendidikan anak usia dini masih berada pada tahap pembentukan karakter, dengan pendidikan sederhana seperti menanamkan nilai budaya bangsa sendiri agar tercipta rasa cinta tanah air. Kondisi inilah yang melatarbelakangi Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah Taman Indiri tahun 1922 (Munfaizah, 2021: 38). Kemudian disusul Aisyiyah mendirikan pula sekolah untuk anak-anak usia dini yang dikenal dengan nama TK ABA.

Orientasi didirikannya TK Aisyiyah Bustanul Athfal tidak terlepas dari kondisi kehidupan masyarakat. Alasan utama pendirian lembaga ini ada dua. Pertama, untuk memberikan bimbingan dan pendidikan serta dasar-dasar Islam kepada anak-anak dan kedua, untuk mengimbangi kehadiran pendidikan Eropa yang hanya tersedia bagi anak-anak bangsawan. Pada saat itu, pemerintah Belanda diketahui telah mendirikan taman kanak-kanak yang disebut *Frobel School*, yang lebih condong ke arah sekuler. *Frobel School* pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1914, sehingga tujuan didirikannya TK ABA Kauman ialah untuk mempromosikan tujuan nasionalis dan religius (Islam) sebagai tanggapan atas popularitas *Frobel School* yang berorientasi Eropa (Suswandari., *et al.* 2020: 26). Dua tujuan dasar pendidikan TK ABA di Kauman ini seiring berjalannya waktu terus mengalami perubahan.

Tata kelola TK ABA Kauman, pada masa awal didirikan tergolong sederhana. Dalam reportase majalah Suara 'Aisyiyah (15 Tahoenan Soeara Aisjijah), terdapat sebuah rubrik diberi nama "Taman Nasjiah". Melalui rubrik ini,

seorang penulis bercerita tentang tempat beraktivitas selama periode awal SPW: “...ketika masih dipegang sdr. St. Wasilah, SPW, itoe bertempat di soeatoe roemah jang sekarang telah diperbaiki mendjadi Moeshalla ‘Aisjijah itoe. Setelah SPW dipimpin sdr St. Oemnijah, maka perkoempoelan SPW itoe dipindah di belakang roemah St. Oemnijah. Tempat itoe masih boeroek, kalau hoedjan, airnja dapat masoek...”. Hal ini memperlihatkan betapa sederhananya bangunan awal TK ABA Kauman. Di belakang rumah Siti Umnijah di Penggulon inilah TK ABA Kauman pertama kali didirikan, dan kondisi ini kemudian mendorong Aisyiyah untuk membangun gedung sendiri untuk anak-anak TK ABA Kauman. Setelah 2,5 tahun dana terkumpul baru terbeli sebuah rumah, yang sekarang dikenal sebagai “Gedung Nasjiatul Aisjijah Kauman” (Suswandari., *et al.* 2020: 31-32).

Pembelajaran anak usia dini sebelum lahirnya TK ABA, didapatkan dari orang tua dan hanya mengajarkan pendidikan agama. Adapun alasan para orang tua kemudian tertarik untuk menyekolahkan anak-anak mereka di TK ABA, ialah agar mendapatkan pembelajaran sejak dini dan pembekalan ajaran Islam yang sesuai syariat (Munfaizah, 2021: 55). Sejak awal berdirinya, TK ABA Kauman menampung siswa perempuan dan laki-laki (*dapat dilihat pada lampiran 3*). Namun, karena meningkatnya jumlah murid yang belajar di TK ABA Kauman dan usulan dari orang tua murid, pembelajaran di TK ABA Kauman yang semula berlangsung setiap sore hari diganti menjadi pukul 07.30-09.30 WIB. Hal inilah yang mendorong semakin pesatnya perkembangan TK ABA Kauman saat itu.

Aisyiyah sebagai sebuah gerakan pembaharuan perempuan di Indonesia, memiliki arti sangat penting karena mengangkat isu pendidikan anak. Kehadiran Aisyiyah mendobrak stigma bahwa perempuan dan anak-anak tidak layak mendapatkan hak yang paling mendasar pada saat itu, yaitu pendidikan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi perlindungan anak dan pengembangan sumber daya manusia di masa depan. Aisyiyah telah memberikan peran strategis bagi perempuan dalam pendidikan pra-sekolah di Indonesia, yang dibuktikan dengan fakta bahwa telah berhasil mendirikan pendidikan pra-sekolah pertama di Hindia-Belanda, yakni TK ABA Kauman, yang didirikan dan dikelola oleh Bumiputera, yang pada gilirannya menjadi model bagi pendidikan serupa di Indonesia.

5.2.2 Kweekschool Muhammadiyah Istri

Pada masa awal perjuangannya, organisasi Aisyiyah berkembang mengikuti organisasi induknya yakni Muhammadiyah. Aisyiyah muncul sebagai bagian Muhammadiyah perempuan, dimana Muhammadiyah bertugas dalam memimpin, membina, dan memelihara setiap anggotanya. Kegiatan Aisyiyah sebelum memiliki AD ART masih berada dalam lingkup Muhammadiyah. Aktivitas yang dilakukan Muhammadiyah bertujuan untuk memajukan umat Islam terbelakang, dengan ini pendiri Muhammadiyah mengadopsi keunggulan kaum intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup (Mu'arif, 2012: 88). Gagasan awal dalam mewujudkan hal tersebut ditandai dengan munculnya *Madrasah Diniyah Ibtidaiyyah* yang menerapkan model pendidikan umum dan agama.

Bentuk dari pendidikan Muhammadiyah sejak pertama muncul tergolong bersifat nonformal, hanya sebatas mengikuti pelajaran mengaji dan bahasa Arab. Kelompok pengajian yang berhasil dirintis di kampung Kauman yakni *Fathul Asrar Wa Miftahus Sa'dah* (FAMS), Pengajian Malam Selasa, *Sapa Tresna*, dan Wal 'Ashari. Sedangkan pengajian di luar Kauman seperti, Thaharatul Qulub, Sumarah Allah, Taqwimuddin, Nurul Islam, Iqamatuddin, Ichwanul Muslimin, dan lain-lain (Fakhrudin, 2005: 17). Kelompok pengajian yang ada kemudian berkembang pesat menjadi organisasi dan sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Sekolah rintisan Muhammadiyah kemudian menghadapi tantangan kekurangan tenaga pendidik. Kondisi ini juga terjadi seiring berkembangnya sistem pendidikan kolonial, dimana pemerintah kolonial tidak menyiapkan guru, terutama guru muslim (Amini, 2020: 162). Persiapan untuk mendapatkan calon guru kemudian dilakukan dengan membentuk sekolah lanjutan tahun 1919, yang dikenal dengan nama *Al-Qismul Arqa* yakni sekolah lanjutan yang dikhususkan untuk memenuhi guru agama di sekolah-sekolah (rendah) Muhammadiyah (Ricklefs, 2011: 346). *Al-Qismul Arqa* inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya sekolah khusus bagi kaum perempuan yakni Kweekschool Muhammadiyah Istri.

Penyebutan nama *Al-Qismul Arqa* mengalami beberapa kali perubahan sejak awal kemunculannya. Pergantian nama pertama terjadi tahun 1921 dengan nama Pondok Muhammadiyah, kemudian tahun 1923 berubah menjadi Kweekschool Muhammadiyah dan Kweekschool Muhammadiyah Istri, serta berubah kembali tahun 1932 menjadi Madrasah Mu'allimin dan Mu'allimaat (Mu'arif & Setyowati, 2020: 47). Hingga pada tahun 1936 dalam kongres Muhammadiyah bagian Aisyiyah tercatat perubahan nama Madrasah Mubalighat Aisyiyah diganti Tsanawiyatul A'la (Hoofdcomite Congres Moehammadiyah, 1936: 25). Namun penyebutan nama terakhir ini tidak banyak tercantum dalam beberapa sumber. Perubahan nama tersebut pada akhirnya membuat munculnya pemisahan antara siswa perempuan dan laki-laki.

Kweekschool Muhammadiyah Istri adalah sekolah Muhammadiyah yang dikhususkan untuk putri. Kweekschool Muhammadiyah Istri dikelola secara langsung oleh Muhammadiyah dan Aisyiyah (Amini, 2021: 23). Sekolah rintisan Aisyiyah selain TK Bustanul Athfal adalah Kweekschool Muhammadiyah Istri (Lestari, 2019: 38). Tujuan pendirian sekolah ini ialah agar Muhammadiyah dapat memberikan ruang kelas tersendiri khusus perempuan sehingga pembelajaran terlaksana dengan baik. Kweekschool Muhammadiyah Istri merupakan hasil kerja sama Walidah bersama K.H Ahmad Dahlan, karena pada tahun 1923 Aisyiyah merupakan organisasi otonom dibawah Muhammadiyah (Munfaizah, 2021: 57). Pendidikan Muhammadiyah menjadi dasar pendidikan yang diberikan Aisyiyah dalam kegiatan belajar dan pembelajaran.

Sekolah Kweekschool Muhammadiyah Istri tidak mendapat subsidi bantuan dana dari pemerintah Belanda akan tetapi mampu menyelenggarakan sekolah islam modern pertama di Yogyakarta. Pada awal pembukaannya, sekolah guru perempuan ini telah menerima beberapa siswa selain dari Yogyakarta, diantaranya Cilacap, Banjarnegara, Temanggung, dan Purwokerto (Amini, 2021: 24). Kweekschool merupakan sekolah modern rintisan Walidah yang sudah memberikan pelajaran semakin luas seperti tarikh tanah jawa, berhitung, ilmu bumi, bahasa jawa, dan bahasa melayu. Studi bersekolah di Kweekschool hanya 3 tahun dan dibagi menjadi 3 kelas Kweekschool sesuai dengan kebijakan

pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1927, Kweekschool lama studi di rubah menjadi 5 tahun. Perubahan lama belajar dari 3 tahun menjadi 5 tahun ini merupakan syarat agar siswa dan siswi di Kweekschool mendapatkan ijazah kelulusan sekolah karena telah menempuh studi secara penuh (Suara Muhammadiyah, 1922: Tanpa Hal dalam Mu'arif, 2012: 102). Rencana pembelajaran di Kweekschool dibagi menjadi 3 kelas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Rencana Pembelajaran di Kweekschool

Materi	Jam Pelajaran			Keterangan
	Kelas I	Kelas II	Kelas III	
Tarikh Tanah Jawa	-	-	1	
Berhitung Rupa	1	1	2	
Ilmu Bumi	1	1	1	
Bahasa Jawa	1	1	2	
Bahasa Melayu	1	1	1	
Bahasa Arab				
1. Madarijulinsya	4	1	2	
2. Nahwu	2	3	-	
3. Lughot	5	6	-	
Adab	2	2	3	Kelas III ditambah Akhlak
Tarikh Anbiya dan Islam	4	2	3	
Husnul Khat	2	2	-	
Fiqh	4	2	3	Kelas III ditambah Ushul Fiqh
Tauhid	4	5	3	
Imla	1	-	-	
Qur'anul Karim	2	2	-	
Tafsirul Qur'an	-	4	6	
Ilmu Assya'	-	4	6	
Permulaan	-	-	1	
Naturrkenis (Ilmu Thabi'i)				
Ilmu Guru	-	-	1	
Menulis dan Menggambar	-	-	1	
Jumlah	34	34	34	Jam

Sejak didirikan pada tahun 1923, jenjang pendidikan dan kurikulum terus mengalami pembaharuan. Sistem pendidikan yang dikembangkan Kweekschool Muhammadiyah Istri pada awalnya dirancang sebagai kurikulum terpadu, yaitu menggabungkan sistem pendidikan ala barat, sistem pendidikan guru, dengan sistem pesantren. Perpaduan kurikulum pendidikan modern dengan pesantren adalah perbandingan 60:40. Enam puluh persen dialokasikan untuk pendidikan umum sebagai upaya mendorong daya saing alumni untuk dunia kerja. Empat puluh persen dilakukan sebagai pesantren untuk memperkuat pengetahuan agama. Selain itu, Kweekschool Muhammadiyah Istri semula menerapkan pendidikan 3 tahun. Namun pada tahun 1941 memperpanjang pendidikan menjadi program 6 tahun, membaginya menjadi tiga tahun sekolah menengah pertama (Tsanawiyah) dan diikuti tiga tahun sekolah menengah atas (Aliyah) (Amini, 2020: 164).

Kweekschool dalam perkembangannya setara dengan sekolah milik Belanda yaitu sekolah bumiputera (*Inlandscheschool*) dan sekolah rakyat (*volkschool*). Sekolah bumiputera lama belajarnya 5 tahun dan disediakan untuk anak bumiputera golongan menengah. Sedangkan sekolah rakyat terlebih dahulu berdiri sebelum Kweekschool berdiri tahun 1907 atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutza. Tenaga kerja pengajarnya tidak terdiri dari pegawai pemerintah, melainkan pegawai desa. Karena sebagian besar penduduk desa di Hindia Belanda adalah orang miskin dan tidak tertarik pada pendidikan, sekolah rakyat ini berkembang dengan lambat. Dari ketiga sekolah umum yang berkembang pada abad ke-19 an dapat dilihat perbedaannya dengan cara mendapatkan subsidi untuk kelangsungan pendidikan. Jika sekolah bumiputera dan sekolah rakyat mendapatkan subsidi dari pemerintah kolonial pada tahun 1920. Namun pada tahun 1930 dana bantuan menjadi berkurang dikarenakan adanya depresi ekonomi (Makmur., *et al.* 1993: 77-78). Pada hakikatnya sekolah rakyat ini dimaksudkan untuk menghasilkan kaum tani dan kaum buruh yang terpelajar.

Hal ini berbeda dari Kweekschool milik Aisyiyah yang tidak pernah menggantungkan nasib kepada pemerintah kolonial Belanda. Meskipun tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, nyatanya Kweekschool mampu menyelenggarakan sekolah islam modern pertama di Yogyakarta. Sumber

pendanaan berasal dari kas Hoofbestuur Muhammadiyah, infaq anggota, sumbangan operasional dan iuran bulanan (SPP). Bagian Hoofbestuur telah mengeluarkan dana sebanyak 1.500 florin sebagai pendanaan pendidikan (Mu'arif, 2012: 104-105).

Seperti yang telah dijelaskan diatas, kweekschool rintisan Muhammadiyah dan Aisyiyah bermula dari berkembangnya modernisasi sistem pendidikan madrasah serta pesantren. Sejalan dengan pemenuhan sebagai calon pemimpin, pendidik, dan mubaligh, sekolah yang telah terbagi antara laki-laki dan perempuan ini kemudian berubah berada langsung dibawah kepengurusan Pengurus Pusat Muhammadiyah, berdasar pada keputusan Mukhtamar Muhammadiyah di Medan tahun 1928 (Listiana, 2015: 245). Pergantian nama menjadi Madrasah Mu'allimin dan Mu'allimaat berkaitan dengan orientasi organisasi induknya, yang bertujuan mengukuhkan dan memuliakan ajaran Islam.

Dalam merealisasikan hal tersebut, keberadaan kader-kader sangat dibutuhkan Muhammadiyah dan Aisyiyah sebagai misi pembawa *rahmatan lil alamin*. Pada kongres Muhammadiyah tahun 1934 Madrasah Mu'allimin dan Mu'allimaat dikukuhkan sebagai sekolah pengkaderan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan tiga tujuan: (1) menjalankan tujuan Muhammadiyah, (2) mempersiapkan kader-kader Muhammadiyah, dan (3) membentuk tenaga pendidik dengan kemampuan ilmu yang mumpuni. Selaras dengan perkembangan Muhammadiyah dan Aisyiyah, madrasah ini mulai diminati pelajar dari luar kota. Kedua madrasah ini kemudian memperoleh pengakuan secara legal dalam kongres Muhammadiyah tahun 1934, kongres mengamanatkan bahwa pengelola dan penanggung jawab madrasah berada di tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Rahman, 2017: 47-48). Beberapa anggota dari organisasi Aisyiyah, sebelumnya juga telah menempuh pendidikan di Kweekschool atau Madrasah, yang kemudian menjadi ladang untuk melahirkan kader-kader Aisyiyah.

5.3 Mengurus Organisasi Pelajar Perempuan

Pada sub bab ini dijelaskan mengenai adanya organisasi pelajar perempuan yang ikut dirintis oleh organisasi Aisyiyah. Perhatian organisasi

Muhammadiyah terhadap remaja putri mendorong terbentuknya Nasyyiatul Aisyiyah (*Siswo Proyo Wanito*), pembentukan organisasi pelajar ini membuat organisasi Aisyiyah ikut andil dalam pendiriannya di beberapa wilayah di luar Yogyakarta.

Perkembangan Kweekschool Muhammadiyah Istri yang semakin pesat berdampak pada pembentukan bagian-bagian lain dalam organisasi Aisyiyah. Salah satunya adalah gagasan untuk mengembangkan sebuah organisasi bagi pelajar perempuan. Hasil kongres Aisyiyah ke 21 tahun 1932 di Makassar, mengharuskan setiap cabang organisasi Aisyiyah mendirikan organisasi pelajar putri yang dikenal dengan *Siswo Proyo Wanito* (Ro'fah, 2016: 40). Hal inilah yang secara tidak langsung membuat organisasi Aisyiyah ikut andil dalam mendirikan *Siswo Proyo Wanito* di beberapa wilayah Indonesia.

Pendirian *Siswo Proyo Wanito* berasal dari kepedulian K.H Ahmad Dahlan terhadap remaja putri di sekolah yang telah didirikannya. K.H Ahmad Dahlan menunjuk Sumodirjo mengelola *Standard School* Muhammadiyah di wilayah Suronatan, yang kemudian memunculkan adanya perintah untuk menciptakan wadah bagi aktivitas dan kreativitas remaja putri di luar jam sekolah (Pimpinan Pusat Nasyyiatul Aisyiyah, 2022: 14). Pembentukan ini menjadi langkah awal bagi terciptanya siswa berprestasi baik di ranah kognitif maupun afektif.

Realisasi dari pembentukan remaja putri di wujudkan Sumodirjo dengan membentuk *Siswo Proyo* tahun 1919. Sebelum resmi menjadi organisasi pelajar putri, *Siswo Proyo Wanito* adalah satu kesatuan dari *Siwo Proyo* yakni tempat menampung segala kegiatan peserta didik baik perempuan maupun laki-laki. Namun, pada perkembangannya terpisah menjadi *Siswo Proyo Wanito* dan *Siswo Proyo Priyo* (Mu'arif & Setyowati, 2020: 51). Awal pembentukan organisasi pelajar tidak ditentukan berdasar jenis kelamin para anggotanya.

Pemberian kegiatan di luar jam sekolah, oleh Sumodirjo diterapkan dengan memberi pelajaran tambahan berupa praktek. Dalam perjuangannya Sumodirjo dibantu Hadjid yang merupakan guru agama *Standard School* Muhammadiyah. Sumodirjo berkeyakinan bahwa peserta didik penting untuk memiliki nilai keagamaan, kognitif, serta kondisi jasmani yang sehat, karena

dengan terpenuhinya tiga hal tersebut, maka para peserta didik akan dapat berkontribusi bagi perjuangan Muhammadiyah kedepannya (Priatna, 2021: 35). Hal ini selaras dengan hasil kongres Muhammadiyah ke 16 tahun 1927 yang menyebutkan bahwa pengajaran dalam *Siswo Projo* meliputi adat sopan santun, bahasa yang halus, cara mengobati orang sakit, dan pembelajaran ilmu-ilmu untuk menjadi seorang guru (Soera Aisyiyah, 1927: 3-4). Kondisi tersebut mendorong adanya peningkatan mutu ilmu pengetahuan pada siswa-siswi di *Standard School* Muhammadiyah.

Pembentukan organisasi *Siswo Proyo Wanito* sendiri bertujuan menjadi wadah bagi pelajar-pelajar perempuan untuk mengembangkan kecerdasan dan keterampilan. Sedangkan bagi organisasi Aisyiyah, pembentukan organisasi sekaligus berfungsi sebagai tempat mencetak kader-kader organisasi Aisyiyah (Ro'fah, 2016: 40). Pada kongres Muhammadiyah ke 24 tahun 1935 khususnya pada bagian urusan Aisyiyah juga telah dijelaskan bahwa tugas dari Nasyyatul Aisyiyah adalah memelihara dan mendidik anak-anak istri, agar menjadi pengganti Aisyiyah (Hoofdcomite Congres Moehammadiyah, 1935: 15). Tindakan ini merupakan cara mempertahankan organisasi otonom Muhammadiyah dimasa mendatang, dengan penciptakan para kader yang intelek.

Para pelajar putri mengasah keterampilan yang dimiliki dengan menjalankan berbagai kegiatan. *Siswo Proyo Wanito* lahir bersamaan dengan situasi pendiskriminasian terhadap perempuan, dimana perempuan dianggap sebagai pihak kedua dan tidak jarang hak-haknya belum terpenuhi. Untuk menghadapi problematika tersebut, adapun beberapa pembelajaran yang diajarkan *Siswo Proyo Wanito* seperti pengetahuan terkait keterampilan rumah tangga, menjahit, memasak, dan berpidato (Setiawati, 1985). Selain itu, untuk menunjang kemampuan berorganisasi para pelajar diberikan materi tentang kepemimpinan, membangun relasi, dan solidaritas dalam kelompok (Syamsiyatun, 2006 dalam Darban 2010). Para pemuda ini aktif bukan hanya karena dukungan dari Muhammadiyah sebagai organisasi induk, namun juga karena kepemimpinan dan integritas kader *Siswo Proyo Wanito* yang berani mendobrak norma-norma sosial saat itu.

Struktur *Siswo Proyo Wanito* terdiri dari beberapa pelajar perempuan. Siti Washilah menduduki posisi ketua, Siti Umnijah (wakil ketua), Siti Djuhainah (sekretaris), dan Siti Zuchrijah (Bendahara) (Mu'arif & Setyowati, 2020: 52). Dibawah kepengurusan pertama inilah *Siswo Proyo Wanito* mulai mengembangkan aktivitas-aktivitasnya.

Program yang dijalankan *Siswo Proyo Wanito* secara khusus dikelompokkan sesuai dengan klaster usia dari para pelajar putri. *Siswo Proyo Wanito* sejak awal telah memperhatikan pendidikan setiap anggota, dengan itu maka program yang dijalankan berkaitan dengan mengasah kemampuan para kadernya. Program-program tersebut seperti : Pertama, *Jamiatul Athfal* (cikal bakal lahirnya TK ABA) pesertanya terdiri dari usia 7-10 tahun, kelompok ini menjalankan kegiatan membaca Al-Qur'an, paduan suara, seni prakarya, dan kegiatan jasmaniah yang diadakan dua kali dalam satu minggu. Kedua, *Tajmilul akhlak* pesertanya terdiri dari usia 10-15 tahun, kegiatan yang dilakukan membahas materi tentang menjadi pribadi yang mandiri, masalah-masalah di lingkungan sekitar, serta bagaimana cara berpidato. Selain itu, keterampilan ringan juga diajarkan seperti menyulam, menjahit, dan memasak. Dalam *Tajmilul akhlak* kegiatannya diadakan setiap hari jum'at. Ketiga, *Tholabus saadah* pesertanya terdiri dari usia 15-18 tahun, aktivitas yang dilakukan tingkatan sudah lebih tinggi dari sebelumnya, yakni berkaitan dengan pembelajaran dalam rumah tangga. Materi yang dipelajari mengenai hukum keluarga, membangun keluarga yang harmonis, belajar berdakwah menyampaikan ajaran Islam, dan belajar untuk manajemen organisasi (Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, 2016: 12). Kegiatan-kegiatan inilah yang akan melahirkan calon-calon kader terdidik *Siswo Proyo Wanito* selanjutnya.

Aktivitas organisasi ini berkenaan dengan pemberian pendidikan nonformal bagi perempuan. Kegiatan yang tercatat dalam majalah Suara Aisyiyah, menerangkan bahwa Organisasi Aisyiyah telah membuka kursus atau taman membaca pada bulan ramadhan bertempat di musalla Siswa Praja. Pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap malam Jum'at pukul 21.00 hingga 22.30 malam. Adapun tiga sesi aturan yakni *pertama* pukul 21.00-21.30 dikhususkan untuk

membaca sendiri-sendiri, *kedua* pukul 21.30-22.00 untuk mendengarkan serta membaca kabar penting yang akan disampaikan oleh para anggota kursus, *ketiga* pukul 22.00-22.30 para anggota kursus akan berdiskusi dan memperdebatkan kabar yang sebelumnya telah disampaikan pada sesi kedua (Soeara Aisjijah, 1931: 5). Secara tidak langsung kegiatan ini telah melibatkan Aisyiyah dan *Siswo Proyo Wanito* dalam mengembangkan pendidikan untuk kaum perempuan.

Kegiatan *Siswo Proyo Wanito* dinilai berbeda dengan apa yang dilakukan anak perempuan pada zamannya. Hal tersebut terlihat dari adanya gebrakan baru yang berkolaborasi antara *Siswo Proyo Wanito* dengan *Sapa Tresna* (Organisasi Aisyiyah), kegiatan yang dilakukan adalah membantu mengumpulkan donasi bagi mereka yang membutuhkan seperti memperhatikan keberadaan anak yatim, menyediakan makanan dan pengungsian saat terjadi peristiwa bencana alam (Nakamura, 1983). Meskipun kegiatan ini berada dibawah naungan Muhammadiyah, akan tetapi terlibatnya *Siswo Proyo Wanito* di ranah publik, telah membuka terobosan baru karena menghadirkan pemikiran bahwa wanita tidak hanya dapat beraktifitas di dalam rumah.

Pada tahun 1922 propaganda untuk mendirikan Muhammadiyah di luar pulau Jawa, berdampak pada pertumbuhan organisasi yang semakin signifikan. Sehingga pada perkembangannya penggunaan istilah dalam organisasi Muhammadiyah harus diubah. Kemudian hal ini terealisasi dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-20 tahun 1931 di Yogyakarta, dimana Muhammadiyah memerintahkan mengubah nama pergerakan di setiap organisasi otonomnya. Dipilihlah penggunaan bahasa Arab sebagai gantinya dengan tujuan agar mudah diterima oleh mayoritas masyarakat muslim (Priatna, 2021: 36; Mu'arif & Setyowati, 2020: 54-55). Berkenaan dengan keputusan tersebut, pada perkembangannya *Siswo Proyo Wanito* berubah menjadi *Nasyiatul Aisyiyah*.

Satu tahun sebelum perubahan *Siswo Proyo Wanito* menjadi *Nasyiatul Aisyiyah*, organisasi ini telah berkoordinasi langsung dengan organisasi Aisyiyah. Hal ini sesuai dengan kongres Aisyiyah tahun 1930, yang menghasilkan keputusan mengenai pembentukan lima bagian dalam organisasi Aisyiyah yakni *Siswo Proyo Wanito*, *Madrasah*, *Tabligh*, *Wa al-Ashri*, dan *Dhakhirat*. Setiap

bagian bertanggung jawab atas terselenggaranya segala kegiatan yang berbeda. Misalnya bagian *Siswo Proyo Wanito* memiliki tanggung jawab dalam perkembangan perempuan muda di organisasi (Ro'fah, 2016: 41). Keputusan ini ditetapkan sebagai lahirnya organisasi Nasyyiatul Aisyiyah bertepatan dengan tanggal 16 Mei 1931 (Yusup., *et al.* 2005: 271). Selain itu membuat *Siswo Proyo Wanito* atau Nasyyiatul Aisyiyah menjadi bagian struktur organisasi Aisyiyah.

Aktivitas-aktivitas tersebut kemudian diperkenalkan di setiap tingkatan oleh basis organisasi Aisyiyah yang tersebar di seluruh Nusantara. Ketika program pembagian lima golongan disetujui oleh kongres Aisyiyah, maka sudah barang tentu setiap cabang organisasi Aisyiyah bertindak untuk melaksanakan tugasnya. Organisasi Aisyiyah menganggap bahwa aktivitas-aktivitas tersebut memiliki dua fungsi: sebagai sumbangsih untuk kemajuan masyarakat dan menjadi sarana memperkenalkan dan mengibarkan nama Aisyiyah (Ro'fah, 2016: 42). Kondisi tersebut mendukung organisasi Aisyiyah dalam mewujudkan tujuannya meningkatkan derajat kaum perempuan.

Setelah berada di bawah naungan organisasi Aisyiyah, Nasyyiatul Aisyiyah mulai mencapai kemajuan dengan aktivitas-aktivitasnya di ruang publik. Pada periode setelah tahun 1930-an Nasyyiatul Aisyiyah berhasil menciptakan lambang dan mars organisasi dengan padi sebagai simbolnya. Hal ini tercatat dalam kongres Muhammadiyah ke 25 dan 26, simbol padi dan maknanya telah diberikan kepada Nasyyiatul Aisyiyah (Hoofdcomite Congres Moehammadiyah, 1936: 25; Hoofdcomite Congres Moehammadiyah, 1937: 6). Selain itu peningkatan kegiatan di ruang publik tercatat mengalami peningkatan, khususnya pada bidang keagamaan, dimana terselenggara acara seperti: berdakwah dari satu desa ke desa lain, menarik iuran untuk idul adha, dan mengadakan pawai syiar agama (Pimpinan Pusat Nasyyiatul Aisyiyah, 2016: 13). Namun hal ini mengalami kemacetan pada masa revolusi, dimana peran Nasyyiatul Aisyiyah mulai tidak tampak di masyarakat.

5.4 Terlibat dalam Kongres Wanita Indonesia

Pada sub bab ini dijelaskan mengenai keterlibatan organisasi Aisyiyah dalam Kongres Perempuan pertama tahun 1928. Latar belakang organisasi

Aisyiyah terlibat dalam kongres adalah untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedudukan kaum perempuan. Salah satu cara untuk memajukan pendidikan kaum perempuan, ditempuh organisasi Aisyiyah dengan ikut serta sebagai salah satu penggagas dalam kongres, karena dari kongres ini organisasi Aisyiyah mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pandangannya terhadap perlunya pendidikan untuk anak-anak perempuan pribumi.

Pada permulaan abad ke 20 kebangkitan nasionalisme berkembang cepat dalam masyarakat, salah satunya terjadi pada pergerakan kaum wanita. Hal ini ditandai dengan kemunculan beberapa organisasi perempuan, baik bercorak sosial ataupun keagamaan. Agenda utama pergerakan perempuan saat itu berkaitan dengan gagasan untuk menyatukan beberapa organisasi (Ro'fah, 2016: 31). Meskipun setiap organisasi memiliki kepentingan yang berbeda, akan tetapi gagasan nasionalisme mampu menjembatani perbedaan antar pergerakan. Namun, keinginan para wanita untuk menyelenggarakan perkumpulan baru terlaksana akhir tahun 1920-an. Gagasan terkait adanya perkumpulan termanifestasikan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda mendorong para kaum wanita, yang aktif dalam organisasi untuk menyatukan gerakan mereka (Marwati. & Nugroho, 2009: 417). Bangkitnya nasionalisme membuat organisasi-organisasi tersebut, kemudian berjuang hingga terjalin hubungan antar anggota di kongres pertamanya tahun 1928.

Aisyiyah secara eksplisit menyelaraskan semangatnya dengan gerakan nasionalisme saat itu. Organisasi Aisyiyah mengambil tindakan untuk merubah penggunaan bahasa Belanda ke bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam setiap kongres Aisyiyah, kepentingan publikasi, dan dokumentasi di seluruh kegiatannya (Ro'fah, 2016: 45). Selain itu aktivitas utama organisasi Aisyiyah adalah melakukan perbaikan terhadap kedudukan perempuan, yang terwujud dengan berdirinya sekolah-sekolah. Sejalan dengan pembaharuan budaya berdasarkan agama Islam, pendidikan juga dipilih Aisyiyah sebagai salah satu cara untuk mencerdaskan penduduk pribumi guna mengusir para penjajah yang telah lama menindas masyarakat (Karomatika, 2018: 45-46). Berangkat dari inilah

kemudian Aisyiyah turut serta menjadi pengagas dalam perhelatan besar perkumpulan organisasi perempuan di Indonesia.

Kongres pertama dilaksanakan atas inisiatif ketujuh organisasi perempuan, salah satunya Aisyiyah. Ide untuk mengadakan pertemuan dan membentuk panitia kongres berawal dari pemikiran guru muda organisasi Putri Indonesia, yang didukung tiga tokoh perempuan di dalamnya yakni R.A. Soekonto, Sujatin, dan Nyi Hajar Dewantara. Gagasan yang ada kemudian di musawarahkan kembali, dengan dihadiri beberapa organisasi perempuan diantaranya, Putri Indonesia, Wanita Taman Siswa, *Jong Java* bagian wanita, JIBDI, Wanita Utomo, Wanita Katolik, serta Organisasi Aisyiyah. Dari pertemuan tersebut disepakati kongres pertama akan dilaksanakan tanggal 22-25 Desember 1928 bertempat di Ndalem Joyodipuran Yogyakarta (Trimurtini, 2015: 37-47). Kongres ini menjadi momentum penting bagi perjuangan awal kaum perempuan untuk memperoleh hak-haknya.

Gagasan-gagasan diperlukannya Kongres Perempuan disampaikan oleh beberapa organisasi. Adapun usulan bagian *Hoofdbestuur* Aisyiyah untuk mengadakan kongres tersebut: (1) Aisyiyah mengusulkan untuk diadakannya kongres perempuan Indonesia menjadi badan perkumpulan, beranggotakan bagi siapa saja yang mau, khususnya berasal dari perkumpulan Hindia Timur. (2) Maksud dari badan perkumpulan (a) menjadi perantara antar organisasi perempuan (b) menjadi penengah ketika ada perselisihan antar organisasi (c) menunjukkan kemajuan organisasi, bagi perkumpulan telah bergabung menjadi anggota (3) Aisyiyah mengusulkan agar dibentuk pimpinan dengan 9 struktur organisasi (4) Aisyiyah secara ringkas mengusulkan agar : (a) terlaksana kongres setiap tahun (b) menerbitkan surat kabar (*Congresnummer; Congres Perempoean Indonesia Jang Pertama* dalam Karomatika, 2018: 40-43). Usulan ini kemudian didiskusikan kembali dengan gagasan-gagasan dari organisasi lain, dan nantinya terdapat usulan Aisyiyah yang diambil dalam kongres.

Pembatasan penyelenggaraan suatu kongres pada tahun 1920 tidak menyurutkan keinginan kaum perempuan untuk mengadakan perkumpulan. Oleh karena itu, pertemuan para perwakilan organisasi perempuan terlaksana secara

tertutup sebab tidak adanya izin dari pemerintah. Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, kongres tetap berhasil dan berjalan lancar, tercatat sebanyak 1000 orang hadir pada kongres tanggal 22 Desember, disusul hari berikutnya kurang lebih 700 hingga 1000 anggota organisasi yang mengikuti kongres (Blackburn, 2007: xx). Banyaknya anggota yang datang membuat meningkatnya hubungan antar organisasi dengan pihak luar.

Tabel 5. 2 Perwakilan utusan organisasi perempuan dalam Kongres 1928

Nama	Perwakilan Cabang
Aisyiyah	Pengurus Pusat Yogyakarta dan Solo
Budi Rini	Malang
Budi Wanito	Solo
Darmo Laksmi	Salatiga
Jong Islamiyeten Bond Dames Afdeeling (JIBDA)	Jakarta, Tegal dan Yogyakarta
Jong Java	Yogyakarta, Jakarta dan Salatiga
Karti Woro	Solo
Kesoemo Rini	Kudus
Marging Kautaman	Kemayoran
Natdatoel Fataat	Yogyakarta
Panti-Krido-Wanito	Pekalongan
Putri Budi Sedjati	Surabaya
Putri Indonesia	Yogyakarta dan Surabaya
Rukun Wanodiyo	Jakarta
Santjaya Rini	Solo
Sarekat Islam Bagian Istri	Surabaya
Wanita Katholik	Solo dan Yogyakarta
Wanita Kencono	Banjarnegara
Wanita Utomo	Yogyakarta
Wanita Muljo	Yogyakarta
Wanita Sedjati	Bandung
Wanita Taman Siswa	Yogyakarta

Sumber : Susan Blabkburn, 2007: xxv

Berdasarkan catatan dalam kongres, terdapat 30 organisasi yang mengirimkan utusan perwakilan, namun pada kenyataannya berbeda, seperti tertera di tabel 1 kehadiran berasal dari organisasi yang sama, namun dari cabang yang berbeda. Selain itu, dari jumlah organisasi yang hadir dalam kongres, masih belum seluruhnya dapat mewakili organisasi perempuan di seluruh wilayah Indonesia, karena dominannya peserta dari Pulau Jawa (Blackburn, 2007: xxii-

xxvii). Hal ini sejalan dengan pernyataan Ny. Hayyinah selaku sekretaris dalam kongres pertama, ia menyebutkan bahwa kongres digerakkan atas dasar cita-cita dari beberapa organisasi wanita Indonesia yang sedang tumbuh di pulau Jawa dan beberapa kota lainnya di Sumatera (Suara Muhammadiyah, No 24/69 tahun 1989: 10-11). Oleh sebab itu, kongres pertama tidak dapat mengklaim bahwa telah mewakili seluruh organisasi-organisasi perempuan.

Agenda pelaksanaan kongres diisi dengan pidato, berdasar pada mosi yang telah ditentukan dari masing-masing perwakilan utusan. Sebelum acara inti dimulai, kongres telah terlebih dahulu memberikan mosi untuk didiskusikan pada masing-masing organisasi, mosi tersebut menyangkut tiga permasalahan yakni : (1) Penyediaan sekolah khusus perempuan (2) Aturan talak dalam pernikahan (3) Aturan untuk menolong janda perempuan dan anak yatim (Karomatika, 2018: 54). Setiap organisasi akan menyampaikan pidato berkaitan dengan ketiga pokok permasalahan tersebut, untuk kemudian dibahas dan didiskusikan dalam beberapa persidangan.

Organisasi Aisyiyah menunjuk Siti Munjiah sebagai utusan perwakilan. Dalam pidatonya di hari Minggu tanggal 23 Desember 1928, Siti Munjiah berpidato dengan tema “Derajat Perempuan”, ia menjelaskan secara eksplisit bahwasanya pendidikan bagi perempuan amatlah dibutuhkan untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki (*dapat dilihat pada lampiran 4*). Kebodohan yang dialami oleh kaum perempuan dapat diatasi dengan mencari pengetahuan di sekolah. Siti Munjiah menyampaikan pandangannya tentang pendidikan dengan memberi contoh kemajuan di Barat. Ia menyebutkan bahwa kemajuan kebudayaan barat tidak sepenuhnya dapat ditiru, karena budaya barat tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang ke Timur-an. Karena, cara berpakaian bagi perempuan dinilai telah meninggalkan aturan sopan santun terutama memperlihatkan aurat. Selain itu, ia juga mengkritik adanya pemandian terbuka bagi kaum laki-laki dan perempuan yang dianggap dapat merusak moral para penerus bangsa. Kondisi tersebut mengharuskan kaum perempuan pribumi untuk tidak serta merta mengikuti budaya luar atau barat. Kemajuan pengetahuan dari Barat dapat diambil dan ditiru oleh penduduk pribumi dengan cara yang benar dan sebagaimana

mestinya. Pendekatan ini dianggap dapat meningkatkan derajat negara, namun yang terjadi banyak hal yang kurang bernilai cenderung ditiru. Siti Munjiah berharap agar bangsa Barat benar-benar dapat menjadi penuntun bagi masyarakat Indonesia untuk tidak pernah berhenti mencari ilmu pengetahuan (Suratmin, 1991: 176-178). Dalam pidato ini Siti Munjiah mewakili pandangan organisasi Aisyiyah terkait pentingnya pendidikan perempuan dan dihubungkan dengan nilai-nilai agama.

Organisasi Aisyiyah dalam kongres perempuan pertama tampak berperan cukup penting. Susunan kepengurusan kongres perempuan pertama menempatkan tiga perwakilan organisasi Aisyiyah yakni sebagai wakil ketua (Mundjijah) dan anggota (Hayinah dan Djohanah) (Karomatika, 2018: 92). Terpilihnya perwakilan tersebut, didorong oleh faktor telah lamanya Aisyiyah berperan aktif dan menjadi organisasi perintis berdirinya di kalangan umat Islam. Mengingat juga, tidak ada satu pun organisasi wanita yang secara aktif dan terorganisir berkecimpung dalam sosial kemasyarakatan (Suara Muhammadiyah, No 24/66 tahun 1986: 17). Karena itu, dalam Kongres Perempuan pertama tahun 1928 utusan dari organisasi Aisyiyah mendapat perhatian khusus, sebab pengalamannya dalam bergerak membina rakyat kalangan paling bawah.

Dalam kurun waktu sebelum Kongres Perempuan pertama tahun 1928 yaitu pasca berdirinya Aisyiyah tahun 1917, aktivitas organisasi tidak dapat dilepaskan dari usaha-usaha penyediaan pendidikan dan dakwah Islam. Namun, faktanya jauh sebelum berdirinya organisasi Aisyiyah, organisasi ini telah lebih dulu memulai aktivitasnya dengan memberi pendidikan bagi anak-anak perempuan. K.H Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan berperan aktif dalam mengadakan perkumpulan di Kauman guna mengajak anak-anak perempuan belajar pengetahuan umum dan agama, kelompok pertama yang ikut dalam pengajaran ini berasal dari putri-putri saudara Kiai Dahlan dan teman-temannya (Ro'fah, 2016: 29). Oleh karena itu seiring tumbuh dan berkembangnya Aisyiyah, pendidikan untuk kaum perempuan tidak pernah ditinggalkan.

Salah satu hasil kongres tahun 1928 yakni menuntut penambahan jumlah sekolah untuk perempuan. Menurut Hayyinah persidangan dalam kongres

menghasilkan beberapa keputusan penting : (1) mendirikan organisasi khusus bagi para wanita dengan nama Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), (2) berusaha terus menambah sekolah untuk putri, (3) berusaha agar gerak kepanduan putri selalu unggul, dan (4) menanggulangi perkawinan di kalangan anak-anak usia muda (Suara Muhammadiyah, No 10/76 tahun 1991: 37). Hasil kongres poin kedua, dikehendaki dengan mendirikan *studiefonds* untuk anak-anak gadis yang pandai tetapi tidak mampu, dan memperkuat pendidikan *padvindsterij* (kepanduan putri) (Suriani, 2018: 45). Bertambahnya jumlah sekolah khusus perempuan setelah kongres 1928, menghasilkan banyak perempuan terdidik (Suara Muhammadiyah, No 24/69 tahun 1989: 11). Hal ini menjadi sebuah langkah awal dalam mengembangkan status sosial perempuan.

Pada umumnya organisasi perempuan tahun 1920-an memandang pendidikan merupakan satu-satunya jalan keluar guna mencapai kemajuan dan memecah masalah keterbelakangan. Sehingga hal yang sama juga terjadi pada salah satu hasil kongres tahun 1928, yakni mendirikan sekolah bagi perempuan. Kondisi tersebut sejalan dengan pendidikan yang telah Aisyiyah berikan kepada anak-anak di kampung Kauman. Paham islam berkemajuan dan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan menimbulkan pembaharuan jenis-jenis kegiatan yang dijanjikan Aisyiyah, misalnya mendirikan lembaga pendidikan yang sifatnya terbuka bagi khalayak umum, sekolah tersebut diantaranya, taman kanak-kanak dengan nama TK Aisyiyah Busthanul Atfal (1919) dan Kweekschool Muhammadiyah Putri (1923) (Munfaizah, 2021: 57). Pada waktu itu, dua sekolah tersebut dikhususkan bagi pelajar-pelajar perempuan, meskipun pada perkembangannya TK ABA Aisyiyah meleburkan murid laki-laki dan perempuan.

BAB 6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Peranan Organisasi Aisyiyah dalam Bidang Pendidikan tahun 1917-1942 yang telah penulis jabarkan dalam bab 4 dan 5, maka dapat diperoleh kesimpulan yang sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Kondisi yang melatarbelakangi organisasi Aisyiyah memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan yaitu adanya dominasi adat dan agama, stratifikasi sosial, dan politik etis. Pada awal abad 19 pergerakan kaum perempuan masih terbelenggu dalam menentukan pilihan hidup dan berfokus menuntut persamaan hak. Berkembangnya budaya patriarki menganggap kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Sehingga berdampak pada terbatasnya akses pendidikan untuk kaum perempuan, hal ini didukung oleh tiga faktor diantaranya : *Pertama*, dominasi adat dan agama yang berkembang dalam masyarakat membuat kedudukan sosial kaum perempuan disepelkan. Dalam dominasi adat banyak masyarakat masih berpikiran kuno dan kolot, yang menyebabkan kaum perempuan dikurung didalam rumah ketika menginjak remaja, atau dapat dikatakan sedang menjalani proses "pingitan" hingga datang calon suami untuk menikahinya. Berbeda dengan adat, dominasi agama datang dari masyarakat yang mencampuradukkan ajaran islam (sinkretisme) dan masyarakat penganut islam tradisional khususnya di Kampung Kauman, yang mengisolasi diri dari pengaruh luar terutama pada sekolah-sekolah Belanda. *Kedua*, Stratifikasi sosial yang berkembang dalam masyarakat membuat lahirnya kelas-kelas sosial, berdasarkan atas kedudukan ataupun kekayaan yang dimiliki setiap individu. Hal ini menyebabkan masyarakat pribumi mengalami diskriminasi dalam beberapa bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Kebijakan pemerintah kolonial di bidang pendidikan menyatakan bahwa sistem persekolahan disusun berdasar pada perbedaan lapisan sosial di masyarakat. Sehingga membuat banyak anak pribumi tidak mendapat kesempatan menempuh pendidikan di sekolah.

Ketiga, politik etis, khususnya dalam bidang pendidikan, dimana politik etis ini semakin memperlihatkan ketimpangan perolehan pendidikan antara kaum laki-laki dan perempuan. Politik etis yang berkembang dalam masyarakat melahirkan sekolah-sekolah yang di khususkan bagi laki-laki, karena motif pendidikannya hanya bertujuan guna memperoleh tenaga kerja terdidik dan murah. Sehingga pendidikan untuk kaum perempuan tidak mendapat perhatian pemerintah kolonial. Ketiga faktor inilah yang mendorong organisasi Aisyiyah untuk secara nyata bertindak dalam memperjuangkan pendidikan bagi anak-anak pribumi, khususnya kaum perempuan.

2. Peranan Organisasi Aisyiyah dalam Bidang Pendidikan. Tindakan dan usaha yang dijalankan organisasi Aisyiyah untuk meningkatkan pendidikan bagi kaum perempuan tahun 1917-1942 adalah : (a) mendirikan dan mengurus lembaga pendidikan yakni TK Aisyiyah Bustanul Athfal dan Kweekschool Muhammadiyah Istri, organisasi Aisyiyah berperan dalam memberikan pendidikan yang menekankan pada keseimbangan antara pendidikan modern dan agama, yang secara nyata dikhususkan bagi anak-anak perempuan pribumi dengan kualifikasi belum mendapat akses pendidikan. (b) Membentuk organisasi pelajar perempuan di beberapa wilayah cabang organisasi Aisyiyah. Pembentukan *Siswo Proyo Wanito* atau *Nasyiatul Aisyiyah* merupakan sarana untuk menampung dan mewadahi aktivitas dan kreativitas para remaja putri baik dibidang kognitif ataupun afektifnya diluar jam sekolahnya. (c) Terlibat dalam Kongres Wanita Indonesia Pertama tahun 1928, dari kongres ini organisasi Aisyiyah berhasil menyampaikan pandangannya terhadap pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan, dengan bukti nyata bahwa salah satu keputusan kongres adalah menambah sekolah khusus putri yakni mendirikan *studiefonts*.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang peranan organisasi Aisyiyah dalam bidang pendidikan maka, penulis menyajikan beberapa saran diantaranya:

1. Bagi mahasiswa pendidikan sejarah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber rujukan tambahan terkait peran organisasi Aisyiyah dalam meningkatkan pendidikan kaum perempuan
2. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru terkait peranan organisasi Islam pertama, yang memiliki perhatian khusus terhadap pendidikan kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- _____. 1982. *Adabul Mar'ah Fil Islam*. Yogyakarta: Majelis Tarjih P.P Muhammadiyah.
- _____. 1935. *Boeah Congres Ke 24*. Hoofdeomite Congres Moehammadijah.
- _____. 1936. *Congres Moehammadijah Seperempat Abad*. Hoofdeomite Congres Moehammadijah.
- _____. 1937. *Boeah Congres Ke 26*. Hoofdeomite Congres Moehammadijah.
- Abdurahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Adiwikarta, S. 2016. *Sosiologi Pendidikan: Analisis Sosiologi Tentang Praksis Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Amini, M. 2021. *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia (1928-1998)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Blackburn, Susan. 2007. *Women and the state in modern Indonesia*. New York : Cambridge University Pess.
- Darban. A. A. 2010. *Aisyiyah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia: Sebuah Tinjauan Awal*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Darban. A. A. 2010. *Sejarah Kauman Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Sura Muhammadiyah.
- Djumhur & Danasuparta. 1976. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV. Ilmu Bandung.
- Fakhruddin, R.A., et al.. 2005. *Akhlaq Pemimpin Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Furnivall, J. S. 2009. *Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute
- Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya

- Ghazali, M. 2002. *Perempuan-Perempuan Pemburu Surga (Menyibak Rahasia Kejayaan Aisyiyah)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Gottschalk, Louis. 2015. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Kartono, Kartini. 1997. *Tujuan Pendidikan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kuntowijoyo. 2013. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Makmur, Djohan., et al. 1993. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: CV. Manggala Bhakti.
- Marwati, Djoened. P & Nugroho N. 2009. *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (1900-1942)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Meerkerk, E. V. N. 2019. *Women, Work and Colonialism in the Netherlands and Java Comparisons, Contrasts, and Connections, 1830–1940*. Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Mu'arif & H. N. Setyowati. 2014. *Srikandi-Srikandi Aisyiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Mu'arif & H. N. Setyowati. 2020. *Covering Aisyiyah: Dinamika Gerakan Perempuan Islam Berkemajuan Periode Awal*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mu'arif. 2012. *Modernisasi Pendidikan Islam (Sejarah Perkembangan Kweekschool Moehammadijah 1923-1932)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nakamura. M. 1983. *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin: Studi tentang pergerakan Muhammadiyah di Kotagede Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, S. 2014. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Niel, R.V. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Nina, H. Lubis. 1998. *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Oktavinuri, D. 2018. *Politik Etis dan Pergerakan Nasional*. Kalimantan Barat: Derwati Press.

- Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah. 2016. *Tanfidz Keputusan Mukhtamar Nasyiatul Aisyiyah Ke XIII*. Yogyakarta : Gramasurya.
- Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah. 2022. *Tanfidz Keputusan Mukhtamar Nasyiatul Aisyiyah Ke XIV*. Bandung.
- Ricklefs, M. C. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ro'fah. 2016. *Posisi dan Jatidiri Aisyiyah: Perubahan dan Perkembangan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Simbolon, Parakitri T. 2006. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Sjamsudin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Soekanto, S. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemanto, W. & Soeyarno, F. X. 1983. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemarsono, Moestoko. 1985. *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suhardono, S. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumbulah, U. 2008. *Gender dan Demokrasi*. Malang: Program Sekolah Demokrasi Placid's dan Averroes Press.
- Suminto, Aqib. 1986. *Politik Islam Hindia-Belanda: het Kantoor voor Inlandsche zaken*. Jakarta: LP3ES.
- Suratmin. 1991. *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*. Jakarta: Depdikbud.
- Suswandari., et al. 2020. *Perjalanan Sejarah TK ABA di Indonesia (1919-2019)*. Malang: UMM Press.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: University Press.
- Vreede-De Stuers, C. 2017. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Depok: Komunitas Bambu.
- Wieringa, S. E. 1999. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya dan Kalyanamitra.

Yudi, Latif. 2012. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yusup. Yunan., *et al.* 2005. *Ensiklopedi Muhammadiyah*. Jakarta: PT Grapindo Persada.

Skripsi

Cahyani, S.T. Fheny. 2015. Perjuangan Organisasi Perempuan Indonesia Menuntut Hak Pendidikan Pada Masa Kolonial Belanda 1912-1928. *Skripsi*. Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Halilurrahman. A. 2013. Peranan Muhammadiyah dalam Bidang Pendidikan Tahun 1912-1950. *Skripsi*. Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Heru, F. S. Sofyan. 2014. Sistem Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1900-1942. *Skripsi*. Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Karomatika, Ayu. I. 2018. Kontribusi 'Aisyiyah dalam Konggres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lestari, A. P. D. 2019. Peranan Organisasi Aisyiyah dalam Pemberdayaan Perempuan di Jawa Tahun 1917-1945. *Skripsi*. Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Munfaizah, F. A. 2021. Peranan Siti Walidah dalam mengembangkan Organisasi Aisyiyah pada Tahun 1921-1927. *Skripsi*. Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Priatna, Esa. A. 2021. Civil Society dan Pendidikan Politik Perempuan: Studi atas Peran Pimpinan Pusat Nasyyatul Aisyiyah dalam Pendidikan Politik Perempuan. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rachmadanty, A. 2016. Kebijakan Politik Asosiasi Pendidikan Kolonial Terhadap Umat Islam Tahun 1890-1930. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Trimurtini, Winingsari. 2015. Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 di Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Yuliawati, Ida. 2005. Sejarah Organisasi Aisyiyah Dan Peranannya Dalam Pengangkatan Derajat Kaum Wanita Di Semarang Tahun 1967-1997. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sejarah.

Artikel

- Abdullah, Aznar. 2017. Ethical Politic and Emergence of Intellectual Class. *Paramita: Historical Studies Journal*. 27(1): 37-49.
- Aeni, A, D. & M. H. Fachrurozi. 2022. Gerakan Emansipasi Perempuan dalam Bidang Pendidikan di Jawa Barat Pada Awal Abad Kedua Puluh. *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*. 5(1): 45-57.
- Afandi, N. A., et al. 2020. Pendidikan Pada Masa Pemerintah Kolonial di Hindia Belanda Tahun 1900-1930. *Jurnal Artefak*. 7(1):21-30.
- Amini, M. 2020. To Be an Islamic Female Leader: The Education System at the Madrasah Muallimaat Muhammadiyah. *Proceedings of the International Conference On Social Studies, Globalisation And Technology (ICSSGT 2019)*.458: 161-168.
- Amini, M. 2021. Aisyiyah and The Problem Of Women's Social Movement In Indonesia: A Historical Perspective. *Journal Of Aisyiyah Studies*. 1(1): 35-50.
- Astuti, D. R. & Kistanto, H, N. 2022. Tradisi 3M Masyarakat Jawa menurut Perspektif Gen Z Kajian: Feminisme. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. 7(1): 49-54.
- Cahyani, S.T.F. Swastika, K., & Sumarjono. 2015. Perjuangan Organisasi Perempuan Indonesia Menuntut Hak Pendidikan Pada Masa Kolonial Belanda 1912-1928. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. 1(1): 1-14.
- Diniyanti. R. 2020. Potret Gerakan Perempuan pada Abad Ke 20 di Batavia: Poetri Mardika 1912. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*. 3(2): 135-144.
- Ernas, Saidin. 2019. Pandangan Sonouck Hurgronje Tentang Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia. *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*. 12(02): 130-142.
- Fachrurozi, H. M. 2019. Politik Etis dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputra. *Bihari: Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*. 2(2): 13-25.
- Imsawati, N. D., et al. 2017. The Intellectual's Contribution In The National Movement Of In Indonesian 1908-1928. *Jurnal Historica*. 1(2): 277-292.
- Kamphuis, Kirsten. 2020. Education, Labour, and Discipline: New Perspectives on Imperial Practices and Indigenous Children in Colonial Asia. *Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis*. 1-14.

- Listiana, H. 2015. Lembaga Pendidikan Islam Akhir Abad XX : Studi Pendidikan Muhammadiyah, Sekolah Umum Plus dan *Boarding School*. *Tadris*. 10 (2): 231-250.
- Nasution, S. 2016. Strategi Pendidikan Belanda Pada Masa Kolonial di Indonesia. *Ihya Al-Arabiyah*. 2(2) : 254-258.
- Pradita, S. M. 2020. Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Abad 19-20: Tinjauan Historis Peran Perempuan dalam Pendidikan Bangsa. *Chronologia*. 2(2): 12–27.
- Qodariah, L. 2017. Dinamika Organisasi Aisyiyah dalam Memperjuangkan Misi Pendidikan Dan Perubahan Sosial Bagi Kaum Perempuan. *Prosiding Seminar Nasional Berseri*. 1(1): 153-179.
- Remiswal., S. Fajri, & R. Putri. 2021. Aisyiyah dan Peranannya dalam Meningkatkan Derajat Kaum Perempuan. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*. 4(1): 71-77.
- Scholten, E. Locher. 2003. Morals, Harmony, and National Identity: Companionate Feminism in Colonial Indonesia in the 1930s. *Journal of womans History*. 14 (4) :38-58.
- Seniwati & Lestari, D. T. 2019. Sikap Wanita Muslim Kauman: Kajian Peranan Aisyiyah Dalam Kebangkitan Wanita Di Yogyakarta Pada Tahun 1914-1928. *Walasuji*. 10(2): 219-232.
- Sujati, B. & I. F. Haq. 2020. Gerakan Perempuan di Jawa (1912-1941). *Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*. 2(1): 16-31.
- Sulastri, S & H, Husin. 2017. Kapas, Kain, dan Seragam Sekolah di Jawa 1900-1942. *Sosio-E-Kons*. 9(1) : 65-78.
- Sungaidi. Muhammad. 2017. Aisyiyah Organisasi Perempuan Modern. *Jurnal Manajemen Dakwah*. 3(1): 34-43.
- Suriani. 2018. Dari Modernitas Hingga Poligami : Pemikiran Ani Idrus. *Jurnal Humanisma : Journal of Gender Studies*. 2 (1): 45-54.
- Susilo, A & Sarkowi, 2018. Peran Guru Sejarah Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Arus Globalisasi. *Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*. 2(1): 43-50.
- Zamzami, Rizal. 2018. Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada Masa Penembahan Senapati 1584-1604. *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*. 2(2): 154-165.

Zuhriyah. L. 2018. Perempuan, Pendidikan dan Arsitek Peradaban Bangsa.
Martabat : Jurnal Perempuan dan Anak. 2 (2) : 249-268.

Majalah

_____. 1937. *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*.
 Drukkerij Volkslectuur, Weltevreden.

Suara Muhammadiyah. 1986. Majalah Bulanan. No 24-66. Yogyakarta: Pimpinan
 Suara Muhammadiyah

Suara Muhammadiyah. 1989. Majalah Bulanan. No 24-69. Yogyakarta: Pimpinan
 Suara Muhammadiyah.

Yayasan Penerbit Pers 'Aisyiyah. 1927. Soeara 'Aisjijah : madjallah woelanan.
 Djogjakarta: Moehammadijah Bg. 'Aisjijah.

Suara Aisyiyah. 1967. Majalah Bulanan. Yogyakarta: Pimpinan Suara Aisyiyah.

Soeara Aisjijah. 1931. Madjallah Woelanan Moehammadijah Bg, Aisjijah. No. 1-
 12 Djogjakarta.

Soeara Aisjijah. 1932. Madjallah Woelanan Moehammadijah Bg, Aisjijah. No. 1-
 3 Djogjakarta.

Suara Muhammadiyah. 1986. Majalah Bulanan. No 7-66. Yogyakarta: Pimpinan
 Suara Muhammadiyah

Suara Muhammadiyah. 1991. Majalah Bulanan. No 10-76 tahun 1991.
 Yogyakarta: Pimpinan Suara Muhammadiyah.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Penelitian

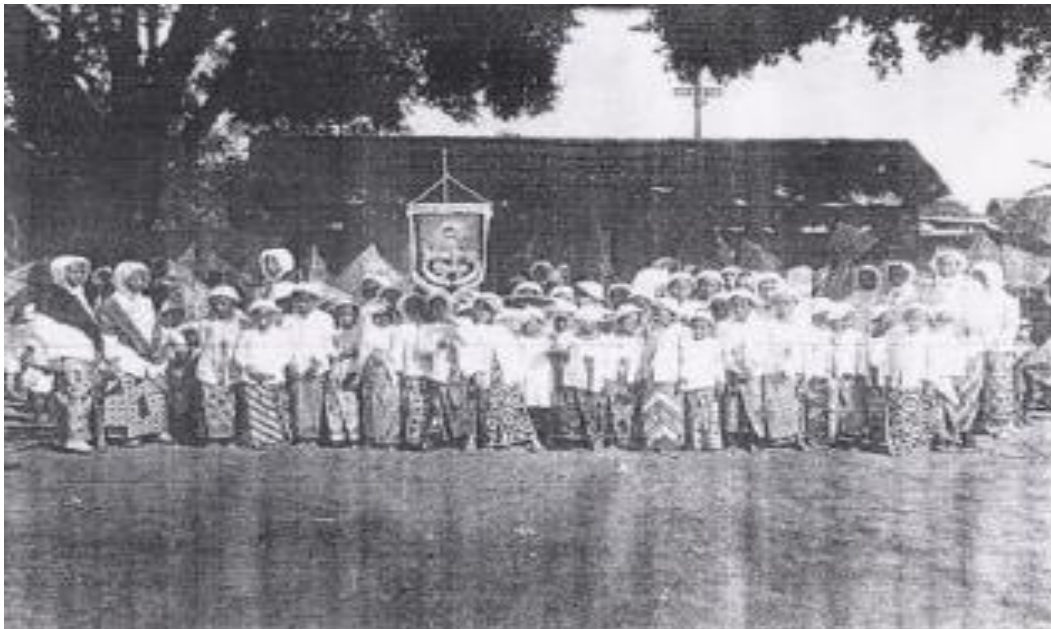
Tema Penelitian	Judul	Jenis dan Sifat Penelitian	Permasalahan	Sumber Data	Teknik Analisis Data
Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia	Peranan Organisasi Aisyiyah dalam Bidang Pendidikan 1917-1942	1. Jenis Penelitian : Penelitian Sejarah 2. Sifat Penelitian : Penelitian Kepustakaan (Studi Literatur)	1. Mengapa organisasi Aisyiyah memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan pada tahun 1917-1942? 2. Bagaimana tindakan organisasi Aisyiyah dalam memajukan pendidikan bagi perempuan pada tahun 1917-1942?.	1. Sumber Primer : Majalah (Soeara Aisyiyah dan Soeara Muhammadiyah) dan Buku 2. Sumber Sekunder : Buku penunjang 3. Dokumen dan jurnal-jurnal ilmiah 4. internet	a. Metode Penelitian Sejarah dengan langkah-langkah: <ul style="list-style-type: none"> • Heuristik • Kritik • Interpretasi • Historiografi b. Pendekatan : Sosiologi Pendidikan (Lester Frank Ward) c. Teori : Teori Peran (Soerjono Soekanto)

Lampiran 2. Foto Para Penggerak Aisyiyah Memakai Kerudung Tahun 1928



Sumber : Arsip Foto Pimpinan Ranting Aisyiyah Kauman dalam Seniwati & Lestari, 2019.

Lampiran 3. Murid-Murid TK ABA Memakai Baju Adat Jawa dan Berkerudung



Sumber : Suswandari., et all. 2020. Perkembangan TK ABA Tahun 1919-2019.

Lampiran 4. Pidato Utusan Organisasi Aisyiyah di Kongres Pertama tahun 1928

PIDATO PERUTUSAN AISYIYAH PADA
KONGRES PEREMPUAN INDONESIA YANG PERTAMA
22 – 25 DESEMBER 1928 DI YOGYAKARTA.

DERAJAT PEREMPUAN

(Pidato Nyonya Siti Moendjijah, Anggauta Pengurus Besar Muhammadiyah bagian Aisyiyah Yogyakarta, pada sidang terbuka Congres Perempuan Indonesia di Mataram Tanggal)

Salam dan bahagia mudah-mudahan tetap pada junjungan kita K. Nabi Muhammad SAW, kepada nyonya-nyonya dan tuan-tuan, dan kepada sekalian pengikut-pengikutnya. Lebih dahulu saya mengenalkan diri bahwa saya Siti Moendjijah, salah seorang anggauta pengurus besar Muhammadiyah bagian Aisyiyah di Jogja. Besar harapan saja bahwa dengan perkenalan ini dapatlah agaknya menjadi langsung.

Kemudian daripada itu maka sekarang mulailah saja membicarakan beban saya seperti yang sudah termaktub dalam agenda no. 4, ialah atas opdrachtnya pengurus besar Aisyiyah.

Nyonya voozitster yang terhormat,

Banyak terima kasih saya ucapkan dengan penuh-penuh atas kemoerahan nyonya, bahwa nyonya sudah mengidzinkan pidato saya ini, dan kepada yang hadir saya pun meminta banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya mendengarkan.

Ini hari, kegembiraan hati saya tidak akan ternilai dengan apa pun jua, sebab itu tidak putus-putus saya bersyukur kehadiran Tuhan semesta 'Alam. Dengan adanya gerakan ini, maka mulai sadar dan bangunlah bangsa kita perempuan Indonesia dari tidurnya yang nyenyak; secara yang berderu-deru senantiasa berhampiran dengan telinga mereka, dan memang sudah waktu kita kaum perempuan mulai maju selangkah kedua seterusnya, sebab matahari sudah terbit menyinari yang sangat

sulau. Mereka bangkit kalau-kalau ketinggalan untuk mencapai kemajuannya. Dengan ini maka timbul duka citanya dengan kemajuannya. Dengan ini maka timbul duka citanya dengan ihtiar sehingga dapat mengadakan congress ini hari.

Ini hari, adalah yang pertama kali dari congressnya kaum kita perempuan Indonesia, yang oleh mereka itu sudah memberanikan diri meninggalkan suaminya, anak, sanak saudara rumah, pekerjaan dan lain-lainnya, hanya untuk mengunjungi ini rapat besar yang menundingkan beberapa keperluan-keperluan untuk hidup bersama. Buat diri saya ini adalah suatu hal yang tidak sedikit harganya lebih-lebih dengan adanya ini Congress maka kenalan saya bertambah banyaklah jumlahnya buat pertama kali, Congress kita ini masih serba kuciwa, karena dari persediaan-persediaan kita yang masih lebih jauh kurangnya itu.

Soedah sementara lama kami, dari kaum Aisyiyah senantiasa memfikir-fikirkan bilakah kita kaum perempuan Indonesia dapat beramah-ramahan untuk merundingkan sesuatu masalah bagi keperluan kita bersama. Ini hari cita-cita itu terkabullah, dan oleh karenanya maka tidaklah habis-habis kami mensyukur kepada Allah hubaya-hubaya akan gerakan itu dapatlah diperpanjang usianya dengan banyak buah usahanya. Halaman penghambatan yang merugikan terbebaslah, dan terluput dari segala gangguan yang menjerumuskan.

Penuh kepercayaan kami, bahwa nyonya-nyonya utusan dari berbagai-bagai perkumpulan yang sudah mempunyai organisatie baik atau peraturan rumah tangga molek niscaya sudah bersedia-sedia betapakah ikhtiar kita, supaya kita kaum perempuan dapat dipertinggi derajatnya tertimbang dengan sekarang ini, dan bahwasannya kita dapat menetapi segala sesuatu kewajiban yang bertali dengan hak kita perempuan. Hal ini tentulah nyonya-nyonya rasanya sudah lengkap sebab sudah berkemas dari mulai dari rumah masing-masing.

Pidato saya ini adalah suatu pertimbangan yang saya sajikan kepada nyonya-nyonya, dengan sangat saya hampar moga-

moga dalam pada mendengarkannya, djanganlah dipandang seperti pidato yang terasing di dengarnya, melingkar pandanglah atas nyonya punya pidato sendiri, begitulah dengan sebaliknya.

Ingat, pada galibnya kepada barang siapa yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan mulia itu mungkin tercapai manakala liat ototnya, dengan singkat bersabar tawakal dan suka bekerja untuk mencapai ini maka bekalnya ialah :

Hendaklah kita mengekalkan baris persaudaraan dengan kokoh. Seungguhnya, demi syaitan itu mengetahui bahwa kita dalam persaudaraan itu sangat rapatnya, maka bukan main ihtiar si syaitan itu akan memisah persatuan, sebab itu wadajib kita ingat djangan sampai terjadi bertjerai-berai atas gangguannya. Buat menolak itu maka ikhtiarnya :

- a. Rajin mengusahakan diri mencari obat dengan tidak memilih-milih ilmu pengetahuan, banyak tauladan, dan lebar pemandangannya;
- b. Bekerja dengan sabar artinya tidak jemu melakukan sesuatu pekerjaan itu dengancerdik dan berati-ati.

Semua itu hendaknyalah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh lagi bijaksananya. Sesuatu usaha melakukan pekerjaan bila mengabaikan kesungguhan hati, bidjaksana dan suci, maka jangan mengharap akan berhasilnya, lebih-lebih bila hanya dikerjakan dengan sesuka-suka dan dipermudah.

Gelagat dunia yang sekarang ini sudah ketara mulai "Duka tjita dan Bekerdja" boleh dikata seperti menanam padi yang dalam; Sungguh, belumlah sampai apda waktunya kita berse-nang-senang, mendiamkan diri, enak-enak dan merenung.

Saudara-saudara, tunggulah sementara waktu dengan kesabaran hati, apabila kita bersungguh menyampaikan segala maksud itu dengan tidak jemu, sebentar kita akan memetik buah usaha kita itu.

Conggres, nyonya-nyonya dan tuan-tuan yang terhormat,

Pada hemat adalah tingkat "Kemuliaan = Kederadjatan" itu terbagi jadi tiga bagian :

1. tinggi budinya

2. banyak ilmunya dan
3. baik kelakuannya.

Konon sekiranya kita dengan sesama memeriksa buku-buku tambo Dunia, maka lantastlah dapat mengerti dengan sendiri sampai kemanakah derajat kta perempuan itu. Sebagian besar dari bangsa-bangsa itu berkepercayaan bahwa bangsa kami itu adalahhamba Tuhan yang sangat aripada manusia biasa, sehingga dipandangnyanya seperti hewan belaka. Dengan begitu maka sudah selayaknya bahwa bangsa kami perempuan itu wajib menurut dan setia barang apa yang diperintahkan oleh orang lelaki.

Pada zaman dahulu kita di Japan orang-orang perempuan dilarang keras berbakti kepada Allah, melakukan sesuatu pekerjaan yang sicipun dicegahnya, sehingga agamanya pun melarang tentang hal ini. Di negeri Cina djuga seperti itu, malah-malah buat masuk ke candinya dilarang juga.

Pun di Sindustan tidak akan suka ketinggalan, setali tiga uang. Dalam agama Hindu diterangkan, bahwa orang perempuan bangsa kami itu tidak suci; mereka dilarangnya dengan kuat-kuat tidak diperkenankan meremuk tentang seluk-beluknya kitab suci, dan apabila ia berani memegang salah satu. Artinya yang menjadi sesembahannya, maka dengan seketika itu juga dirusaknya itu arca (berhala).

Di tanah Arab ada lebih sekali penghinaan dan perendahan ini, ialah sebelum agama Islam lahir di dunia. Orang-orang perempuan bangsa kami, dipandangnyanya lebih rendah dari pada hewan pelihara'annya, anak-anaknya perempuan yang dilahirkan dari kandungan ibunya dengan hidup-hidup sampai mati membunuhnya, sebab dipandangnyanya tidak berfaedah sekalipun, dan membanyakkan beban makanannya. Orang perempuan memang tiada memunyai kekuatan seperti orang laki-laki, pada hal waktu itu dimusimnya orang-orang Arab sangat gemar membunuh, merampas lain orang punya hak, dan sangat kedjam hatinya.

Lima puluh tahun sebelum agama Islam adalah suatu pertanyaan yang sangat menghiraukan, yaitu adalah orang pe-

rempuan itu juga berjiwa? Waktu orang-orang Kristen membuat rapat di Maccon, salah seorang pendeta bernama Bischof bertanya : Termasuk golongan manusiakah orang-orang perempuan itu?

Dengan pertanyaan yang kemudian itu maka riuhlah orang membincangkannya, yang kemudiannya sebagian besar dari anggota rapat itu menetapkan bahwa orang-orang perempuan itu pun termasuk bangsa "Manusia" juga.

Salah seorang yang mengaku dirinya suci di . . . telah berkata : perkakas Syaitan (The Organ of the devil). Kaladjengking yang hendak mengigit. Pintu jalan masuknya Syaitan, dan jalan akan terdjerumus kedosaan (The gate of the devil, and the road of iniquity).

Ular Kisi jang menabur bisa, dan Naga yang sangat menakutkan.

Pesawat dari Syaitan untuk mengambil jiwa kita.

Untung benar bahwa orang-orang yang bangsawan fikiran sudah bernasehat pada kita jalan : S.T. Bernard, S.T. Anthonij, S.T Cijprian.

Adat istiadat orang mempeleikan ada di tanah Europa, maka profesor Holland bersabda demikian : Bahwa faedahnya orang berlaku bini itu ialah hendak mempersatukan diri antara orang lelaki dan perempuan, dan yang akan mengikat kerukunan antara satu sama lain dengan kokoh. Dalm pada perseroan itu maka adalah hak yang lebih besar atasnya ada pada fihak lelaki; si istri tidak berhak menjual atau lain-lainnya atas harta benda, dan tidak berkuasa membuat sesuatu wasiyat, atau membuat sesuatu perjanjian (contract) atas tanggungannya sendiri.

Undang-undang hukum yang menentukan bahwa fihak istri tidak berhak sesuatu apa itu pada galibnya berlaku di negeri Inggris.

Tuan Hepworth berkata demikian : Peraturan-peraturan yang sudah lazim kita jalankan itu, maka si istri adalah dalam penguasanya suaminya. Oleh krena itu walaupun orang perempuan yang masih muda, suci, cantik dan yang kaya sekalipun mungkin menjadi genggamannya seorang suami yang kejam. . .

Timbulnya keadaan-keadaan ini semua asal mulanya dari pengajarannya pemimpin-pemimpin bangsa barat. Serentak kaum perempuan terasa akan berat baeban penghidupannya lantaran dari tindesan, semena-mena, perendahan dan lain-lain sebagainya djuga, tidak berhak atas barang hartanya mereka punya waris, maka bangkitlah hatinya bergerak hendak menuntut haknya "Derajat Perempuan".

Mereka kaum perempuan itu berfikir, bahwa yang menyebabkan haknya hina-hina itu lantaran bodoh. Baiklah sekarang kami bergerak maju mentjari pengetahuan dengan bersekolah, dan bahwasannya perempuan itu sama saja dengan haknya lelaki.

Dengan keadaan-yang demikian itu maka tercapailah maksudnya menuntut pengetahuan itu, dan sungguh benar perempuan zaman sekarang banyak yang pandai-pandai lantaran dari belajar di sekolah-sekolah. Hanya sayang sekali, bahwa mereka itu tidak dapat menggunakan kepandaiannya itu dengan seperti, malah lebih-lebihan dari batasnya. Boleh jadi hal ini tersebut dari kepayahan hidupnya, lantas dapat senjata untuk menjadi penawar.

Kemajuan perempuan pada akhir-akhir ini sudah melebihi dari kodratnya, ta'kan tertemu dengan sifat keperempuannya, sebagian dari kemajuan itu maka mereka lantas bekerja ada di pabrik, mendjalankan spoor, motor terbang, dan lain-lain malah ada yang menjadi kampiun gelut, gontokan, hingga menyebrang lautan akan mencari tandingannya. Dengan begitu maka sudah barang tentu abadinya kentara keras-keras dan ototnya pun melotot dengan sendirinya. Dalam pada itu mencari tanding itu maka maksudnya mencari uang semata-mata.

Tidak saja demikian kemajuannya, tapi sekarang ada yang model baru yakni potong rambut presis seperti orang laki, juga pakaiannya sudah merata banyak yang memakai cara orang lelaki, dengan singkat maka kemajuan perempuan pada galibnya tidak suka dengan lelaki, baik sebarang apa saja, sehingga sifat keperempuannya tidak lagi tampak!

Saudara-saudara.

Adakah keadaan yang demikian itu sudah sesuai dengan kemajuan perempuan, terutama bagi kaum dan bangsa kami perempuan Indonesia yang sebenar-benarnya? Demikianlah pemandangan ini yang pertama kali dan yang kedua kali datang lah sekarang saja membicarakan tentang perceraian.

Congres yang terhormat,

Sulit benar hendaknya merundingkan tentang soal perceraian, apakah sebabnya hal ini sering kejadian. Salah satu sebabnya yakni : bahwa antara lelaki dengan istri berpisah; satu dengan lainnya belum pernah lihat; pada waktu dipelaikan dengan tidak usah ditanya-tanya, lantas dipaksa saja oleh orang tua atau walinya. Dengan inilah yang agaknya menjebabkan mereka itu bergerak mencari pergaulan yang merdeka antara lelaki dengan perempuan dengan iktiar apa saja yang dapat menjampai maksudnya, karena pada fikirannya bahwa dengan "vrije omgang" ini maka niscaya si laki dan si perempuan akan terang dapat melihat paras masing-masingnya, juga tentang peri adat kelakuannya niscaya tiada tertutup-tutup sehingga dengan ini maka mungkin langsung ya berhubungan bersuami istri dengan tidak akan tertemu perceraian.

Dengan leluasa menuruti hawa nafsunya sehingga mereka membuat tempat permandian, di mana pada tempat dimerdikakan orang lelaki dan perempuan berkunjug duyun-duyun mandi jadi satu dengna memakai pakaian yang sangat merdika pula yang oleh orang barat dinamai Badcostum. Dan bagaimana kah pakaian hari-hari yang merdika itu pakai? O, soungguh sangat cukup akan model-modelnya pakaian apa saja ada. Sebentar-sebentar tanti dengan mode yang bertentangan atas keperempuannya. Pakaiannya terbuka-buka meliputi urutannya, yang atas diturunkan dan yang bawah ditarik mengatas, lengan badjunya tidak pula menjadi soal penutupan malah-malah dipotong sama sekali.

Inilah, bahwa bagi nyonya-nyonya terutama pemimpin di Indoneia sayogiyannya memperhatikan benar jangan sampai cara yang demikian itu menjalar di tanah kita Indonesia.

Mereka bangsa Eropa berfikir, bahwa dengan cara yang demikian itu maka mungkinkah akan tidak bercerai dengan suaminya.

Surat chabar Natal Advertiser di Amerika yang terbit pada hari 16 bulan April 1926 ada memuat statistik dari buah penanya tuan (Rt. Rev) L.W.T. Manning, bishop (Penghulu dari agama Christen) di New York menerangkan : Bahwa sekarang ini di United States (Amerika) itp-tiap orang berlaki-istri 7, ada satu yang bercerai. Di Tokyo tiap-tiap 5, satu yang bercerai. Di Teas tiap-tiap 3,9 djuga ada satu. Di Oregon tiap-tiap 2,6 ada satu yang bercerai. Di kota Nevada dalam satu tahun ada orang 800 yang dipelaikan, dan seribu yang bercerai. Surat kabar Deily Express yang terbit pada hari 27 bulan Nopember 1926 memuat statistik yang disiarkan oleh departemen of Commerd (Kantor besar pengurus perniaga'an) menerangkan bahwa di Amerika tiap-tiap 13 orang berlaki istri ada 2 yang maju ke hadapan majelis pengadilan untuk minta cerai.

Demikian kisah yang telah terjadi dari golongan perempuan Barat.

Keadaan-keadaan yang begini rupa bagi kita kaum perempuan dan terutama pemimpin-pemimpin Indonesia adalah suatu kewajiban yang berat, yang harus diamat-amati benar-benar, dan yang tidak boleh abaikan atas tanggungan kita.

Gedang artinya dan tidak dinilai harganya. Kongres kita perempuan Indonesia ini bahwa dengan dia niscaya keadaan -keadaan yang sangat mungil bagi kita itu dapatlah agak ter-tolak!

Mudah-mudahan Allah menolong kita tercapailah tujuan dan maksudnya Congres ini agar supaya kelak hari bangsa kami, perempuan mulia dan tinggi martabatnya, Amin.

Sesungguhnya bangsa kita ini sudah punya sendiri adat istiadat dan kelakuan (kasusilan Jav) yang alus, yang agaknya tidak akan kalah dengan kebarat-baratan dan lain-lain bangsa.

Akan tetapi lantaran terdorong dari pengaruh peredaran dunia yang pada sangkanya molek, permai, berkilau-kilau dan sebagainya, istimewa pula menang maka tergelincirlah keadaan bangsa kita Ya barang siapa yang baru ketempatan, maka tidak orang serba apa saja niscaya jelek, hina-dina dan tidak menarik penglihatan.

Bukan maksud kami bahwa semua kemajuan bangsa Eropa itu tidak seharusnya dicontoh, itu tidak : sebab diantaranya ada pula yang patut kita tiru. Kita wajib memilih mana yang baik dan layak kita tiru, dan mana pula yang tidak pada kepautan semua itu dengan jalan yang dingin, tenang dan berfikir. Kemajuan bangsa barat menuntut ilmu pengetahuan adalah satu-satunya kemajuan yang tidak boleh kita bangsa Indonesia mencontohnya dengan bulat-bulat. Pada suatu maksud yang belum tercapai maka tidaklah ia suka memberhentikan diri melainkan terus menerus dicarinya hingga dapat, dan sekiranya sudah terdapat maka lantas dijalankan sebagaimana mestinya. Inilah ada sifat mempertinggi derajat bangsa! Bagi bangsa kita perempuan Indonesia tidak demikian halnya, ada pada kebalikannya itulah yang nyata dan hanya hal-hal yang kurang berharga itulah ditirunya seperti apa yang sudah kami uraikan di atas tadi.

Besar pengharapan kami moga-moga menjadi tuntunan bagi bangsa kita akan kemajuan mencari ilmu pengetahuan baik dimana saja tidak takut jerih lelah, berani menempuh sesuatu maksud yang mulia walaupun hingga pada jangka usianya, bekerja mencari hasil (berniaga) dengan kuat-kuat tidak takut rugi. Inilah yang harus kita perhatikan, supaya dengan kekuatan hati teguh itu maka cacatlah agaknya bangsa kita menjadi bangsa yang tidak rendah dan tidak pula menjadi miskin.

Belum kita dengar bahwa bangsa kita Indonesia yang sudah banyak jadi professor; paling tinggi pada abad ini hanya Mr. Dr. Ir. dan bangsa kita itu kalau berdagang kuatir rugi. Bilakah dapat kita menjadi mulia, sekiranya perasakan yang demikian itu masih terletak dalam sanubari bangsa kita, ini untuk kaum lelaki.

Congres, nyonya-nyonya dan tuan-tuan yang terhormat, Sekarang sampailah pada pembicaraan tentang pemandangan dalam lingkungan Islam. Dalam pada pembicaraan ini tidak saja paksa-paksa supaya saudara-saudara masuk ke agama Islam bahwa sesungguhnya hal ini adalah terserah atas hajatnya masing-masing.

Hukum Islam diterangkan bahwa "Perempuan dan Lelaki" itu bedalah. Perbedaan ini bukan dari fihak lelaki lebih tinggi derajatnya dan fihak perempuan itu lebih rendah, tidak? Perempuan dan lelaki Islam itu masing-masing berhak berkemajuan dan berkesempurnaan dan bahwasanya yang dikata kema-juan dan kesempurnaan itu ialah menurut hak batas-batasnya sendiri-sendiri.

Ketahuilah, bahwa orang perempuan dilahirkan di dunia itu memang sudah membawa kodrat berbeda dengan orang lelaki. Umpamanya : fihak lelaki mempunyai kekuatan badan sehingga dengan itu maka dapatlah ia mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berat-berat; tetapi fihak perempuan tidak demikian halnya, kekuatan badannya halus. Begitulah seterusnya. Bahwasannya kaum perempuan itu sudah mempunyai kewajiban sendiri yang tidak dapat dikerjakan oleh kaum lelaki, yakni :

- a. Bunting
- b. Melahirkan anak dari kandungannya, dan
- c. Memberi air susu, memelihara dan mendidik.

Tidak celanya orang perempuan tidak cakap mengerjakan sesuatu pekerjaan dari bagiannya lelaki, sebaliknya pun tidak tercerca sekiranya orang lelaki itu tidak dapat mengerjakan dari kuwajibannya orang perempuan. Inilah memang sudah ada haknya masing-masing yang tidak dapat dipungkiri.

Sebagai juga dengan hal "Burung dan Harimau" , harimau dapat menggigit dan menelan dengan kuat-kuat, akan tetapi tidak dapat terbang. Sebaliknya, burung tidak cakap menggigit

dan menelan, tapi terbang itulah yang paling cakap. Keduanya ini niscaya tidak akan menjadi cela diantara satu sama lain.

Teranglah sudah, bahwa beban kewajiban orang perempuan menanggung keselamatan hidup bersama, itu berat dan sekiranya tanggungan ini ditambah pula, maka bukankah ini namanya menganiaya dan merendahkan diri sendirinya? Fikirlah dengan sungguh-sungguh.

Seorang sastrawan berkata : orang perempuan itu mendjadi bunganya Dunia. Bunga yang pelik lagi permai seharusnya ditaruk pada vaas tempat yang indah dan ada di atas meja yang baik lagi mengkilap; bukan patutnya bunga yang demikian itu ditaruk pada tempat sembarangan. Walaupun buqet yang elok pun tidak akan berharga bunga itu.

Adapun kewajiban orang perempuan dan lelaki akan menuntut ilmu pengetahuan dan mengerjakan (amal) kebajikan sajalah haknya tidak sepeleupun dikurangkan akan haknya, terlebih pula dalam arti melakukan agamanya.

Kepada nyonya-nyonya dan tuan-tuan yang belum mengerti akan seluk-beluknya agama kita Islam ada yang bertanya demikian : Apakah sebabnya Islam mengadakan peraturan bermadu, dan thalaq itu ada di atas kekuasaannya orang lelaki? Bukankah ini ada suatu jalan perendahan bagi kaum perempuan?

Kalau ada orang yang bertanya demikian, maka kamipun timbul pertanyaan kepadanya : Adakah kebajikan dan penghargaan bagi perempuan yang dibuat permainan, tertimbang dengan perempuan itu dikawinnya?

Saudara-saudara,

Mudah-mudahan dalam pembicaraan saya ini tidak salah terima, bukan sama sekali saya bermaksud menggerakkan permaduan dan tidak pula mengancuri pikiran kaum lelaki bermadu; fihak perempuan dengan suka ridla menerima permaduan ini. Pertanyaan itu karena timbul dari beberapa dakwa-dakwa yang tidak sebenarnya kepada agama kita Islam, dikatakan bahwa Islam merendahkan derajat perempuan sebab

Islam meperkenankan bermadu dan bahwa thalaq ada pada tangan lelaki.

Fihak perempuan tidak memegang thalaq itu sudah pada tempatnya. Pada galibnya sifat perempuan itu sangat tergesa-gesa barang apa yang menjadi hajadnya, kurang sabar dan tanah, lembah, gampang sakit hati dan seterusnya. Tidak kurang-kurang perempuan yang menentang suaminya meminta thalaq dengan seketikanya. Untung bahwa lelaki yang bersifat sabar dan kuat fikirnya memegang thalaq itu, jika tidak niscaya mungkin terjadi tiap-tiap bulan sekali bercerai dan seumpama fihak perempuan yang memegang itu maka bolehlah dipastikan tiap-tiap pekan bercerai. Celaknya dari fihak perempuan bahwa lantaran dari lemah fikirnya itu dan dari sebab tergesa-gesa sembarang hajatnya, maka mungkinkah kemenyesalan hatinya atas perbuatannya tersebut. Fihak lelaki memegang thalaq, artinya bahwasanya thalaq atau perempuan itu dalam tangannya si lelaki, bolehlah ia berbuat barang apa yang diperkenankan menurut hukum agama dan sesungguhnya Tuhan Allah subhanahuwata'ala itu tidak senang melihat sikap lelaki yang gegabah melepaskan thalaq kepada isterinya, hendaklah fihak lelaki berhati-hati dan dengan bijaksana melepas itu, maka tidak akan menjadi sebab akan sesuatu hal yang sangat penting lagi menghalang-halangi akan hidup bersama antara lelaki dan isteri. Sebaliknya bagi fihak perempuan, sekiranya ditimbang-timbang dengan seksamanya bahwa hidup mereka dalam suami bini itu tidak membawa manfaat dan bahagia maka tidak halangan-nya fihak perempuan meminta thalaq kepada suaminya dan si suami harus meluluskan.

Saudara-saudara,

Kami serukan pidato saya ini dengan kuat-kuat ke hadapan saudara-saudara, terutama pemimpin bangsa kami, perempuan Indonesia yang hendak memperjuangkan peredaran dunia perempuan agar supaya "Mulia dan Utama", hendaknyalah dengan teliti lagi seksama mempelajari sesuatu masalah, dan dapat menimbang sendiri manakah yang baik dan jelek, sebab keterangan saya ini sangat singkatnya, sehingga untuk memberi seuluh yang luas niscaya tidak pada tempatnya diterangkan

pada majelis ini, hanyalah sekedar perlu menjadi pemandangan bagi gerak lajutnya kita punya "Congres Perempuan Indonesia".

Sekianlah pidato ini saya kuncikan dengan meminta banyak ma'af barang apa yang kurang atau janggalnya perkataan saya.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sumber : Suratmin. 1991. Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama.